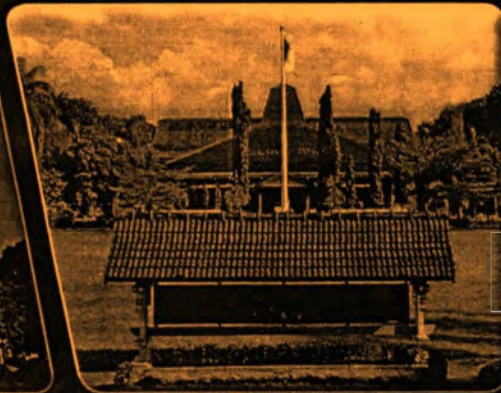




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**

Buku I
LAPORAN KEUANGAN



Nomor : 52A/LHP/XVIII.SMG/05/2022
Tanggal : 17 Mei 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2021**

**Buku I
LAPORAN KEUANGAN**

**Nomor : 52A /LHP/XVIII.SMG/05/2022
Tanggal : 17 Mei 2022**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ...	ii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	iv
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
LAPORAN KEUANGAN	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SISA ANGGARAN LEBIH	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	12
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ..	20
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	34
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	40
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	43
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI DAU DAN REALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19	169
BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN.....	178
BAB VIII PENUTUP	182
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tegal bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian resiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 52B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 17 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

Perwakilan Jawab Pemeriksaan



Amali, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA
Negeri Akuntan No. 9332

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Entitas yang diperiksa adalah Pemerintah Kabupaten Batang.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2021;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. *Laporan Operasional (LO)*;
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2021;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan

keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 22 Maret 2021 s.d 20 April 2022 berdasarkan Surat Tugas Nomor 145/ST/XVIII.SMG/03/2022 tanggal 21 Maret 2022.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/simpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekiutas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, perubahan SAL, laporan operasional, perubahan ekuitas, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Slawi, 17 Mei 2022


BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



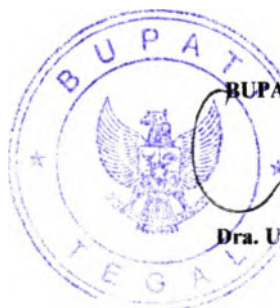
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN ANGGARAN 2021			REALISASI TA 2020
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN - LRA	5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA	5.1.1.a	469.765.165.000,00	591.004.284.313,00	125,81	439.931.567.174,60
Pajak Daerah - LRA	5.1.1.a.1	133.050.000.000,00	143.617.868.928,00	107,94	125.236.006.697,00
Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.a.2	22.447.112.000,00	20.911.507.338,00	93,16	19.290.694.924,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.a.3	15.417.021.000,00	15.417.023.399,00	100,00	14.185.195.523,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	5.1.1.a.4	298.851.032.000,00	411.057.884.648,00	137,55	281.219.670.030,60
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.b	2.129.195.245.000,00	2.117.374.969.793,00	99,44	1.697.875.551.939,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.b.1	1.550.193.467.000,00	1.533.598.637.942,00	98,93	1.477.714.812.445,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak	5.1.1.b.1.1	27.989.556.000,00	39.659.535.809,00	141,69	24.616.468.943,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-SDA	5.1.1.b.1.2	2.121.415.000,00	3.230.678.944,00	152,29	11.670.963.825,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.b.1.3	1.077.039.778.000,00	1.077.039.778.000,00	100,00	1.086.704.382.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.b.1.4	155.693.681.000,00	125.814.842.815,00	80,81	64.753.862.628,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.b.1.5	287.349.037.000,00	287.853.802.374,00	100,18	289.969.135.049,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.b.2	378.196.584.000,00	378.196.584.000,00	100,00	64.411.379.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.b.2	18.742.708.000,00	18.742.708.000,00	100,00	64.411.379.000,00
Dana Desa	5.1.1.b.2	359.453.876.000,00	359.453.876.000,00	100,00	0,00
Transfer Pemerintah - Provinsi	5.1.1.b.3	200.805.194.000,00	205.579.747.851,00	102,38	155.749.360.494,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.b.3.a	181.202.194.000,00	186.620.461.851,00	102,99	151.186.151.494,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.b.3.b	19.603.000.000,00	18.959.286.000,00	96,72	4.563.209.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LRA	5.1.1.c	151.829.800.000,00	154.180.111.946,00	101,55	513.964.719.584,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.c	6.500.000.000,00	5.539.153.846,00	85,22	155.652.766.584,00
Pendapatan Dana Darurat - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undang	5.1.1.c	145.329.800.000,00	148.640.958.100,00	102,28	358.311.953.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.750.790.210.000,00	2.862.559.366.052,00	104,06	2.651.771.838.697,60
BELANJA	5.1.2	2.467.200.647.000,00	2.285.151.931.627,00	92,62	2.010.868.784.570,52
BELANJA OPERASI	5.1.2.a	2.027.307.962.130,00	1.905.870.135.761,00	94,01	1.683.573.672.389,52
Belanja Pegawai	5.1.2.a.1	1.119.870.986.289,00	1.072.594.469.688,00	95,78	1.068.550.795.583,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2	833.631.449.841,00	763.648.877.353,00	91,61	571.116.366.806,52
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.a.3	70.427.526.000,00	66.338.288.720,00	94,19	38.230.180.000,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.a.4	3.378.000.000,00	3.288.500.000,00	97,35	5.676.330.000,00

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN ANGGARAN 2021			REALISASI TA 2020
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL	5.1.2.b	423.892.684.870,00	368.877.462.091,00	87,02	248.977.818.850,00
Belanja Tanah	5.1.2.b.1	1.511.000.000,00	384.882.542,00	25,47	255.437.200,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2	109.164.469.120,00	94.646.809.885,00	86,70	66.491.340.472,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3	152.630.442.450,00	128.622.796.811,00	84,27	68.664.014.835,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4	154.075.944.100,00	143.805.033.653,00	93,33	100.236.614.296,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5	6.510.829.200,00	1.417.939.200,00	21,78	13.330.412.047,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.c	16.000.000.000,00	10.404.333.775,00	65,03	78.317.293.331,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.c	16.000.000.000,00	10.404.333.775,00	65,03	78.317.293.331,00
TRANSFER	5.1.3	494.685.660.000,00	491.512.110.860,00	99,36	494.671.164.849,00
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	5.1.3.a	15.000.000.000,00	11.826.401.862,00	78,84	10.151.562.329,00
Bagi Hasil Pajak	5.1.3.a	15.000.000.000,00	11.826.401.862,00	78,84	8.606.399.629,00
Bagi hasil Pendapatan lainnya					1.545.162.700,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.b	479.685.660.000,00	479.685.708.998,00	100,00	484.519.602.520,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.b	479.685.660.000,00	479.685.708.998,00	100,00	483.311.953.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					1.207.649.520,00
SURPLUS / (DIFISIT)		(211.096.097.000,00)	85.895.323.565,00	(40,69)	146.231.889.278,08
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PENERIMAAN DAERAH	5.1.4.a				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.4.a	218.096.097.000,00	218.096.097.806,02	100,00	88.993.266.248,94
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang		0,00	34.084.680,00	0,00	109.842.755,00
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		218.096.097.000,00	218.130.182.486,02	100,02	89.103.109.003,94
PENGELUARAN DAERAH	5.1.4.b				
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.4.b	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	15.849.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - LRA			0,00		1.389.900.476,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.4.b	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	17.238.900.476,00
PEMBIAYAAN NETTO		211.096.097.000,00	211.130.182.486,02	100,02	71.864.208.527,94
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.5	0,00	297.025.506.051,02		218.096.097.806,02

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2021	2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1.1	218.096.097.806,02	88.931.882.896,96
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.1.2	218.096.097.806,02	88.993.266.248,94
Sub Total		-	(61.383.351,98)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.1.3	297.025.506.051,02	218.096.097.806,02
Sub Total		297.025.506.051,02	218.034.714.454,04
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.1.4	-	61.383.351,98
Lain-lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.1.5	297.025.506.051,02	218.096.097.806,02

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PER 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020
(Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	TAHUN 2021	TAHUN 2020
ASET	5.3.1		
ASET LANCAR	5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	149.801.598.185,00	149.021.313.468,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.b	0,00	23.433.500,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.c	480.258.696,00	48.359.266,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.d	146.587.554.125,02	67.841.620.782,02
Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.e	200.413.452,00	1.205.864.232,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.f	123.038,00	222.833,00
Setara Kas		0,00	-
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.g	70.781.177.655,00	64.732.868.752,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.h	1.091.617.618,00	1.105.952.143,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah y	5.3.1.1.i	14.067.590.752,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah	5.3.1.1.j	48.285.474.259,00	59.015.657.661,93
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.k	0,00	5.700.147.212,00
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.l	2.061.747.513,00	17.537.774.722,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.m	12.474.721.633,00	10.009.566.313,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.n	(77.807.170.006,04)	(77.036.203.759,84)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.o	0,00	2.430.000,00
Persediaan	5.3.1.1.p	50.657.703.664,19	43.963.501.389,43
Jumlah Aset Lancar		418.682.810.584,17	343.172.508.514,54
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
Investasi Nonpermanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir		0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang		0,00	0,00
Investasi Non permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.a	232.348.730.622,14	222.356.153.912,81
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen		232.348.730.622,14	222.356.153.912,81
Jumlah Investasi Jangka Panjang		232.348.730.622,14	222.356.153.912,81
ASET TETAP	5.3.1.3		
Tanah	5.3.1.3.a	637.518.072.088,63	640.661.079.386,63
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	816.748.193.497,64	732.317.257.082,40
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.433.739.754.307,50	1.316.105.857.209,50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.d	2.192.106.994.564,87	2.151.543.280.829,87
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	141.767.910.119,56	140.863.864.499,56
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	25.474.666.356,00	4.788.715.031,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	(2.222.285.762.540,74)	(2.046.128.649.270,57)
Jumlah Aset Tetap		3.025.069.828.393,46	2.940.151.404.768,39

URAIAN	Reff. CaLK	TAHUN 2021	TAHUN 2020
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.4		
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.4.a	267.446.839,00	232.155.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.b	39.135.265.506,00	39.135.265.506,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.c	3.153.360.657,00	3.024.945.257,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.d	(2.600.541.047,25)	(2.353.414.572,14)
Aset lain-lain	5.3.1.4.e	174.781.196.868,67	83.599.911.355,67
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5.3.1.4.f	(50.414.034.320,00)	(24.777.971.675,00)
Jumlah Aset Lainnya		164.322.694.503,42	98.860.890.871,53
JUMLAH ASET		3.840.424.064.103,19	3.604.540.958.067,27
KEWAJIBAN	5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	52.658.045,00	44.716.275,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.2	4.416.832.407,00	5.368.667.691,00
Utang Beban	5.3.2.3	38.384.009.075,00	31.333.819.105,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.4	0,00	775.031.438,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		42.853.499.527,00	37.522.234.509,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		42.853.499.527,00	37.522.234.509,00
EKUITAS			
EKUITAS	5.3.3	3.797.570.564.576,19	3.567.018.723.558,27
Jumlah EKUITAS		3.797.570.564.576,19	3.567.018.723.558,27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.840.424.064.103,19	3.604.540.958.067,27

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN - LO	5.4.1.1	2.527.901.797.297,40	2.322.758.929.181,75	205.142.868.115,65	8,83
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1.1	605.510.435.635,40	438.669.422.816,65	166.841.012.818,75	38,03
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1.a	151.736.521.160,00	129.907.890.094,00	21.828.631.066,00	16,80
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.1.b	21.345.065.647,00	19.841.774.700,00	1.503.290.947,00	7,58
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.1.c	34.977.190.860,33	19.015.530.424,72	15.961.660.435,61	83,94
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.1.d	397.451.657.968,07	269.904.227.597,93	127.547.430.370,14	47,26
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.1.2	1.737.519.950.810,00	1.701.219.102.083,00	36.300.848.727,00	2,13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.1.2.a	1.528.673.522.168,00	1.467.101.650.639,00	61.571.871.529,00	4,20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.1.2.b	18.742.708.000,00	64.411.379.000,00	(45.668.671.000,00)	(70,90)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.2.c	190.103.720.642,00	169.706.072.444,00	20.397.648.198,00	12,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.1.3	184.871.410.852,00	182.870.404.282,10	2.001.006.569,90	1,09
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.1.3.a	36.230.452.752,00	182.870.404.282,10	-146.639.951.530,10	-80,19
Dana Darurat - LO		0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Lainnya - LO		148.640.958.100,00	0,00	148.640.958.100,00	
BEBAN	5.4.1.2	2.293.955.749.279,88	2.138.537.056.470,22	153.651.238.553,66	7,18
Beban Pegawai - LO	5.4.1.2.1	1.073.336.051.397,00	1.068.215.623.306,00	5.120.428.091,00	0,48
Beban Persediaan	5.4.1.2.2	113.372.546.711,74	88.508.893.618,26	24.863.653.093,48	28,09
Beban Jasa	5.4.1.2.3	608.851.204.576,50	432.559.750.597,46	176.291.453.979,04	40,76
Beban Pemeliharaan	5.4.1.2.4	32.437.066.497,00	31.810.959.975,00	626.106.522,00	1,97
Beban Perjalanan Dinas	5.4.1.2.5	24.742.748.705,00	24.265.753.912,00	476.994.793,00	1,97
Beban Bunga		0,00	0,00	-	
Beban Subsidi		0,00	0,00	-	
Beban Hibah	5.4.1.2.6	78.604.626.216,00	79.859.636.008,00	(1.255.009.792,00)	(1,57)
Beban Bantuan Sosial	5.4.1.2.7	3.944.114.747,00	5.676.330.000,00	(1.732.215.253,00)	(30,52)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.1.2.8	213.866.833.804,04	262.713.478.613,39	(48.846.644.809,35)	(18,59)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.1.2.9	10.974.867.509,60	8.567.418.591,11	2.407.448.918,49	28,10
Beban Lain-lain	5.4.1.2.10	1.767.454.256,00			
Beban Transfer	5.4.1.2.11	132.058.234.860,00	136.359.211.849,00	(4.300.976.989,00)	(3,15)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		233.946.048.017,52	184.221.872.711,53	51.491.629.561,99	27,95

URAIAN	Reff CaLK	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0,00	0,00	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		0,00	0,00	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		0,00	0,00	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.2.1	4.469.581.120,00	3.639.221.939,00	830.359.181,00	22,82
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(4.469.581.120,00)	(3.639.221.939,00)	(830.359.181,00)	22,82
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		229.476.466.897,52	180.582.650.772,53	50.661.270.380,99	28,05
POS LUAR BIASA	5.4.3				
Pendapatan Luar Biasa - LO		-	-	-	-
Beban Luar Biasa	5.4.3.1	5.438.998.750,00	16.270.219.783,00	(10.831.221.033,00)	(66,57)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(5.438.998.750,00)	(16.270.219.783,00)	10.831.221.033,00	(66,57)
SURPLUS/DEFISIT-LO		224.037.468.147,52	164.312.430.989,53	61.492.491.413,99	37,42

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		5.5.1	
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		143.617.868.928,00	125.236.006.697,00
Pendapatan Retribusi Daerah		20.911.507.338,00	19.290.694.924,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.417.023.399,00	14.185.195.523,00
Lain-lain PAD yang Sah		410.398.168.148,00	279.593.722.494,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.533.598.637.942,00	1.477.714.812.445,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		378.196.584.000,00	64.411.379.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		205.579.747.851,00	155.749.360.494,00
Pendapatan Hibah		5.539.153.846,00	155.652.543.751,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Unda		148.640.958.100,00	358.311.953.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.861.899.649.552,00	2.650.145.668.328,60
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		1.072.594.469.688,00	1.068.550.795.583,00
Belanja Barang		763.648.877.353,00	571.116.366.806,52
Bunga		-	-
Subsidi		-	-
Belanja Hibah		66.338.288.720,00	38.230.180.000,00
Belanja Bantuan Sosial		3.288.500.000,00	5.676.330.000,00
Belanja Tak Terduga		10.404.333.775,00	78.317.293.331,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan		11.826.401.862,00	10.151.562.329,00
Transfer Bantuan Keuangan		479.685.708.998,00	484.519.602.520,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.407.786.580.396,00	2.256.562.130.569,52
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		454.113.069.156,00	393.583.537.759,08

URAIAN	Reff CaLK	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		36.510.000,00	18.040.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		323.160.000,00	146.682.060,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		5.000.000,00	
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		31.304.000,00	57.505.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		263.742.500,00	13.820.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		34.084.680,00	109.842.755,00
Jumlah Arus Masuk Kas		693.801.180,00	345.889.815,00
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Belanja Tanah		384.882.542,00	255.437.200,00
Belanja Peralatan dan Mesin		94.646.809.885,00	66.491.340.472,00
Belanja Gedung dan Bangunan		128.622.796.811,00	68.664.014.835,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		143.805.033.653,00	100.236.614.296,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		1.417.939.200,00	13.330.412.047,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.500.000.000,00	15.849.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		373.377.462.091,00	264.826.818.850,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(372.683.660.911,00)	(264.480.929.035,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
5.5.3			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri			
Penerimaan Pinjaman Luar Negeri		-	-
Penerimaan Utang Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali/Pembayaran Piutang		-	-
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	1.389.900.476,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
Pembayaran Pokok Utang Obligasi		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		2.500.000.000,00	-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		2.500.000.000,00	1.389.900.476,00
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pendanaan		(2.500.000.000,00)	(1.389.900.476,00)

URAIAN	Reff CaLK	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		166.476.917.604,00	135.919.398.872,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	100.899.992,00
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		48.359.266,00	67.378.256,00
Kiriman Uang Masuk		-	
Penerimaan Koreksi		44.441.445,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		166.569.718.315,00	136.087.677.120,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		166.476.917.604,00	135.898.116.097,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	23.433.500,00
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		480.258.696,00	48.359.266,00
Kiriman Uang Keluar		-	
Pengeluaran Koreksi		21.282.775,00	22.117.972,02
Jumlah Arus Keluar Kas		166.978.459.075,00	135.992.026.835,02
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris		(408.740.760,00)	95.650.284,98
KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		78.520.667.485,00	127.808.358.533,06
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & BOS		218.069.021.315,02	90.260.439.948,96
Saldo Awal Kas di BUD		149.021.313.468,00	51.565.336.774,00
Saldo Awal Kas di BLUD		67.841.620.782,02	34.146.113.382,96
Saldo Awal Kas BOS		1.205.864.232,00	4.548.989.792,00
Saldo Awal Kas Lainnya		222.833,00	
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & BOS		296.589.688.800,02	218.069.021.315,02
Saldo Akhir Kas di BUD		149.801.598.185,00	149.021.313.468,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		146.587.554.125,02	67.841.620.782,02
Saldo Akhir Kas BOS		200.413.452,00	1.205.864.232,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		123.038,00	222.833,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran			23.433.500,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		480.258.696,00	48.359.266,00
Saldo Akhir Kas		297.069.947.496,02	218.140.814.081,02

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara



BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Audited)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2021	2020
EKUITAS AWAL	5.6.1	3.567.018.723.558,27	3.342.308.288.450,03
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	224.037.468.147,52	164.312.430.989,53
Dampak Kumulatif Perubahan	5.6.3	6.514.372.870,40	60.398.004.118,71
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas		6.514.372.870,40	60.398.004.118,71
EKUITAS AKHIR	5.6.4	3.797.570.564.576,19	3.567.018.723.558,27

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH



KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(Audited)

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Operasional (LO); Neraca; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Laporan Arus Kas (LAK); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yang mencakup unsur pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal selama satu periode Tahun Anggaran 2021.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna, berupa posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan (Tahun Anggaran 2021).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keeempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- 29) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
- 30) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 32) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1.974);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 80);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 130);
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 110);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 8);
- 43) Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 58);
- 44) Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 36);
- 45) Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
- 46) Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 61);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 memuat penjelasan dan atau catatan atas laporan keuangan dalam periode Tahun Anggaran 2021 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I berisi Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Bab II berisi Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD, yang menyajikan diskripsi ekonomi makro/ekonomi regional, kebijakan keuangan, dan indikator pencapaian target kinerja APBD;
3. Bab III berisi Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
4. Bab IV berisi Kebijakan Akuntansi, yang menjelaskan tentang entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP, serta kebijakan akuntansi tertentu;
5. Bab V berisi Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, yang merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK);

6. Bab VI berisi Penjelasan atas informasi DAU 8% dan Realokasi Anggaran Terkait Penanganan Covid-19
7. Bab VII, berisi Penjelasan Atas Informasi-informasi non keuangan, yang menjelaskan tentang gambaran umum daerah;
8. Bab VIII, berisi Penutup.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal tahun 2020 sebesar 1,46%, sedangkan tahun 2019 sebesar 5,58%. Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal ditopang dari kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar masih dari kategori Industri pengolahan sebesar 35,26%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatat sebesar 14,93% dan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencatat sebesar 13,24%. Untuk kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2020 mencatat pertumbuhan yang positif.

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2020 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp35.319.835,18 juta, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp35.232.187,56 juta dan tahun 2018 sebesar Rp32.770.354,50 juta. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2020 mencapai Rp24.502.618,97 juta, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp24.866.727,91 juta dan tahun 2018 sebesar Rp23.552.548,37 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian*(BPS)

Kontribusi sektor pertanian relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berfokus pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, dimana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun.

Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Pembangunan di Sektor Perikanan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kualitas kehidupan desa pantai melalui peningkatan dan diversifikasi produksi ikan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta meningkatkan nilai ekspor. Usaha perlindungan dan pengembangan perikanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan dan memajukan kehidupan masyarakat desa pantai.

Sub sektor perikanan, meliputi kegiatan usaha perikanan laut, perikanan budidaya/darat tambak, perikanan budidaya/darat kolam dan perikanan umum. Hasil tangkapan perikanan laut tahun 2020 di Kabupaten Tegal tercatat sebesar 1.964,38 ton atau naik 18 persen dibandingkan tahun 2019. Produksi perikanan budidaya/darat tambak tahun 2020 sebesar 1.791,42 ton atau naik 10 persen dari tahun 2019. Produksi perikanan budidaya/darat kolam tahun 2020 sebesar 938,84 ton atau naik 5,8 persen dari tahun 2019. Sementara untuk produksi perikanan umum tahun 2020 sebesar 207,39 ton atau naik 0,2 persen dari tahun 2019*(Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Tegal).

Pembangunan di Sektor Peternakan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani ternak, mendorong diversifikasi pangan, perbaikan mutu gizi masyarakat serta mengembangkan ekspor dengan melalui usaha peningkatan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi ternak.

Jenis tenak besar yang diusahakan di Kabupaten Tegal antara lain sapi (potong/perah), kerbau dan kuda, sedangkan ternak kecil antara lain kambing dan domba. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas (ayam, itik, burung puyuh) dan kelinci.

Populasi ternak besar pada tahun 2019 untuk sapi, kerbau dan kuda masing-masing tercatat sebanyak 11.924 ekor, 4.166 ekor dan 322 ekor. Kecamatan Margasari merupakan kecamatan dengan jumlah ternak besar terbanyak. Populasi kambing dan domba yang merupakan tenak kecil tercatat sebanyak 64.937 ekor dan 186.453 ekor. Dibandingkan tahun sebelumnya, populasi ternak kambing mengalami penurunan sedangkan domba mengalami peningkatan.*(BPS dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal)

Banyaknya ternak besar yang dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Tegal pada tahun 2020 yaitu untuk sapi tercatat sebanyak 1.653 ekor dan kerbau 26 ekor. Sedangkan kambing dan domba yang merupakan ternak kecil tercatat sebanyak 377 ekor dan 668 ekor. Produksi daging (sapi,



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

kerbau, kambing, domba, ayam dan itik) tahun 2020 tercatat sebesar 11.284.734 kg atau naik sebesar 1,10 persen.*(BPS)

Selama tiga tahun terakhir pertumbuhan sektor industri terjadi penurunan. Dengan mengacu pada pertumbuhan atas dasar harga konstan, maka pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan 6,44 persen melambat menjadi -0,66 persen pada tahun berikutnya, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,28 persen.

Sedangkan berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi sektor industri di Kabupaten Tegal tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020, meskipun secara nilai mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 mencapai Rp12.426.093,65 juta, yang berkontribusi sebesar 35,20% terhadap PDRB, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp13.366.268,30 juta, namun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan, yaitu sebesar 33,80%. Atas dasar harga konstan sektor industri mencapai Rp8.272.514,78 juta, atau sebesar 4,28% dari PDRB tahun 2021.*(BPS).

Namun demikian, Pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Tegal pada tahun 2021 diproyeksikan tak sesuai dengan ekspektasi, menyusul rontoknya sejumlah indikator perekonomian daerah itu akibat serangan virus corona atau Covid-19. Hasil kajian yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah baru-baru ini memperkirakan skenario paling ekstrem pertumbuhan ekonomi Jateng tahun ini hanya tumbuh di kisaran 2,8%. Angka ini jauh dari proyeksi awal di kisaran 5,8%.

Penyebaran Covid-19 yang semakin masif mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal terutama pada sisi perdagangan dan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan hasil kajian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal melalui diskusi dengan berbagai pelaku usaha di sektor-sektor kontributor utama perekonomian Eks Karesidenan Pekalongan, penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak pada terbatasnya persediaan bahan baku dan penundaan pesanan.

Dalam rangka mendukung menggeliatnya kembali pertumbuhan ekonomi daerah sebagai dampak dari adanya bencana nasional nonalam Covid-19, APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dirancang untuk menjalankan fungsinya baik sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat alokasi sumber daya untuk menggerakkan ekonomi, maupun alat memperbaiki distribusi pendapatan. Kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan kepada upaya memacu pertumbuhan ekonomi lokal yang selanjutnya diharapkan dapat menimbulkan pengungkit bagi peningkatan PAD.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi makro perekonomian daerah Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh kondisi makro perekonomian nasional yang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 khususnya beberapa indikator perekonomian pokok yang bersifat simultan atau saling mempengaruhi seperti



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi pada kisaran -0,4 - 1,0% dan tingkat inflasi.

Asumsi makro perekonomian pokok nasional tersebut secara langsung berpengaruh terhadap asumsi perekonomian daerah Kabupaten Tegal tahun 2021. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dan prospek perekonomian, serta berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan didasarkan kondisi terkini serta langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan, APBN tahun 2021 diharapkan dapat mendukung pemulihan dampak Covid-19 dan mampu mencapai berbagai sasaran pembangunan di tahun 2021 secara lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

Dari sisi eksternal tantangan sekaligus risiko yang perlu diwaspadai yaitu berasal dari ketidakpastian global dan kebijakan moneter negara maju. Sementara dari sisi domestik, sumber pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh kelanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Selain itu, tingkat konsumsi yang tetap kuat dan stabil juga akan menopang laju pertumbuhan ekonomi, didukung oleh terjaganya laju inflasi dan daya beli masyarakat.

Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah saat ini, merevisi potensi pertumbuhan ekonomi pada skenario berat di kisaran 1% karena adanya kontraksi yang cukup dalam pada kuartal II di tahun ini. Meski begitu, realisasi akhirnya tentu akan sangat tergantung dari kemampuan pemerintah untuk memulihkan ekonomi di kuartal III dan kuartal IV atau pada semester 2 tahun ini.

Demikian pula berdasarkan skala perekonomian daerah Kabupaten Tegal dan penetapan asumsi perekonomian daerah yang bersifat moderat dalam RKPD tahun 2021 serta kondisi riil perekonomian daerah yang relatif stabil khususnya terkait dengan ketersediaan barang dan jasa, maka asumsi indikator perekonomian makro daerah Kabupaten Tegal dalam KUPA tahun 2021 juga mengalami perubahan.

Nilai PDRB Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 35,320 triliun. Secara nominal, nilai PDRB ini hanya mengalami kenaikan sebesar 87,647 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 35,232 triliun rupiah. Melambatnya nilai PDRB ini dipengaruhi melambatnya produksi I seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi akibat Covid-19. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami penurunan dari 24,866 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 24,502 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Tegal mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sekitar -1,46 persen, paling lambat dibanding tahun sebelumnya. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha, akibat pandemi Covid-19 di seluruh dunia

Berdasarkan realisasi tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya maka target realisasi makro ekonomi Kabupaten Tegal dalam KUPA PPAS Perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

tahun 2021 adalah sebagai berikut: Pertumbuhan Ekonomi 3,2%-5,3%, Inflasi 2,0-4,0%, Kemiskinan 8,14-8,45% dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 9,82%-10,21%, juga pertimbangan yang mendasari dalam perubahan APBD 2021 adalah adanya penyesuaian perubahan prediksi penerimaan pendapatan daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berupa kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengurangan anggaran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, penyesuaian atas penetapan Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, penyesuaian penetapan SILPA sesuai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang menjadi aspirasi masyarakat yang perlu mendapat penanganan serta penajaman kinerja pada beberapa program dan kegiatan

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal tahun 2021 disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal tahun 2021 yang merupakan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : ^{900/3418/2020}_{170/10/2020} tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 dan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan DPRD Kabupaten Tegal Nomor : ^{900/25/B1256/2021}_{170/10/2021} tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tegal Tahun 2021 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021. KUA disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024.

2.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2021, adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Optimalisasi pengelolaan objek-objek dengan pihak ketiga yang telah kembali kepada pemerintah daerah (pasar trayeman, pasar banjaran, aset-aset diobjek wisata guci).
- 3) Mengidentifikasi dan inventarisasi potensi PBB dengan pemetaan, pendataan dan penilaian.
- 4) Mengkaji nilai NJOP tanah dan bangunan mendekati harga pasar dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang akan timbul.
- 5) Melakukan perhitungan potensi pajak *self assesment* dengan menyusun basis data dan tax gap yang ada.
- 6) Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar.
- 7) Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
- 8) Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
- 9) Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
- 10) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Kebijakan Umum Dana Perimbangan

- 1) Peningkatan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (*Term Of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah.
- 2) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana perimbangan khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana perimbangan.
- 4) Mengupayakan adanya penerimaan dana hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan daerah.
- 5) Peningkatan kualitas prasyarat Dana Intensif Daerah (DID). DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP/WDP serta penetapan Perda APBD tepat waktu. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (50%), kinerja pelayanan publik dasar (25%) dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25%).
- 6) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

2.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 3. Alokasi Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.
 4. Alokasi Belanja Daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
 5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan.

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah mengalami perubahan menjadi terdiri dari :

1. Belanja Operasi

merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didorong untuk peningkatan sarpras kualitas pendidikan.
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.
2. Belanja Modal
- merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :
- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga
- merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Transfer

Transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun yang lalu (SiLPA), sedangkan yang kedua berasal dari penerimaan piutang daerah. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Apabila terjadi defisit anggaran riil maka diupayakan untuk menutup defisit melalui :

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan aset pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 adalah penyertaan modal pada BUMD maupun lembaga usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a. Anggaran Pendapatan

Pendapatan daerah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp2.750.790.210.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp469.765.165.000,00 terdiri dari:
 - a) Pendapatan pajak daerah Rp133.050.000.000,00 yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
 - b) Pendapatan retribusi daerah Rp22.447.112.000,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp15.417.021.000,00 berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp298.851.032.000,00 berupa hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan BLUD, hasil dari pengelolaan dana bergulir, lain-lain PAD yang sah lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp2.129.195.245.000,00, yang terdiri dari :
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp1.550.193.467.000,00 yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak Rp27.989.556.000,00 , Dana Bagi Hasil SDA Rp2.121.415.000,00 , Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.077.039.778.000,00 , Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp155.693.681.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp287.349.037.000,00
 - b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Rp378.196.584.000,00 yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Rp18.742.708.000,00 dan Dana Desa Rp359.453.876.000,00.
 - c) Pendapatan Transfer Pemerintah-Provinsi Rp200.805.194.000,00 yang berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp181.202.194.000,00 dan Bantuan Keuangan Rp19.603.000.000,00.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah Rp151.829.800.000,00 yang berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp6.500.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp145.329.800.000,00.

Anggaran pendapatan berdasarkan urusan pemerintahan ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	PENDAPATAN	2.750.790.210.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	285.817.771.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	5.867.315.000,00
3	Urusan Pilihan	15.195.538.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.443.909.586.000,00

Rincian anggaran pendapatan berdasarkan urusan dapat dilihat pada *lampiran 2.1.*

b. Anggaran Belanja

Anggaran belanja daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp2.961.886.307.000,00. Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar Rp1.890.525.843.000,00, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp122.271.911.000,00, urusan pilihan Rp68.941.723.000,00 dan urusan pemerintahan fungsi penunjang Rp880.146.830.000,00.

Penjelasan secara keseluruhan dari alokasi belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 2.2. Anggaran Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	BELANJA	2.961.886.307.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.890.525.843.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	122.271.911.000,00
3	Urusan Pilihan	68.941.723.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	880.146.830.000,00

Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan dapat dilihat pada *lampiran 2.2*.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka anggaran belanja daerah diklasifikasikan dalam (1) Belanja Operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan (2) Belanja Modal (3) Belanja tak terduga yang dialokasikan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (4) Transfer (Transfer bagi hasil ke desa).

Berdasarkan klasifikasi tersebut belanja operasi dianggarkan sebesar Rp2.027.307.962.130,00 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1.119.870.986.289,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp833.631.449.841,00, belanja hibah sebesar Rp70.427.526.000,00 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp3.378.000.000,00.

Belanja modal dianggarkan sebesar Rp423.892.684.870,00 yang terdiri dari belanja tanah Rp1.511.000.000,00, belanja peralatan dan mesin Rp109.164.469.120,00, belanja bangunan dan gedung Rp152.630.442.450,00, belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp154.075.944.100,00, serta belanja aset tetap lainnya sebesar Rp6.510.829.200,00.

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp16.000.000.000,00

Untuk Transfer dianggarkan sebesar Rp494.685.660.000,00 yaitu Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp479.685.660.000,00.

Untuk anggaran pembiayaan daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah Rp218.096.097.000,00 yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah Rp7.000.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp4.500.000.000,00 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar
Rp2.500.000.000,00

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto
adalah Rp 211.096.097.000,00 dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)
tahun berkenaan Rp 0,00.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2021 direncanakan sebesar Rp2.750.790.210.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp2.862.559.366.052,00, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp111.769.156.052,00 atau 4,06%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp469.765.165.000,00 dengan realisasi sebesar Rp591.004.284.313,00, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp121.239.119.313,00 atau 25,81%, terdiri dari :
 - a) Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan Rp133.050.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp143.617.868.928,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp10.567.868.928,00 atau 7,94%.
 - b) Pendapatan Retribusi Daerah Rp22.447.112.000,00 yang terealisasi sebesar Rp20.911.507.338,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.535.604.662,00 atau 6,84%.
 - c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp15.417.021.000,00 yang terealisasi sebesar Rp15.417.023.399,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp2.399,00 atau 0,0000156%.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp298.851.032.000,00 yang terealisasi sebesar Rp411.057.884.648,00, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp112.206.852.648,00 atau 37,55%.
- 2) Pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp2.129.195.245.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.117.374.969.793,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp11.820.275.207,00 atau 0,56%, terdiri dari:
 - a) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan Rp1.550.193.467.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.533.598.637.942,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp16.594.829.058,00 atau 1,07%, yang berasal dari:
 - i. Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp27.989.556.000,00, terealisasi sebesar Rp39.659.535.809,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp11.669.979.809,00 atau 41,69%.
 - ii. Dana Bagi Hasil SDA dianggarkan sebesar Rp2.121.415.000,00 , dan terealisasi sebesar Rp3.230.678.944,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar 1.109.263.944,00 atau 52,29%



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- iii. Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp1.077.039.778.000,00 terealisasi sebesar Rp1.077.039.778.000,00 atau 100%.
 - iv. Dana Alokasi Khusus Fisik dianggarkan Rp155.693.681.000,00. terealisasi sebesar Rp125.814.842.815,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp29.878.838.185,00 atau 19,19%.
 - v. Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan Rp287.349.037.000,00 terealisasi sebesar Rp287.853.802.374,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp504.765.374,00 atau 0,18%.
- b) Transfer pemerintah pusat - lainnya dianggarkan sebesar Rp378.196.584.000,00 terealisasi sebesar Rp378.196.584.000,00 atau 100% yang berasal dari :
- i. Dana Insentif Daerah dianggarkan Rp18.742.708.000,00 terealisasi sebesar Rp18.742.708.000,00 atau 100%
 - ii. Dana Desa dianggarkan sebesar Rp359.453.876.000,00 terealisasi sebesar Rp359.453.876.000,00 atau 100%
- c) Transfer pemerintah-provinsi sebesar Rp200.805.194.000,00 terealisasi sebesar Rp205.579.747.851,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp4.774.553.851,00 atau 2,38% yang berasal dari :
- i. Pendapatan Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp181.202.194.000,00 terealisasi sebesar Rp186.620.461.851,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp5.418.267.851,00 atau 2,99%.
 - ii. Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp19.603.000.000,00 terealisasi sebesar Rp18.959.286.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp643.714.000,00 atau 3,28%.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp151.829.800.000,00 terealisasi sebesar Rp154.180.111.946,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp2.350.311.946,00 atau 1,55% terdiri dari:
- a) Pendapatan Hibah sebesar Rp6.500.000.000,00, terealisasi sebesar Rp5.539.153.846,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp960.846.154,00 atau 14,78%
 - b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp145.329.800.000,00 terealisasi sebesar Rp148.640.958.100,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp3.311.158.100,00 atau 2,28%.

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

fungsi penunjang pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada *lampiran 3.1*.

b. Anggaran Belanja

Berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah maka belanja daerah terdiri dari belanja urusan wajib pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp1.890.525.843.000,00 dan realisasi Rp1.762.752.228.575,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp127.773.614.425,00 atau 6,76%, belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar dengan anggaran sebesar Rp122.271.911.000,00 dan realisasi sebesar Rp109.483.494.447,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp12.788.416.553,00 atau 10,46%, belanja urusan pilihan dengan anggaran sebesar Rp68.941.723.000,00 dan realisasi sebesar Rp64.315.465.209,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.626.257.791,00 atau 6,71%, serta belanja urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dengan anggaran sebesar Rp880.146.830.000,00 dan realisasi sebesar Rp840.112.854.256,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp40.033.975.744,00 atau 4,55%. Rincian anggaran belanja berdasarkan urusan pemerintahan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat pada *lampiran 3.2*.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2021 sebesar Rp2.467.200.647.000,00 dengan realisasi Rp2.285.151.931.627,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp182.048.715.373,00 atau 7,38% yang diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

- 1) Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp2.027.307.962.130,00 dengan realisasi sebesar Rp1.905.870.135.761,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp121.437.826.369,00 atau 5,99%, yang terdiri dari :
 - a) Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.119.870.986.289,00 dengan realisasi sebesar Rp1.072.594.469.688,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp47.276.516.601,00 atau 4,22%,
 - b) Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp833.631.449.841,00, dengan realisasi sebesar Rp763.648.877.353,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp69.982.572.488,00 atau 8,39%,
 - c) Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp70.427.526.000,00 dengan realisasi sebesar Rp66.338.288.720,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp4.089.237.280,00 atau 5,81%,



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- d) Belanja Bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp3.378.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.288.500.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp89.500.000,00 atau 2,65%.
- 2) Belanja modal dianggarkan sebesar Rp423.892.684.870,00 dengan realisasi sebesar Rp368.877.462.091,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp55.015.222.779,00 atau 12,98%, yang terdiri dari :
- a) Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp1.511.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp384.882.542,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.126.117.458,00 atau 74,53%.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp109.164.469.120,00 dengan realisasi sebesar Rp94.646.809.885,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp14.517.659.235,00 atau 13,30%.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp152.630.442.450,00 dengan realisasi sebesar Rp128.622.796.811,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp24.007.645.639,00 atau 15,73%.
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp154.075.944.100,00 dengan realisasi sebesar Rp143.805.033.653,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp10.270.910.447,00 atau 6,67%.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp6.510.829.200,00 dengan realisasi sebesar Rp1.417.939.200,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp5.092.890.000,00 atau 78,22%.
- 3) Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp16.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.404.333.775,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp5.595.666.225,00 atau 34,97%.
- c. Anggaran Transfer

Transfer dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp494.685.660.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp491.512.110.860,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp3.173.549.140,00 atau 0,64%. Transfer merupakan transfer bagi hasil ke kabupaten yang terdiri dari transfer bagi hasil ke desa dan transfer bantuan keuangan.

- 1) Transfer Bagi Hasil ke Desa dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.826.401.862,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp3.173.598.138,00 atau 21,16%.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 2) Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp479.685.660.000,00 dengan realisasi sebesar Rp479.685.708.998,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp48.998,00 atau 0,00001%.

d. Anggaran Pembiayaan

Untuk realisasi anggaran pembiayaan daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp218.096.097.000,00 dengan realisasi sebesar Rp218.130.182.486,02 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp34.085.486,02 atau 0,02%, yang terdiri dari :
- a) Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp218.096.097.000,00 dengan realisasi sebesar Rp218.096.097.806,02 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp806,02;
- b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp34.084.680,00;
- 2) Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100% yang terdiri dari
- Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 100% yaitu penyertaan Modal pada PDAM.
 - Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100%

Berdasarkan kondisi tersebut maka anggaran pembiayaan netto yang dianggarkan sebesar Rp211.096.097.000,00 terdapat realisasi sebesar Rp211.130.182.486,02 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp34.085.486,02 atau 0,02%.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp297.025.506.051,02 yang merupakan selisih antara realisasi surplus / defisit sebesar Rp85.895.323.565,00 dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp211.130.182.486,02.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Pandemi COVID 19 menyebabkan terjadinya refocusing beberapa kali dan pemberhentian pelaksanaan Kegiatan.
- b. Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan fisik ditemui banyak kendala, diantaranya adanya perubahan standar analisis pekerjaan, RAB dan Gambar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

yang penyelesaiannya belum tepat waktu dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang ada di Dinas PU.

- c. Dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa paket pekerjaan yang harus dilaksanakan lelang ulang, bahkan ada yang gagal lelang.
- d. Keterbatasan peralatan-peralatan berat, sementara kegiatan yang harus dilaksanakan jumlahnya cukup banyak.
- e. Penyampaian SPJ dana Bos yang tidak tepat waktu dari sekolah penerima dana BOS.
- f. Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang tidak tepat waktu dari desa penerima dana desa.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dalam hal ini yang dimaksud entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini yang dimaksud entitas pelaporan adalah pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya (SKPD, SKPKD, BLUD).

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah menggunakan 2 (dua) basis akuntansi, yaitu Basis Kas dan Basis AkruaL.

Basis kas dipergunakan untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Penggunaan basis kas dikarenakan anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Penyusunan LRA menggunakan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah, sedangkan selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran disebut sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, sehingga tidak menggunakan istilah laba.

Basis akruaL dipergunakan untuk menyusun laporan finansial yang terdiri dari Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). Basis akruaL untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akruaL untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Untuk mengungkapkan pos-pos yang disajikan pada laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, maka disusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arua Kas. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta lampirannya,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah,
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- h. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 36).



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Bagan Akun Standar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana sesuai dengan Peraturan tersebut maka Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dearah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LRA

5.1.1. Pendapatan – LRA

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran dan realisasi pendapatan dalam Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020

Pendapatan Daerah	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	469.765.165.000,00	591.004.284.313,00	439.931.567.174,60
b. Pendapatan Transfer	2.129.195.245.000,00	2.117.374.969.793,00	1.697.875.551.939,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	151.829.800.000,00	154.180.111.946,00	513.964.719.584,00
Jumlah Pendapatan Daerah	2.750.790.210.000,00	2.862.559.366.052,00	2.651.771.838.697,60

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp2.651.771.838.697,60 maka realisasi pendapatan daerah tahun 2021 sebesar Rp2.862.559.366.052,00 mengalami kenaikan sebesar Rp210.787.527.354,40 atau 7,95%. Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

a. Pendapatan Asli Daerah

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp591.004.284.313,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp439.931.567.174,60 dengan rincian PAD disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.2. Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan TA 2020

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Pendapatan Pajak Daerah	133.050.000.000,00	143.617.868.928,00	125.236.006.697,00
2) Pendapatan Retribusi Daerah	22.447.112.000,00	20.911.507.338,00	19.290.694.924,00
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	15.417.021.000,00	15.417.023.399,00	14.185.195.523,00
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	298.851.032.000,00	411.057.884.648,00	281.219.670.030,60
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	469.765.165.000,00	591.004.284.313,00	439.931.567.174,60

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020, maka realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 34,34%. Untuk Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar 14,68%, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 8,40%, Pendapatan Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Pengelolaan Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar 8,68% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar 46,17%. Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2021 dan 2020, tersaji sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Tarif pajak daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BP2D), realisasi TA 2021 sebesar Rp143.617.868.928,00 dan TA 2020 sebesar Rp125.236.006.697,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Table 5.3. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Pajak Hotel	650.000.000,00	541.374.947,00	422.893.771,00
b)	Pajak Restoran	5.500.000.000,00	6.405.637.928,00	4.665.435.647,00
c)	Pajak Hiburan	150.000.000,00	167.703.008,00	200.361.654,00
d)	Pajak Reklame	3.097.000.000,00	2.546.837.371,00	2.328.737.989,00
e)	Pajak Penerangan Jalan	48.000.000.000,00	51.194.073.608,00	49.109.153.663,00
f)	Pajak Parkir	250.000.000,00	236.367.650,00	134.945.940,00
g)	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	503.544.714,00	425.829.080,00
h)	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
i)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	1.556.573.470,00	407.706.014,00
j)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	47.500.000.000,00	44.630.443.538,00	41.652.241.293,00
k)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.500.000.000,00	35.832.212.694,00	25.885.601.646,00
Jumlah pendapatan pajak daerah		133.050.000.000,00	143.617.868.928,00	125.236.006.697,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2020, maka realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 14,68% atau Rp18.381.862.231,00.

2) Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012. Pendapatan retribusi daerah dikelola oleh masing-masing OPD penghasil, dengan realisasi selama TA 2021 sebesar Rp20.911.507.338,00 dan TA 2020 sebesar Rp19.290.694.924,00 Rincian pendapatan retribusi dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.4. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	174.220.000,00	222.647.000,00	191.929.000,00
b)	Retribusi Pelayanan Kebersihan /Persampahan	2.999.775.000,00	3.794.854.900,00	2.866.390.250,00
c)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	664.500.000,00	579.614.000,00	509.211.000,00
d)	Retribusi Pelayanan Pasar	3.249.439.234,00	3.168.575.571,00	3.304.429.699,00
e)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.129.200.000,00	1.076.850.000,00	1.148.570.003,00
f)	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.700.000,00	4.761.000,00	3.837.000,00
g)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	322.566.000,00	450.813.500,00	460.288.500,00
h)	Retribusi Pengolahan Limbah cair	25.800.000,00	28.400.000,00	33.000.000,00
i)	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	100.000.000,00	183.205.800,00	159.600.200,00
j)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.721.041.099,00	4.653.974.077,00	4.179.499.066,00
k)	Retribusi Tempat Pelelangan	110.000.000,00	144.545.880,00	175.385.980,00
l)	Retribusi Terminal	52.265.000,00	56.862.500,00	80.478.000,00
m)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	858.194.667,00	806.088.000,00	795.256.500,00
n)	Rumah Potong Hewan	40.005.000,00	40.237.500,00	
o)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	4.064.847.000,00	4.192.480.100,00	3.736.974.250,00
p)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	49.072.000,00	46.152.000,00	
q)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.856.237.000,00	1.449.723.510,00	1.631.209.476,00
r)	Retribusi Izin Trayek	26.250.000,00	11.722.000,00	14.636.000,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		22.447.112.000,00	20.911.507.338,00	19.290.694.924,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2020, maka realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,40% atau sebesar Rp1.620.812.414,00.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah merupakan PAD yang berasal dari kegiatan pembiayaan/investasi berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan bank. Pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.417.023.399,00 dan TA 2020 sebesar Rp14.185.195.523,00 dengan rincian sebagai mana tabel berikut ini.

Tabel 5.5. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bank Jateng	11.245.701.000,00	11.245.701.876,00	9.936.818.916,00
b)	PDAM	2.873.487.000,00	2.873.487.199,00	2.545.372.487,00
c)	BPR BKK Talang	543.218.000,00	543.218.594,00	886.131.412,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
d)	Bank TGR	754.615.000,00	754.615.730,00	813.401.669,00
e)	PRPP Jateng			3.471.039,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		15.417.021.000,00	15.417.023.399,00	14.185.195.523,00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2020, maka realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,68% atau Rp1.231.827.876,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2021 sebesar Rp411.057.884.648,00 dan TA 2020 sebesar Rp281.219.670.030,60 dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6. Lain-lain PAD yang sah

Lain – Lain PAD yang Sah :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	138.201.000,00	659.716.500,00	236.047.060,00
b)	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan		50.000.000,00	2.266.667.000,00
c)	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.965.081.713,00	3.605.240.387,00
d)	Pendapatan Bunga	12.000.000.000,00	10.728.356.029,00	8.471.506.786,00
e)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	779.461.903,00	47.550.000,00
f)	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain		7.610.000,00	
g)	Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaks. Pekerjaan	-	530.033.888,00	89.858.155,00
h)	Pendapatan Denda Pajak		279.162.810,00	473.387.593,00
i)	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	672.985.000,00
j)	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		341.845.500,00	197.500.000,00
k)	Pendapatan dari pengembalian	-	260.796.990,00	1.753.759.074,00
l)	Pendapatan BLUD	285.197.831.000,00	395.387.011.315,00	261.403.478.956,60
m)	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya			1.237.258.631,00
n)	Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum			175.381.666,00
o)	Hasil Pengelolaam Dana Bergulir	15.000.000,00	760.000,00	2.508.250,00
p)	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda		68.048.000,00	29.300.000,00
q)	Penerimaan dari sumber mata air			557.241.472,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		298.851.032.000,00	411.057.884.648,00	281.219.670.030,60

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020, realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp129.838.214.617,40 atau 46,17% adapun rincian dari Pendapatan Lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- a) Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp659.716.500,00 dan TA 2020 sebesar Rp236.047.060,00 dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar Rp423.669.440,00 atau 179,49% dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Hasil Penjualan Peralatan/mesin	-	36.510.000,00	18.040.000,00
(2)	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	102.201.000,00	323.160.000,00	146.682.060,00
(3)	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	5.000.000,00	-
(4)	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		31.304.000,00	57.505.000,00
(5)	Hasil Penjualan Aset Lainnya	36.000.000,00	263.742.500,00	13.820.000,00
Jumlah		138.201.000,00	659.716.500,00	236.047.060,00

- b) Realisasi pendapatan Denda Pajak Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp279.162.810,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp473.387.593,00, dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sebesar Rp194.224.783,00 atau 41,03% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Table 5.8 Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Denda Pajak Hotel		698.563,00	1.099.926,00
(2)	Denda Pajak Restoran		11.169.444,00	3.576.129,00
(3)	Denda Pajak Hiburan		36.000,00	149.244,00
(4)	Denda Pajak Reklame		546.304,00	7.116.706,00
(5)	Denda Pajak Parkir		261.039,00	464.060,00
(6)	Denda Pajak Air Tanah		712.619,00	1.268.625,00
(7)	Denda Pajak Minerba		1.745.269,00	7.772.802,00
(8)	Denda Pajak PBB		263.917.572,00	451.940.101,00
(9)	Denda Pajak BPHTB		76.000,00	
Jumlah		0,00	279.162.810,00	473.387.593,00

- c) Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp395.387.011.315,00 dan Tahun Anggaran 2020 Rp261.403.478.956,60, dibandingkan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar Rp133.983.532.358,40 atau 51,26% dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Table 5.9 Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Puskesmas Danasari	1.478.000.000,00	1.338.563.904,00	1.184.676.994,00
2	Puskesmas Kesamiran	1.550.134.000,00	1.338.231.285,00	1.401.677.346,00
3	Puskesmas Margasari	4.690.920.291,00	3.463.046.350,00	3.447.956.127,00
4	Puskesmas Kesambi	2.149.309.000,00	1.949.242.500,00	1.881.504.169,00
5	Puskesmas Bumijawa	5.290.997.291,00	5.374.013.888,00	5.527.974.437,00
6	Puskesmas Bojong	3.036.778.000,00	2.876.328.661,00	2.969.706.434,00
7	Puskesmas Balapulang	4.500.000.292,00	3.603.654.344,00	3.909.156.816,00
8	Puskesmas Kalibakung	2.562.000.000,00	2.312.553.000,00	2.302.032.377,00
9	Puskesmas Pagerbarang	2.863.886.200,00	2.548.596.235,00	2.699.604.347,00
10	Puskesmas Lebaksiu	2.676.462.000,00	2.606.782.997,00	2.695.197.274,00
11	Puskesmas Kambangan	1.974.747.650,00	1.978.207.487,00	1.927.105.027,80
12	Puskesmas Jatinegara	4.030.100.542,00	3.921.142.762,00	3.971.607.457,00
13	Puskesmas Kedungbanteng	3.291.718.900,00	2.599.818.274,80	2.585.920.422,00
4	Puskesmas Pangkah	3.122.335.050,00	2.821.150.690,00	2.820.761.668,00
15	Puskesmas Penusupan	2.113.150.000,00	1.973.064.310,00	1.967.431.643,00
16	Puskesmas Slawi	2.907.800.000,00	2.283.292.390,00	2.497.369.470,00
17	Puskesmas Adiwerna	3.043.700.000,00	2.826.557.683,00	2.930.371.561,00
18	Puskesmas Pagiyanten	2.230.867.392,00	2.055.171.767,00	2.230.397.292,00
19	Puskesmas Talang	2.203.200.000,00	1.959.346.497,00	1.852.781.855,00
20	Puskesmas Kaladawa	1.988.773.700,00	1.730.003.841,00	1.746.921.805,00
21	Puskesmas Dukuhturi	2.362.450.000,00	2.361.385.433,00	2.410.910.518,00
22	Puskesmas Kupu	1.359.576.700,00	1.272.103.396,00	1.231.996.090,00
23	Puskesmas Dukuhwaru	3.431.236.342,00	2.992.382.492,20	3.119.083.772,00
24	Puskesmas Tarub	3.198.830.600,00	2.777.119.896,00	3.077.016.435,00
25	Puskesmas Kramat	1.925.600.350,00	1.849.309.384,00	1.732.816.262,80
26	Puskesmas Bangungalih	1.910.745.700,00	1.589.353.000,00	1.580.717.851,00
27	Puskesmas Suradadi	2.337.570.000,00	2.179.334.176,00	2.099.940.253,00
28	Puskesmas Jatibogor	2.501.700.500,00	2.183.806.122,00	2.279.917.538,00
29	Puskesmas Warurejo	4.125.520.500,00	3.628.737.990,00	3.670.197.999,00
30	RSUD Soeselo Slawi	153.064.720.000,00	254.926.187.641,00	161.461.660.975,00
31	RSUD Suradadi	51.275.000.000,00	68.068.522.919,00	26.189.066.741,00
	Jumlah	285.197.831.000,00	395.387.011.315,00	261.403.478.956,60



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Realisasi pendapatan transfer dalam TA 2021 sebesar Rp2.117.374.969.793,00 dan TA 2020 sebesar Rp1.697.875.551.939,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.550.193.467.000,00	1.533.598.637.942,00	1.477.714.812.445,00
2)	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	378.196.584.000,00	378.196.584.000,00	64.411.379.000,00
3)	Transfer Pemerintah - Provinsi	200.805.194.000,00	205.579.747.851,00	155.749.360.494,00
Jumlah Pendapatan Transfer		2.129.195.245.000,00	2.117.374.969.793,00	1.697.875.551.939,00

1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Meliputi Dana Transfer Umum-DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Realisasi transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp1.533.598.637.942,00 dan TA 2020 sebesar Rp1.477.714.812.445,00 dengan rincian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.11. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-pajak	27.989.556.000,00	39.659.535.809,00	24.616.468.943,00
b)	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-SDA	2.121.415.000,00	3.230.678.944,00	11.670.963.825,00
c)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.077.039.778.000,00	1.077.039.778.000,00	1.086.704.382.000,00
d)	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	155.693.681.000,00	125.814.842.815,00	64.753.862.628,00
e)	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	287.349.037.000,00	287.853.802.374,00	289.969.135.049,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.550.193.467.000,00	1.533.598.637.942,00	1.477.714.812.445,00

Dasar Hukum Pendapatan Transfer pemerintah Pusat Dana Perimbangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, Keputusan Menteri Keuangan No.2/KM.7/2021, Keputusan Menteri Keuangan No. 3/KM.7/2021, Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KM.7/2021, Keputusan Menteri Keuangan No.35/KM.7/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2021.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Transfer pemerintah Pusat- Dana Perimbangan Tahun 2020, realisasi Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

mengalami kenaikan sebesar 3,78% atau Rp55.883.825.497,00,00. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

(1) Dana Transfer Umum-DBH Pajak

Realisasi Dana Transfer Umum-DBH Pajak TA 2021 sebesar Rp39.659.535.809,00 dan TA 2020 sebesar Rp24.616.468.943,00 sebagai berikut:

Tabel 5.12. Dana Transfer Umum DBH Pajak

Dana Transfer Umum		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.963.251.000,00	12.164.355.365,00	5.349.406.724,00
2	DBH PPh Pasal 21	13.741.900.000,00	17.503.115.322,00	16.980.071.042,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		1.638.109.420,00	2.286.991.177,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.284.405.000,00	8.353.955.702,00	
Jumlah Dana Transfer Umum		27.989.556.000,00	39.659.535.809,00	24.616.468.943,00

(2) Dana Transfer Umum -DBH SDA

Realisasi Dana Transfer Umum DDH SDA TA 2021 sebesar Rp3.230.678.944,00 dan TA 2020 sebesar Rp11.670.963.825,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.13. Dana Transfer Umum DBH SDA

Dana Transfer Umum DBH SDA		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	12.048.900,00	56.090.685,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	70.404.000,00	60.022.500,00	711.359.243,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	58.244.000,00	99.161.924,00	40.810.700,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.261.000,00	14.008.075,00	511.153,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	859.187.000,00	1.386.329.402,00	695.176.769,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.659.108.143,00	788.276.289,00
7	Penerimaan Cukai Hasil Tembakau			6.904.547.417,00
8	Sumber Daya Migas			2.474.191.569,00
Jumlah Dana Transfer Umum DBH SDA		2.121.415.000,00	3.230.678.944,00	11.670.963.825,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi DAU TA 2021 sebesar Rp1.077.039.778.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp1.077.039.778.000,00 atau 100% dan TA 2020 sebesar Rp1.086.704.382.000,00

(4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi DAK Fisik TA 2021 sebesar Rp125.814.842.815,00 dan TA 2020 sebesar Rp64.753.862.628,00 sebagai berikut:

Tabel 5.14 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler	50.173.687.000,00	39.302.736.763,00	39.854.736.948,00
2	DAK Bidang Kesehatan (DAK FISIK)			17.603.875.580,00
3	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-	21.046.223.325,00	18.515.584.840,00	4.372.615.200,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-	57.388.986.675,00	45.740.423.119,00	
5	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-	2.773.056.000,00	1.941.139.200,00	
6	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan	3.050.297.000,00	2.191.772.000,00	1.897.533.900,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan	1.359.953.000,00	1.358.953.000,00	243.500.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.059.550.000,00	874.483.488,00	777.002.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	6.760.647.000,00	6.419.137.000,00	
10	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.686.202.000,00	4.166.069.405,00	
11	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.869.599.000,00	4.237.272.000,00	
12	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.525.480.000,00	1.067.272.000,00	
13	DAK Reguler Bidang Sosial			4.599.000,00
Jumlah DAK Fisik		155.693.681.000,00	125.814.842.815,00	64.753.862.628,00

(5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi DAK Non Fisik TA 2021 sebesar Rp287.853.802.374,00 dan TA 2020 sebesar Rp289.969.135.049,00 sebagai berikut:

Tabel 5.15 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	220.602.142.000,00	220.602.142.000,00	204.378.944.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	663.000.000,00	663.000.000,00	301.977.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.070.008.000,00	2.359.960.900,00	
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	21.528.647.000,00	21.528.600.000,00	21.669.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	6.963.400.000,00	6.963.400.000,00	5.700.500.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.990.888.000,00	26.567.289.726,00	48.109.684.171,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	522.053.000,00	-	-
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.635.488.000,00	-	-
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.506.903.000,00	5.506.902.924,00	4.582.734.018,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.087.266.000,00	883.265.000,00	376.069.200,00
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.779.242.000,00	2.779.241.824,00	4.593.756.660,00
12	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan			255.870.000,00
Jumlah DAK Non Fisik		287.349.037.000,00	287.853.802.374,00	289.969.135.049,00

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya meliputi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 sebesar Rp378.196.584.000,00 dan TA 2020 sebesar Rp64.411.379.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Dana Insentif Daerah (DID)	18.742.708.000,00	18.742.708.000,00	64.411.379.000,00
2)	Dana Desa	359.453.876.000,00	359.453.876.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		378.196.584.000,00	378.196.584.000,00	64.411.379.000,00

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Realisasi Transfer antar Daerah TA 2021 sebesar Rp205.579.747.851,00 dan TA 2020 sebesar Rp155.749.360.494,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.17. Transfer T Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Pendapatan Bagi Hasil	181.202.194.000,00	186.620.461.851,00	151.186.151.494,00
2)	Bantuan Keuangan	19.603.000.000,00	18.959.286.000,00	4.563.209.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		200.805.194.000,00	205.579.747.851,00	155.749.360.494,00

Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 maka realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp49.830.387.357,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

atau 31,99%. Rincian pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebagai berikut;

a) Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2021 sebesar Rp186.620.461.851,00 dan TA 2020 sebesar Rp151.186.151.494,00 sesuai dengan Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.18. Pendapatan Bagi Hasil

Bagi Hasil Pajak :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Pajak Kendaraan Bermotor	36.529.409.000,00	39.216.987.372,00	28.356.323.471,00
(2)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31.685.186.000,00	29.890.064.138,00	19.871.660.877,00
(3)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	52.715.808.000,00	53.088.503.060,00	36.232.667.786,00
(4)	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	173.922.000,00	181.405.294,00	156.366.718,00
(5)	Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi	60.097.869.000,00	64.243.501.987,00	66.569.132.642,00
Jumlah		181.202.194.000,00	186.620.461.851,00	151.186.151.494,00

b) Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp18.959.286.000,00 dan TA 2020 sebesar Rp4.563.209.000,00 sesuai dengan Rekomendasi Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten kota dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.19. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	TMMD	603.000.000,00	603.000.000,00	612.000.000,00
b)	Bantuan Sarana Prasarana	19.000.000.000,00	18.356.286.000,00	3.951.209.000,00
JUMLAH		19.603.000.000,00	18.959.286.000,00	4.563.209.000,00

c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Realisasi lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp154.180.111.946,00 dan Tahun anggaran dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.20. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Pendapatan Hibah	6.500.000.000,00	5.539.153.846,00	155.652.766.584,00
2)	Pendapatan Lainnya	145.329.800.000,00	148.640.958.100,00	358.311.953.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah		151.829.800.000,00	154.180.111.946,00	513.964.719.584,00

Dibandingkan realisasi tahun 2020 maka realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp359.784.607.638,00 atau 70%. Pendapatan Hibah sebesar Rp5.539.153.846,00 merupakan pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk PDAM berupa Hibah Air Minum Perkotaan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan pendapatan Lainnya sebesar Rp148.640.958.100,00 merupakan pendapatan dari pemerintah Pusat berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

5.1.2. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT) . Dalam TA 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal terdapat sebanyak 48 OPD yang merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2021 adalah sebesar Rp2.467.200.647.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.285.151.931.627,00 serta realisasi TA 2020 sebesar Rp2.010.868.784.570,52 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.21. Belanja Daerah

Belanja Daerah :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
a.	Belanja Operasi	2.027.307.962.130,00	1.905.870.135.761,00	1.683.573.672.389,52
b.	Belanja Modal	423.892.684.870,00	368.877.462.091,00	248.977.818.850,00
c.	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000,00	10.404.333.775,00	78.317.293.331,00
Jumlah		2.467.200.647.000,00	2.285.151.931.627,00	2.010.868.784.570,52

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi Kabupaten Tegal meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Anggaran pada TA 2021 adalah sebesar Rp2.027.307.962.130,00 dan realisasi sebesar Rp1.905.870.135.761,00 serta realisasi TA 2020 sebesar Rp1.683.573.672.389,52 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.22. Belanja Operasi

Belanja Operasi	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Belanja Pegawai	1.119.870.986.289,00	1.072.594.469.688,00	1.068.550.795.583,00
2) Belanja Barang dan Jasa	833.631.449.841,00	763.648.877.353,00	571.116.366.806,52
3) Belanja Hibah	70.427.526.000,00	66.338.288.720,00	38.230.180.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	3.378.000.000,00	3.288.500.000,00	5.676.330.000,00
Jumlah	2.027.307.962.130,00	1.905.870.135.761,00	1.683.573.672.389,52

1) Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp1.119.870.986.289,00 dengan realisasi sebesar Rp1.072.594.469.688,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.068.550.795.583,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.23. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	TA 2021		TA 2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
a) Gaji dan Tunjangan	660.176.739.725,00	639.909.234.081,00	629.514.208.346,00
b) Tambahan Penghasilan	92.010.000.000,00	89.188.541.876,00	85.846.520.615,00
c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	252.511.785.161,00	232.179.484.783,00	259.034.717.742,00
d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.117.516.000,00	31.344.365.834,00	24.919.440.204,00
e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	291.408.129,00	267.816.249,00	147.715.308,00
f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.053.120.000,00	1.043.120.000,00	1.003.120.000,00
g) Belanja Pegawai BOS	42.225.254.680,00	40.263.227.750,00	37.953.847.500,00
h) Belanja Pegawai BLUD	39.485.162.594,00	38.398.679.115,00	28.527.138.868,00
i) Uang Lembur			1.604.087.000,00
Jumlah	1.119.870.986.289,00	1.072.594.469.688,00	1.068.550.795.583,00

a) Belanja Gaji dan tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2021 sebesar Rp639.909.234.081,00 dan TA 2020 sebesar Rp629.514.208.346,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Table 5.24. Belanja Gaji dan tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Gaji Pokok	481.783.736.876,00	475.150.970.180,00	485.047.819.475,00
(2)	Tunjangan Keluarga	46.567.560.008,00	44.024.653.545,00	45.363.184.885,00
(3)	Tunjangan Jabatan	7.747.289.000,00	7.113.582.900,00	7.186.277.000,00
(4)	Tunjangan Fungsional	33.929.245.000,00	32.061.913.000,00	33.028.442.000,00
(5)	Tunjangan Fungsional Umum	7.884.349.000,00	6.790.537.000,00	7.287.758.000,00
(6)	Tunjangan Beras	27.057.547.640,00	25.706.197.795,00	22.174.510.893,00
(7)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.127.558.961,00	5.732.193.626,00	2.624.679.645,00
(8)	Pembulatan Gaji	14.524.010,00	6.398.204,00	6.130.851,00
(9)	Iuran Jaminan kesehatan	42.470.861.212,00	39.436.143.226,00	22.817.830.924,00
(10)	Iuran Jaminan kecelakaan kerja	1.231.039.770,00	972.488.385,00	994.393.668,00
(11)	Iuran Jaminan Kematian	3.363.028.248,00	2.914.156.220,00	2.983.181.005,00
Jumlah		660.176.739.725,00	639.909.234.081,00	629.514.208.346,00

b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan TA 2021 sebesar Rp89.188.541.876,00 dan TA 2020 sebesar Rp85.846.520.615,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Table 5.25. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	91.700.000.000,00	88.987.141.876,00	85.642.720.615,00
(2)	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	260.000.000,00	170.500.000,00	171.400.000,00
(3)	Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	50.000.000,00	30.900.000,00	32.400.000,00
Jumlah		92.010.000.000,00	89.188.541.876,00	85.846.520.615,00

c) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Realisasi Belanja tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya TA 2021 adalah sebesar Rp232.179.484.783,00 dan TA 2020 sebesar Rp259.034.717.742,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Table 5.26. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.670.000.000,00	4.297.122.003,00	4.499.289.869,00
(2)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	929.652.871,00	557.206.676,00	570.341.741,00
(3)	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)	231.498.911.000,00	215.987.051.520,00	197.106.059.000,00
(4)	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG)	3.120.839.000,00	2.326.474.000,00	
(5)	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru	935.999.000,00	905.500.000,00	510.000.000,00
(6)	Belanja Honorarium	8.136.683.290,00	6.891.190.584,00	56.349.027.132,00
(7)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.219.700.000,00	1.214.940.000,00	
	Jumlah	252.511.785.161,00	232.179.484.783,00	259.034.717.742,00

d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2021 sebesar Rp31.344.365.834,00 dan TA 2020 sebesar Rp24.919.440.204,00 dengan rincian disajikan pada table berikut:

Table 5.27. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Uang Representasi	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	955.080.000,00
(2)	Tunjangan keluarga	155.996.000,00	114.714.600,00	96.175.800,00
(3)	Tunjangan Beras	192.000.000,00	133.397.640,00	130.790.520,00
(4)	Uang Paket	95.508.000,00	95.508.000,00	95.508.000,00
(5)	Tunjangan Jabatan	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	1.384.866.000,00
(6)	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	357.726.000,00	147.621.600,00	14.433.300,00
(7)	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00
(8)	Tunjangan Reses	2.205.000.000,00	2.175.600.000,00	1.455.300.000,00
(9)	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota	66.781.000,00	550.442,00	495.396,00
(10)	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota	9.317.018.000,00	9.193.822.272,00	6.446.791.188,00
(11)	Tunjangan Transportasi	8.000.000.000,00	7.933.214.280,00	5.520.000.000,00
(12)	Uang Jasa Pengabdian	177.550.000,00		
	Jumlah	32.117.516.000,00	31.344.365.834,00	24.919.440.204,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH

Realisasi belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH TA 2021 adalah sebesar Rp267.816.249,00 dan TA 2020 sebesar Rp147.715.308,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Table 5.28. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH		TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	Gaji pokok	59.678.000,00	54.600.000,00	46.800.000,00
(2)	Tunjangan Keluarga	5.710.000,00	4.704.000,00	4.032.000,00
(3)	Tunjangan Jabatan	105.300.000,00	98.280.000,00	84.240.000,00
(4)	Tunjangan Beras	8.590.000,00	7.097.160,00	6.083.280,00
(5)	Tunjangan pph/ Tunjangan Khusus	2.726.000,00	1.374.752,00	761.068,00
(6)	Pembulatan Gaji	3.000,00	120,00	560,00
(7)	Iuran Jaminan Kesehatan	6.862.000,00	5.402.880,00	5.349.120,00
(8)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.121.000,00	112.320,00	112.320,00
(9)	Iuran Jaminan Kematian	1.363.000,00	336.960,00	336.960,00
(10)	Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Rertibusi Daerah	100.055.129,00	95.908.057,00	
Jumlah		291.408.129,00	267.816.249,00	147.715.308,00

f) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2021 sebesar Rp1.043.120.000,00 dan TA 2020 sebesar Rp1.033.120.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Table 5.29. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	393.120.000,00
(2)	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	660.000.000,00	650.000.000,00	610.000.000,00
Jumlah		1.053.120.000,00	1.043.120.000,00	1.003.120.000,00

g) Belanja Pegawai BOS

Realisasi belanja Pegawai BOS TA 2021 sebesar Rp40.263.227.750,00 dan TA 2020 adalah sebesar Rp37.953.847.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

h) Belanja Pegawai BLUD

Realisasi belanja Belanja Pegawai BLUD TA 2021 sebesar Rp38.398.679.115,00 dan TA 2020 sebesar Rp28.527.138.868,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.30. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD	TA 2021		TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	Rp
(1) Puskesmas Danasari	308.498.900,00	305.500.173,00	310.045.324,00
(2) Puskesmas Kesamiran	246.846.000,00	240.901.780,00	235.221.827,00
(3) Puskesmas Margasari	600.000.000,00	533.659.550,00	594.513.551,00
(4) Puskesmas Kesambi	446.060.000,00	435.679.179,00	335.891.059,00
(5) Puskesmas Bumijawa	733.740.000,00	731.437.290,00	728.766.139,00
(6) Puskesmas Bojong	541.565.000,00	534.807.616,00	495.792.043,00
(7) Puskesmas Balapulang	1.271.247.200,00	1.230.496.868,00	1.097.770.732,00
(8) Puskesmas Kalibakung	279.900.000,00	253.796.823,00	314.834.369,00
(9) Puskesmas Pagerbarang	272.312.200,00	268.108.907,00	252.775.000,00
(10) Puskesmas Lebaksiu	546.650.000,00	546.611.782,00	499.232.680,00
(11) Puskesmas Kambangan	258.680.000,00	256.716.127,00	304.348.500,00
(12) Puskesmas Jatinegara	536.240.000,00	508.058.560,00	472.417.040,00
(13) Puskesmas Kedungbanteng	425.302.000,00	411.371.102,00	442.746.826,00
(14) Puskesmas Pangkah	406.637.768,00	381.145.978,00	426.749.640,00
(15) Puskesmas Penusupan	359.076.719,00	333.752.374,00	377.511.000,00
(16) Puskesmas Slawi	390.126.000,00	309.591.293,00	340.542.960,00
(17) Puskesmas Adiwerna	322.816.700,00	313.869.985,00	324.572.520,00
(18) Puskesmas Pagiyanten	286.470.000,00	250.504.123,00	283.055.848,00
(19) Puskesmas Talang	343.222.320,00	334.685.273,00	376.868.944,00
(20) Puskesmas Kaladawa	392.195.000,00	386.339.678,00	325.271.578,00
(21) Puskesmas Dukuhturi	405.290.000,00	404.490.000,00	432.155.500,00
(22) Puskesmas Kupu	212.769.000,00	206.019.265,00	216.150.448,00
(23) Puskesmas Dukuhwaru	471.120.000,00	348.285.254,00	327.046.964,00
(24) Puskesmas Tarub	731.945.000,00	696.613.752,00	712.933.570,00
(25) Puskesmas Kramat	343.886.000,00	333.006.008,00	359.678.172,00
(26) Puskesmas Bangungalih	428.040.000,00	400.592.650,00	198.961.640,00
(27) Puskesmas Suradadi	394.580.000,00	378.677.933,00	274.401.006,00
(28) Puskesmas Jatibogor	458.826.700,00	458.406.640,00	413.019.340,00
(29) Puskesmas Warurejo	592.874.400,00	586.893.065,00	627.356.000,00
(30) RSUD dr Soeselo Slawi	21.269.345.687,00	21.075.600.087,00	11.039.706.180,00
(31) RSUD Suradadi	5.208.900.000,00	4.943.060.000,00	5.386.802.468,00
Jumlah	39.485.162.594,00	38.398.679.115,00	28.527.138.868,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

i) Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2021 tidak ada dan TA 2020 sebesar Rp1.604.087.000,00 berupa uang lembur PNS sebesar Rp1.214.184.500,00 dan uang lembur Non PNS sebesar Rp389.902.500,00.

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp763.648.877.353,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp833.631.449.841,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp571.116.366.806,52 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.31. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa	TA 2021		TA 2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
a) Belanja barang	112.968.014.734,00	97.687.884.113,00	79.501.703.594,00
b) Belanja Jasa	301.427.935.611,00	273.299.707.313,00	163.124.785.628,00
c) Belanja Pemeliharaan	35.311.391.055,00	33.760.916.957,00	28.773.865.406,00
d) Belanja Perjalanan Dinas	33.618.079.415,00	24.710.362.176,00	24.229.014.723,00
e) Belanja Uang dan atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat	6.549.750.000,00	4.399.016.700,00	6.636.886.003,00
f) Belanja Barang dan Jasa BOS	78.773.830.120,00	93.194.396.465,00	86.244.663.144,00
g) Belanja Barang dan Jasa BLUD	264.982.448.906,00	236.596.593.629,00	182.605.448.308,52
Jumlah	833.631.449.841,00	763.648.877.353,00	571.116.366.806,52

a) Belanja Barang

Realisasi belanja barang TA 2021 sebesar Rp97.687.884.113,00 dan TA 2020 sebesar Rp79.501.703.594,00 dengan rician pada lampiran 5.1

b) Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa TA 2021 sebesar Rp273.299.707.313,00 dan TA 2020 sebesar Rp163.124.785.628,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.32. Belanja Jasa

Belanja Jasa	TA 2021		TA 2020	
	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
	Rp	Rp	Rp	
1	Belanja Jasa kantor	232.047.191.361,00	207.532.455.107,00	149.018.228.081,00
2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	39.648.721.000,00	38.935.111.196,00	1.421.485.728,00
3	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	
4	Belanja Sewa Peralatan Mesin	3.855.400.950,00	2.747.001.280,00	1.851.367.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.347.992.550,00	1.099.689.250,00	384.042.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	45.500.000,00	23.674.000,00	
7	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	6.428.280.000,00	6.333.193.500,00	-
8	Belanja Jasa Konsultasi non Konstruksi	2.779.121.950,00	2.720.796.360,00	-
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	57.786.000,00	56.941.000,00	-
10	Belanja Kursus/Pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan	15.215.941.800,00	13.848.845.620,00	3.205.573.869,00
11	Jasa Konsultasi			7.244.088.950,00
Jumlah		301.427.935.611,00	273.299.707.313,00	163.124.785.628,00

c) Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan TA 2021 sebesar Rp33.760.916.957,00 dan TA 2020 sebesar Rp28.773.865.406,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.33. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Pemeliharaan Tanah	35.000.000,00	34.945.516,00	157.800.000,00
(2) Pemeliharaan Peralatan dan mesin	8.047.640.730,00	6.993.443.082,00	3.408.976.193,00
(3) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.762.260.745,00	7.553.330.409,00	9.209.217.360,00
(4) Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.432.589.600,00	19.160.072.950,00	15.888.347.580,00
(5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	33.899.980,00	19.125.000,00	109.524.273,00
Jumlah	35.311.391.055,00	33.760.916.957,00	28.773.865.406,00

d) Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja perjalanan dinas TA 2021 sebesar Rp24.710.362.176,00 dan TA 2020 sebesar Rp24.229.014.723,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.34 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.518.079.415,00	24.710.362.176,00	24.229.014.723,00
(2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000,00		
Jumlah	33.618.079.415,00	24.710.362.176,00	24.229.014.723,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat

Realisasi belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA 2021 sebesar Rp4.399.016.700,00 dan Realisasi TA 2020 sebesar Rp6.636.886.003,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihaklain/masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.137.550.000,00	3.987.052.500,00	1.630.600.000,00
(2)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	412.200.000,00	411.964.200,00	5.006.286.003,00
Jumlah		6.549.750.000,00	4.399.016.700,00	6.636.886.003,00

f) Belanja Barang dan jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp93.194.396.465,00 dari jumlah Anggaran sebesar Rp78.773.830.120,00 sehingga terdapat pelampauan anggaran sebesar Rp14.420.566.345,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp86.244.663.144,00.

g) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp236.596.593.629,00 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp182.605.448.308,52 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.36 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD		TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
(1)	Puskesmas Danasari	1.205.600.000,00	995.796.636,00	858.834.488,00
(2)	Puskesmas Kesamiran	1.400.488.900,00	1.193.542.102,00	1.204.705.148,00
(3)	Puskesmas Margasari	3.850.622.791,00	2.823.742.513,00	3.030.743.011,00
(4)	Puskesmas Kesambi	1.731.920.800,00	1.547.741.693,00	1.422.045.277,00
(5)	Puskesmas Bumijawa	4.669.117.891,00	4.538.043.918,00	4.113.781.933,00
(6)	Puskesmas Bojong	2.346.569.400,00	2.198.081.336,00	2.234.207.135,00
(7)	Puskesmas Balapulang	3.408.881.492,00	2.451.843.482,00	2.887.128.809,00
(8)	Puskesmas Kalibakung	2.298.245.400,00	2.034.763.360,00	1.775.891.602,00
(9)	Puskesmas Pagerbarang	2.505.693.200,00	2.087.422.975,00	2.031.137.048,00
(10)	Puskesmas Lebaksiu	2.652.641.100,00	2.447.755.524,00	1.615.626.899,00
(11)	Puskesmas Kambangan	2.117.555.650,00	1.891.771.397,00	1.275.597.725,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Barang dan Jasa BLUD		TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
(12)	Puskesmas Jatinegara	3.361.448.942,00	2.993.210.897,00	3.462.683.663,00
(13)	Puskesmas Kedungbanteng	2.828.992.900,00	2.144.502.594,00	2.034.934.121,00
(14)	Puskesmas Pangkah	2.646.778.782,00	2.384.760.925,00	2.352.769.339,00
(15)	Puskesmas Penusupan	1.683.236.581,00	1.525.314.142,00	1.666.393.970,00
(16)	Puskesmas Slawi	2.238.852.200,00	1.779.394.138,00	2.170.398.931,00
(17)	Puskesmas Adiwerna	2.413.488.800,00	2.228.010.923,00	2.410.562.927,00
(18)	Puskesmas Pagiyanten	1.947.859.492,00	1.748.244.274,00	1.977.579.144,00
(19)	Puskesmas Talang	1.737.553.880,00	1.487.741.997,00	1.487.503.717,00
(20)	Puskesmas Kaladawa	1.595.408.800,00	1.478.628.482,00	1.325.700.601,00
(21)	Puskesmas Dukuhturi	1.994.278.700,00	1.922.442.807,00	1.799.399.524,00
(22)	Puskesmas Kupu	1.161.696.500,00	1.075.258.710,00	951.626.866,00
(23)	Puskesmas Dukuhwaru	2.963.154.642,00	2.514.092.373,00	2.609.682.623,00
(24)	Puskesmas Tarub	2.489.070.600,00	2.115.973.049,00	2.574.791.218,00
(25)	Puskesmas Kramat	1.608.919.950,00	1.525.346.400,00	1.300.695.021,00
(26)	Puskesmas Bangungalih	1.602.297.900,00	1.394.970.747,00	1.067.873.134,00
(27)	Puskesmas Suradadi	1.925.701.200,00	1.723.732.873,00	1.654.364.113,00
(28)	Puskesmas Jatibogor	2.050.878.900,00	1.728.431.323,00	1.802.635.321,00
(29)	Puskesmas Warurejo	3.653.201.200,00	2.872.820.622,00	2.923.000.043,00
(30)	RSUD dr Soeselo Slawi	152.858.199.313,00	138.680.677.218,00	107.294.649.401,00
(31)	RSUD Suradadi	44.034.093.000,00	39.062.534.199,00	17.288.505.556,52
Jumlah		264.982.448.906,00	236.596.593.629,00	182.605.448.308,52

3) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah TA 2021 sebesar Rp66.338.288.720,00 dan TA 2020 sebesar Rp38.230.180.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.37. Belanja Hibah

Belanja Hibah		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	17.923.976.000,00	17.708.729.200,00	614.850.000,00
b)	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	51.295.900.000,00	47.426.410.000,00	37.615.330.000,00
c)	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.207.650.000,00	1.203.149.520,00	
Jumlah		70.427.526.000,00	66.338.288.720,00	38.230.180.000,00

a) Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2021 adalah sebesar Rp17.708.729.200,00 yaitu Hibah kepada Kementerian Agama sebesar Rp15.905.609.200,00 dan Hibah kepada BPN sebesar Rp1.215.565.000,00 berupa Hibah Uang dan Hibah kepada Subdenpom IV Tegal sebesar Rp268.000.000,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

hibah kepada kantor keajaksanaan slawi sebesar 320.095.000,00 berupa Hibah Barang. Realisasi belanja Hibah Kepada Pemerintah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp614.850.000,00 yaitu Hibah Kepada LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) sebesar Rp300.000.000,00 dan hibah Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal sebesar Rp314.850.000,00.

- b) Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Realisasi hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.426.410.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.38. Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

NO	OPD	Penerima Hibah	Jumlah		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BOP pendidikan Kesetaraan Paket C	3.249.900.000,00		
		BOP pendidikan Kesetaraan Paket B	1.996.500.000,00		
		BOP pendidikan Kesetaraan Paket A	477.100.000,00		
		BOP PAUD	20.976.900.000,00		
2	Dinas sosial	IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat)	10.000.000,00		
3	Dinas Permades	PKK Kab Tegal	700.000.000,00		
4	Dinas Kominfo	LPPL Kab Tegal Radio SLAWI FM	350.000.000,00		
5	Dinas Porapar	KONI	1.000.000.000,00		
		NPC (National Paralympic Comittee)	150.000.000,00		
		KNPI	500.000.000,00		
		Pramuka Kwardcab Tegal	500.000.000,00		
		Asosiasi PSSI kab Tegal	150.000.000,00		
		MPC Pemuda Pancasila	100.000.000,00		
		6	Sekretariat Daerah	Dharma Wanita Persatuan	150.000.000,00
				KPAD kab Tegal	150.000.000,00
MI TARBIYATUL ATHFAL	100.000.000,00				
MTS Ciptasari	100.000.000,00				
TPQ AL KHOIRIYAH	65.000.000,00				
GOW (Gabungan Organisasi Wanita)	150.000.000,00				
Yayasan Masjid Agung Slawi	490.760.000,00				
PAC Muslimat NU	40.000.000,00				
Fatayat NU	100.000.000,00				
MI Al IKHSANIYAH	50.000.000,00				
	Lembaga program Pemerintah dan Kesejahteraan	15.870.250.000,00			
	Jumlah	47.426.410.000,00			

- c) Hibah kepada Partai Politik

Realisasi Hibah Pada Partai Politik TA 2021 sebesar Rp1.203.149.520,00 yaitu sebagai berikut:

- Hibah kepada Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp318.304.728,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Hibah kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar Rp279.753.264,00
- Hibah Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya sebesar Rp156.463.272,00
- Hibah Kepada Partai Golongan Karya sebesar Rp108.455.760,00
- Hibah Kepada Partai Keadilan Sejahtera sebesar Rp66.204.432,00
- Hibah Kepada Partai Amanat Nasional sebesar Rp57.779.568,00
- Hibah Kepada Partai Persatuan Pembangunan sebesar Rp64.960.056,00
- Hibah Kepada Partai Demokrat Sebesar Rp44.071.488,00
- Hibah Kepada Partai Nasdem sebesar Rp49286.664,00
- Hibah kepada partai Hati Nurani Rakyat sebesar Rp29.996.568,00.

4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial TA 2021 sebesar Rp3.288.500.000,00 dan TA 2020 sebesar Rp5.676.330.000,00 dengan rincian rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.39. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.748.000.000,00	1.658.500.000,00	
b)	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00	5.581.950.000,00
c)	Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan			94.380.000,00
Jumlah		3.378.000.000,00	3.288.500.000,00	5.676.330.000,00

Realisasi belanja bantuan sosial kepada Individu berupa belanja bantuan sosial jaminan hidup lansia sebesar Rp1.658.500.000,00.

Realisasi Belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp1.630.000.000,00 yaitu;

- Bansos kepada Forum Komunikasi Imam Rawatib (FKIR) sebesar Rp250.000.000,00
- Bansos kepada Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKTM) sebesar Rp150.000.000,00
- Bansos kepada Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Daerah(FKPAID) sebesar Rp330.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Bansos kepada Forum Komunikasi Hafidz Hafidzoh sebesar Rp600.000.000,00
- Bansos kepada Forum Komunikasi Khotib Mubaligh sebesar Rp300.000.000,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Tegal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp368.877.462.091,00 dan TA 2020 sebesar Rp248.977.818.850,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.40. Belanja Modal

Belanja Modal :		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Belanja Tanah	1.511.000.000,00	384.882.542,00	255.437.200,00
2)	Belanja Peralatan Mesin	109.164.469.120,00	94.646.809.885,00	66.491.340.472,00
3)	Belanja Gedung dan Bangunan	152.630.442.450,00	128.622.796.811,00	68.664.014.835,00
4)	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.075.944.100,00	143.805.033.653,00	100.236.614.296,00
5)	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.510.829.200,00	1.417.939.200,00	13.330.412.047,00
Jumlah Belanja Modal		423.892.684.870,00	368.877.462.091,00	248.977.818.850,00

1) Belanja Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 sebesar Rp384.882.542,00 TA 2020 sebesar Rp255.437.200,00 dengan Rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.41. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah		TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
a)	Tanah Persil	761.000.000,00	55.478.890,00	255.437.200,00
b)	Lapangan	750.000.000,00	329.403.652,00	-
Jumlah		1.511.000.000,00	384.882.542,00	255.437.200,00

- a) Realisasi BM Tanah Persil TA 2021 sebesar Rp55.478.890,00 dan TA 2020 Rp255.437.200,00 dengan rician disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.42. Belanja Modal Tanah Persil

	Tanah Persil	TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
a)	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	11.000.000,00	10.887.890,00	-
b)	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	750.000.000,00	44.591.000,00	230.385.200,00
c)	Tanah Persil lainnya			25.052.000,00
	Jumlah	761.000.000,00	55.478.890,00	255.437.200,00

b) Realisasi Belanja modal tanah lapangan TA 2021 sebesar Rp329.403.652,00 berupa belanja modal tanah untuk jalan.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp94.646.809.885,00 dan TA 2020 sebesar Rp66.491.340.472,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.43. Belanja Peralatan dan Mesin

	Belanja Peralatan dan Mesin	TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
a)	Alat Besar Darat	198.780.000,00	134.210.000,00	23.790.000,00
b)	Alat Angkutan	9.655.354.000,00	8.914.010.884,00	7.192.920.753,00
c)	Alat Bengkel dan Alat Ukur	472.468.000,00	465.357.395,70	150.710.000,00
d)	Alat Pertanian	46.292.500,00	42.332.600,00	12.963.200,00
e)	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	15.524.832.919,00	13.687.024.839,30	7.487.957.811,00
f)	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	7.714.570.881,00	4.980.689.085,00	723.857.749,00
g)	Alat Kedokteran dan Kesehatan	43.819.601.700,00	40.770.760.040,00	23.416.198.189,00
h)	Alat Laboratorium	6.009.607.000,00	3.465.989.266,00	19.210.700.278,00
i)	Komputer	24.281.032.120,00	20.771.208.058,00	8.091.123.992,00
j)	Alat Peraga	74.430.000,00	73.260.000,00	-
k)	Rambu- Rambu	1.367.500.000,00	1.341.967.717,00	-
l)	Alat Persenjataan	-	-	20.800.000,00
m)	Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	160.318.500,00
	Jumlah	109.164.469.120,00	94.646.809.885,00	66.491.340.472,00

a) Realisasi belanja modal Alat besar dasar berupa Alat Bantu TA 2021 sebesar Rp134.210.000,00 dan Realisasi TA 2020 sebesar Rp23.790.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.44. Belanja Modal Alat Bantu

BM - Alat Bantu		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Electric Generating set	87.040.000,00	86.520.000,00	
(2)	Pompa	4.000.000,00	-	23.790.000,00
(3)	Alat Bantu lainnya	107.740.000,00	47.690.000,00	-
Jumlah		198.780.000,00	134.210.000,00	23.790.000,00

b) Rincian belanja Alat angkutan TA 2021 sebesar Rp8.914.010.884,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp7.192.920.753,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.45. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

BM - Alat Angkutan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Angkutan Darat Bermotor	9.523.154.000,00	8.844.095.884,00	7.065.720.753,00
(2)	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	132.200.000,00	69.915.000,00	127.200.000,00
Jumlah		9.655.354.000,00	8.914.010.884,00	7.192.920.753,00

c) Realisasi Belanja Modal Alat bengkel dan Alat ukur TA 2021 sebesar Rp465.357.395,70 dan TA 2020 sebesar Rp150.710.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.46. Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel dan Alat Ukur

BM - Alat Angkutan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Bengkel Tak Bermesin	10.927.000,00	10.677.000,00	
(2)	Alat Ukur	461.541.000,00	454.680.395,70	150.710.000,00
Jumlah		472.468.000,00	465.357.395,70	150.710.000,00

d) Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian berupa Alat Pengolahan TA 2021 sebesar Rp42.332.600,00 dan TA 2020 sebesar Rp12.963.200,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.47. Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian berupa Alat Pengolahan

BM - Alat Pengolahan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Belanja Modal Alat Pasca Panen	39.292.500,00	35.332.600,00	-
(2)	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	12.963.200,00
Jumlah		46.292.500,00	42.332.600,00	12.963.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- e) Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga TA 2021 sebesar Rp13.687.024.839,30 dan TA 2020 sebesar Rp7.487.957.811,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.48. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

BM - Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Kantor	5.414.186.200,00	4.706.402.272,30	2.692.023.710,00
(2)	Alat Rumah Tangga	9.910.936.719,00	8.795.824.067,00	4.689.518.591,00
(3)	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	199.710.000,00	184.798.500,00	106.415.510,00
Jumlah		15.524.832.919,00	13.687.024.839,30	7.487.957.811,00

- f) Realisasi belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar TA 2021 sebesar Rp4.980.689.085,00 dan TA 2020 sebesar Rp723.857.749,00 dengan rincian disajikan tabel berikut:

Tabel 5.49. Belanja Modal Pengadaan studio, komunikasi dan pemancar

BM - Alat studio, komunikasi dan pemancar		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Studio	7.477.653.881,00	4.746.904.335,00	564.655.609,00
(2)	Alat Komunikasi	236.917.000,00	233.784.750,00	159.202.140,00
Jumlah		7.714.570.881,00	4.980.689.085,00	723.857.749,00

- g) Realisasi belanja modal alat kedokteran dan alat Kesehatan TA 2021 sebesar Rp40.770.760.040,00 dan TA 2020 sebesar Rp23.416.198.189,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.50. Belanja Modal Pengadaan alat kedokteran dan alat kesehatan

BM - Alat kedokteran dan alat kesehatan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Alat Kedokteran	36.026.280.750,00	33.380.959.328,00	3.196.975.338,00
(2)	Alat Kesehatan Umum	7.793.320.950,00	7.389.800.712,00	20.219.222.851,00
Jumlah		43.819.601.700,00	40.770.760.040,00	23.416.198.189,00

- h) Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2021 sebesar Rp3.465.989.266,00 dan TA 2020 sebesar Rp19.210.700.278,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.51. Belanja Modal Alat Laboratorium

BM - Alat Laboratorium		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Unit Alat Laboratorium	4.435.150.000,00	2.852.798.026,00	2.110.832.650,00
(2)	Alat Peraga Praktek Sekolah	1.359.057.000,00	398.491.240,00	17.099.867.628,00
(3)	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15.400.000,00	15.400.000,00	
(4)	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5.500.000,00	5.500.000,00	
(5)	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	194.500.000,00	193.800.000,00	-
Jumlah		6.009.607.000,00	3.465.989.266,00	19.210.700.278,00

- i) Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2021 sebesar Rp20.771.208.058,00 dan TA 2020 sebesar Rp8.091.123.992,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.52. Belanja Modal Komputer

BM - Komputer		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Komputer unit	21.794.678.520,00	18.413.356.758,00	5.046.299.607,00
(2)	Peralatan Komputer	2.486.353.600,00	2.357.851.300,00	3.044.824.385,00
Jumlah		24.281.032.120,00	20.771.208.058,00	8.091.123.992,00

- j) Realisasi belanja modal alat peraga TA 2021 sebesar Rp73.260.000,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp74.430.000,00 berupa alat peraga percontohan lainnya.
- k) Realisasi belanja modal rambu-rambu TA 2021 sebesar Rp1.341.967.717,00 dan TA 2020 sebesar Rp1.367.500.000,00 berupa rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
- l) Realisasi Belanja Persenjataan Non Senjata api TA 2021 tidak ada dan TA 2020 sebesar Rp20.800.000,00.
- m) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan TA 2021 tidak ada dan TA 2020 sebesar Rp160.318.500,00 berupa Alat Bantu Keamanan.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp128.622.796.811,00 dan TA 2020 sebesar Rp68.664.014.835,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.53. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.453.932.950,00	101.304.143.780,00	65.369.039.121,00
b)	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	429.517.700,00
c)	Monumen	478.520.000,00	474.544.024,00	2.005.237.600,00
d)	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.423.989.500,00	1.404.094.500,00	209.651.000,00
e)	Gedung dan Bangunan BLUD	30.274.000.000,00	25.440.014.507,00	-
f)	Bangunan Rambu-Rambu	-	-	650.569.414,00
	Jumlah	152.630.442.450,00	128.622.796.811,00	68.664.014.835,00

a) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Tempat Kerja TA 2021 sebesar Rp101.304.143.780,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp65.369.039.121,00 dengan rincian disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 5.54 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

	BM - Bangunan Gedung Tempat Kerja	TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
(1)	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.831.354.300,00	4.331.693.350,00	3.996.816.441,00
(2)	Belanja Modal Bangunan Gudang	200.000.000,00	199.249.500,00	107.385.000,00
(3)	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	280.000.000,00	277.771.000,00	
(4)	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi			418.420.000,00
(5)	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.921.580.050,00	1.789.712.448,00	
(6)	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	47.452.674.000,00	35.198.396.325,00	23.982.350.233,00
(7)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	59.591.250,00	58.341.903,00	290.543.000,00
(8)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	88.590.000,00	88.590.000,00	49.750.000,00
(9)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	51.420.787.750,00	45.875.174.002,00	28.110.047.828,00
(10)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga			199.500.000,00
(11)	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.450.599.000,00	3.428.130.200,00	3.310.765.009,00
(12)	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga			3.044.000,00
(13)	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	600.000.000,00	596.013.000,00	301.195.000,00
(14)	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	3.309.628.200,00	3.035.281.247,00	
(15)	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	75.000.000,00	74.209.151,00	
(16)	Belanja Modal Bangunan Industri	195.000.000,00	194.116.000,00	
(17)	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	770.000.000,00	602.367.858,00	
(18)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	350.000.000,00	348.615.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BM - Bangunan Gedung Tempat Kerja		TA 2021		TA 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
		Rp	Rp	Rp
(19)	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.162.448.400	4.095.220.296	
(20)	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.017.725.000	907.922.500	
(21)	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus	-	-	857.721.060,00
(22)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	268.955.000,00	203.340.000,00	3.741.501.550,00
Jumlah		120.453.932.950,00	101.304.143.780,00	65.369.039.121,00

- b) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal TA 2021 tidak ada dan realisasi TA 2020 sebesar Rp429.517.700,00 berupa bangunan rumah negara Golongan I sebesar Rp175.270.000,00, rumah negara Golongan II sebesar Rp115.648.000,00 dan bangunan mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sebesar Rp138.599.700,00.
- c) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Monumen TA 2021 sebesar Rp474.544.024,00 berupa bangunan peninggalan dan TA 2020 sebesar Rp2.005.237.600,00 berupa bangunan peninggalan sebesar Rp249.712.000,00 dan tugu sebesar Rp1.755.525.600,00.
- d) Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2021 adalah sebesar Rp1.404.094.500,00 dan TA 2020 sebesar Rp209.651.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.55. Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

BM - Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	BM Tugu/Tanda batas Administrasi	1.129.609.500,00	1.111.517.500,00	209.651.000,00
(2)	BM Pagar	294.380.000,00	292.577.000,00	
Jumlah		1.423.989.500,00	1.404.094.500,00	209.651.000,00

- e) Realisasi belanja modal Gedung dan bangunan BLUD TA 2021 sebesar Rp25.440.014.507,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp30.274.000.000,00
- f) Realisasi Belanja Pengadaan Bangunan Rambu-rambu TA 2021 tidak ada dan realisasi TA 2020 sebesar Rp650.569.414,00 berupa rambu bersuar lalu lintas darat sebesar Rp647.201.414,00 dan rambu tidak bersuar sebesar Rp3.368.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp143.805.033.653,00 dan TA 2020 sebesar Rp100.236.614.296,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.56. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Jalan dan Jembatan	119.755.783.100,00	115.268.404.129,00	73.743.438.198,00
b)	Bangunan Air	9.371.597.000,00	8.449.938.695,00	13.407.345.706,00
c)	Instalasi	6.757.676.000,00	5.727.764.500,00	4.070.144.259,00
d)	Jaringan	17.990.888.000,00	14.159.820.329,00	9.015.686.133,00
e)	Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	200.000.000,00	199.106.000,00	-
Jumlah		154.075.944.100,00	143.805.033.653,00	100.236.614.296,00

a) Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2021 sebesar Rp115.268.404.129,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp73.743.438.198,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.57. Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan

BM - Pengadaan Jalan dan Jembatan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jalan	113.803.283.100,00	109.573.832.954,00	68.698.245.348,00
(2)	Jembatan	5.952.500.000,00	5.694.571.175,00	5.045.192.850,00
Jumlah		119.755.783.100,00	115.268.404.129,00	73.743.438.198,00

b) Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2021 sebesar Rp8.449.938.695,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp13.407.345.706,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.58. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

BM - Bangunan Air irigasi		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Bangunan Air irigasi	4.591.480.000,00	4.062.341.625,00	792.328.875,00
(2)	Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.393.297.000,00	1.060.770.000,00	0,00
(3)	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	432.640.000,00	425.580.250,00	901.119.250,00
(4)	Bangunan Air Bersih/Air baku	1.042.000.000,00	1.022.840.000,00	730.904.000,00
(5)	Bangunan Air kotor	1.912.180.000,00	1.878.406.820,00	10.982.993.581,00
Jumlah		9.371.597.000,00	8.449.938.695,00	13.407.345.706,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- c) Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2021 sebesar Rp5.727.764.500,00 dan TA 2020 sebesar Rp4.070.144.259,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.59. Belanja Modal Instalasi

BM - instalasi		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.392.850.000,00	1.191.957.500,00	
(2)	Instalasi Air kotor	2.250.000.000,00	1.472.880.500,00	685.554.000,00
(3)	Instalasi Pengolahan Sampah	98.000.000,00	93.222.000,00	
(4)	Instalasi Pembangkit Listrik	516.826.000,00	496.387.500,00	3.137.572.259,00
(5)	Instalasi gardu Listrik	2.500.000.000,00	2.473.317.000,00	244.018.000,00
(6)	Instalasi Jaringan Air Minum			3.000.000,00
Jumlah		6.757.676.000,00	5.727.764.500,00	4.070.144.259,00

- d) Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik TA 2021 sebesar Rp14.159.820.329,00 dan TA 2020 sebesar Rp9.015.686.133,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.60. Belanja Modal Jaringan Listrik

BM - Jaringan Listrik		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Jaringan Transmisi	17.062.500.000,00	13.239.167.329,00	9.015.686.133,00
(2)	Jaringan Listrik Lainnya	928.388.000,00	920.653.000,00	0,00
Jumlah		17.990.888.000,00	14.159.820.329,00	9.015.686.133,00

- e) Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD TA 2021 sebesar Rp199.106.000,00 dari jumlah anggaran Rp200.000.000,00.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp1.417.939.200,00 dan TA 2020 sebesar Rp13.330.412.047,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.61. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a)	Bahan Perpustakaan	5.928.949.200,00	838.214.200,00	13.139.026.297,00
b)	Tanaman	581.880.000,00	579.725.000,00	191.385.750,00
Jumlah		6.510.829.200,00	1.417.939.200,00	13.330.412.047,00

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diatas sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- a) Belanja Modal Pengadaan Bahan Perpustakaan TA 2021 sebesar Rp838.214.200,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp13.139.026.297,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 62. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

BM – Bahan perpustakaan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	Buku Umum	5.875.979.200,00	785.632.200,00	12.825.401.297,00
(2)	Buku Ilmu Sosial	52.970.000,00	52.582.000,00	-
(3)	Barang-Barang perpustakaan			313.625.000,00
Jumlah		5.928.949.200,00	838.214.200,00	13.139.026.297,00

- b) Realisasi Belanja Modal Tanaman TA 2021 sebesar Rp579.725.000,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp191.385.750,00

c. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Anggaran BTT Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp16.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.404.333.775,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.63. Belanja Tidak Terduga

NO	OPD	Uraian	Belanja BTT
1	Dinas Sosial	Pembayaran BTT Kegiatan Jaring Pengaman Sosial bagi Warga Terdampak Penerapan PPKM Darurat Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	628.583.000,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Biaya Perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2021	27.031.747,00
2	Dinas Perhubungan	Pembayaran BTT Kegiatan Pengamanan dan Pembatasan Mobilitas selama Penerapan PPKM Darurat Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	254.920.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembayaran BTT Kegiatan Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	454.322.476,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid 19 untuk Operasional Vaksinasi (Serbuan vaksin)	776.029.200,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Dermasuci Kec. Pangkah	202.859.950,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Sokatengah Kec. Bumijawa	393.137.450,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Wotgalih Kec. Jatinegara	652.983.350,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Batuagung Kec. Balapulang	650.755.450,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Kalibakung Kec. Balapulang	2.682.051.500,00
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pembayaran BTT Kegiatan Pasar Sehat dengan Protokol Kesehatan Kab. Tegal untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Tahun 2021	239.530.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	OPD	Uraian	Belanja BTT
5	Dinas Kesehatan	Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Covid 19 untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	1.741.102.300,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Kesehatan Lingkungan untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	81.836.860,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Pengadaan APD untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	826.408.500,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Pemasangan Daya Listrik Rumkit DKT IV Pagongan untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	54.091.900,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat di Kab. Tegal untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Tahun 2021	640.478.942,00
6	Dinas Perkimtaru	Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Bencana Tanah Longsor Dk Bulakwaru Desa Bumijawa Kec. Bumijawa	88.380.250,00
7	BAPPENDA	Pembayaran Biaya Pengembalian Pembayaran Pajak BPHTB yang telah disetor ke Kas Umum Daerah Kab. Tegal	9.830.400,00
JUMLAH			10.404.333.775,00

5.1.3. Transfer

Realisasi Transfer TA 2021 sebesar Rp491.512.110.860,00 dan TA 2020 sebesar Rp494.671.164.849,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.64 Transfer

Transfer :	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Transfer Bagi Hasil ke Desa	15.000.000.000,00	11.826.401.862,00	10.151.562.329,00
b. Transfer Bantuan Keuangan	479.685.660.000,00	479.685.708.998,00	484.519.602.520,00
Jumlah	494.685.660.000,00	491.512.110.860,00	494.671.164.849,00

a. Transfer Bagi Hasil ke Desa

Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa TA 2021 sebesar Rp11.826.401.862,00 dan realisasi TA 2020 sebesar Rp10.151.562.329,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.65 Transfer Bagi Hasil ke Desa

Transfer Bagi Hasil ke Desa	TA 2021		TA 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	15.000.000.000,00	11.826.401.862,00	8.606.399.629,00
2) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya			.545.162.700,00
Jumlah	15.000.000.000,00	11.826.401.862,00	10.151.562.329,00

b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar Rp479.685.708.998,00 dan TA 2020 sebesar Rp484.519.602.520,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.66 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan	TA 2021		TA 2020
	Anggaran	Realisasi	Realisasi
	Rp	Rp	Rp
a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	479.685.660.000,00	479.685.660.000,00	483.311.953.000,00
Belanja Alokasi Dana Desa	113.076.784.000,00	113.076.784.000,00	125.000.000.000,00
Belanja Dana Desa	359.453.876.000,00	359.453.876.000,00	358.311.953.000,00
Transfer Bantuan Keuangan khusus Kepada desa	7.155.000.000,00	7.155.000.000,00	
b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			1.207.649.520,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PKB			318.304.728,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PDIP			279.753.264,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik GERINDRA			156.463.272,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik GOLKAR			108.455.760,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PPP			64.960.056,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PAN			57.779.568,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PKS			66.204.432,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik DEMOKRAT			48.571.488,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik NASDEM			49.286.664,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik HANURA			29.996.568,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PERINDO			27.873.720,00
Jumlah	479.685.660.000,00	479.685.708.998,00	484.519.602.520,00

Pada tahun Anggaran 2021 penyusunan LKPD berdasarkan Bagan akun standar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Pada Tahun Anggaran 2021 Bantuan Keuangan Pada Partai Politik diklasifikasikan pada Belanja Hibah dan Pada Tahun Anggaran 2020 diklasifikasikan pada Transfer Bantuan Keuangan.

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan anggaran Pembiayaan Neto TA 2021 sebesar Rp211.096.097.000,00 realisasi sebesar Rp211.130.182.486,02 dan TA 2020 sebesar Rp71.864.208.527,94 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.67 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Penerimaan Pembiayaan	218.096.097.000,00	218.130.182.486,02	89.103.109.003,94
b.	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	17.238.900.476,00
Pembiayaan Neto		211.096.097.000,00	211.130.182.486,02	71.864.208.527,94

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2021 sebesar Rp218.130.182.486,02 dan TA 2020 sebesar Rp89.103.109.003,94 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.68. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan:		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Penggunaan SILPA	218.096.097.000,00	218.096.097.806,02	88.993.266.248,94
2)	Penerimaan Kembali Piutang	-	34.084.680,00	109.842.755,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		218.096.097.000,00	218.130.182.486,02	89.103.109.003,94

Realisasi Penerimaan Kembali Piutang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.084.680,00 merupakan realisasi atas pelunasan dana Bergulir.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp7.000.000.000,00 dan TA 2020 sebesar Rp17.238.900.476,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.69. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan:		TA 2021		TA 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	15.849.000.000,00
2)	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			1.389.900.476,00
3)	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	17.238.900.476,00

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2021 sebesar Rp.4.500.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal pada PERUMDA Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 900/1048 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Penyetoran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Pemberian Pinjaman Daerah TA 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perusda BPR Bank Tegal Gotong Royong berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perseroda BPR Bank TGR. Pemberian Pinjaman tersebut disalurkan kepada pelaku usaha mikro di kabupaten Tegal dengan memberikan pinjaman yang berbunga rendah dalam rangka bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional dampak dari pandemi Covid 19.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sebesar Rp297.025.506.051,02 dan TA 2020 sebesar Rp218.096.097.806,02 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.70. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) :	2021	2020
	Realisasi	Realisasi
1) Pendapatan dan Belanja :		
a) Realisasi Pendapatan	2.862.559.366.052,00	2.651.771.838.697,60
b) Realisasi Belanja	2.285.151.931.627,00	2.010.868.784.570,52
c) Transfer	491.512.110.860,00	494.671.164.849,00
Surplus (Defisit) Anggaran : a) – b) – c)	85.895.323.565,00	146.231.889.278,08
2) Pembiayaan :		
a) Penerimaan Daerah	218.130.182.486,02	89.103.109.003,94
b) Pengeluaran Daerah	7.000.000.000,00	17.238.900.476,00
Pembiayaan Neto : a) – b)	211.130.182.486,02	71.864.208.527,94
3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : (1 + 2)	297.025.506.051,02	218.096.097.806,02

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2021 dan 2020 masing-masing Rp297.025.506.051,02 dan Rp218.096.097.806,02 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.71 Rincian SiLPA

Rincian SiLPA :	2021	2020
1) Rekening Giro BUD	149.801.598.185,00	149.021.313.468,00
2) Saldo kas RSUD Dr Soesilo pada BankJateng Cabang Slawi	122.081.288.609,00	63.163.058.310,00
3) Kas BLUD Dinkes	2.394.369.636,60	3.795.568.742,60
4) Kas BLUD RSUD Suradadi	22.111.895.879,42	882.993.729,42
5) Kas BOS	155.972.007,00	1.184.581.457,00
6) Kas Bendahara Penerimaan	480.258.696,00	48.359.266,00
7) kas lainnya sumbangan covid	123.038,00	222.833,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	297.025.506.051,02	218.096.097.806,02



Rincian Silpa BUD TA 2021 sebesar Rp149.801.598.185,00 terdiri dari SILPA terikat sebesar Rp46.169.314.356,00 berupa:

- a. DAK Fisik sebesar Rp4.518.599.771,00,
- b. DAK Non Fisik sebesar Rp23.036.247.342,00,
- c. DID sebesar Rp6.993.243.028,00,
- d. DBHCHT Tambahan sebesar Rp4.337.208.275,00,
- e. Utang Tambahan Penghasilan Bulan Desember sebesar Rp7.284.015.940,00

5.2. Laporan Perubahan SAL

5.2.1. Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp218.096.097.806,02.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp218.096.097.806,02

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp297.025.506.051,02 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp 85.895.323.565,00
- Pembiayaan Netto	Rp211.130.182.486,02
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp297.025.506.051,02

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya tidak ada

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp297.025.506.051,02



5.3. Neraca

5.6.1. Aset

5.3.1.1. Aset Lancar

a. Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ditempatkan di Bank Jateng Cabang Slawi berupa rekening giro 1-035-00501-7 untuk menampung penerimaan dan pengeluaran rutin maupun yang berasal dari transfer dan bagi hasil dengan saldo kas per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp149.801.598.185,00 dan 2020 sebesar Rp149.021.313.468,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara pengeluaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) per 31 Desember 2021 sebesar 0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp23.433.500,00 yang merupakan pajak yang belum disetor oleh bendahara kecamatan Kramat pada TA 2019.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas ini merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh bendahara penerimaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) per 31 Desember 2021 sebesar Rp480.258.696,00 dan tahun 2020 sebesar Rp48.359.266,00 dengan rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.72. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1)	Dinas Perhubungan	50.000,00	267.000,00
2)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.417.600,00	30.167.700,00
3)	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	464.791.096,00	6.179.716,00
4)	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM		11.744.850,00
Jumlah		480.258.696,00	48.359.266,00

Kas bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2021 sebesar Rp464.791.096,00 merupakan kas yang ada pada rekening bank Jateng dengan nomor rekening 1 035 00386 6 berupa Rekening Pemda atas nama Kab Tegal /Pen PBB.

d. Kas di BLUD

Kas ini merupakan kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi dan Puskesmas. Sebagai BLUD, diberi wewenang untuk menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit atau puskesmas untuk



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

pembiayaan/pembayaran kegiatan rumah sakit atau puskesmas secara langsung. Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp146.587.554.125,02 dan 2020 sejumlah Rp67.841.620.782,02 rincian masing-masing disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 73. Rincian Kas BLUD

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
A	RSUD dr Soeselo Slawi	122.081.288.609,00	63.163.058.310,00
B	RSUD Suradadi	22.111.895.879,42	882.993.729,42
C	Dinkes (Kas di BLUD Puskesmas)	2.394.369.636,60	3.795.568.742,60
1	Puskesmas Adiwerna	71.975.121,80	9.250.546,80
2	Puskesmas Balapulang	103.942.448,00	191.488.454,00
3	Puskesmas Bangungalih	15.511.884,00	300.677.281,00
4	Puskesmas Bojong	17.921.841,00	14.556.495,00
5	Puskesmas Bumijawa	239.252.599,00	442.639.919,00
6	Puskesmas Danasari	73.366.079,00	36.098.984,00
7	Puskesmas Dukuhturi	73.166.365,00	122.243.739,00
8	Puskesmas Dukuhwaru	160.000.337,20	149.590.372,00
9	Puskesmas Jatibogor	5.323.276,00	67.590.117,00
10	Puskesmas Jatinegara	352.988.716,00	29.778.439,00
11	Puskesmas Kaladawa	8.523.781,00	151.473.100,00
12	Puskesmas Kalibakung	45.885.746,00	144.859.429,00
13	Puskesmas Kambangan	231.208.030,40	401.488.067,40
14	Puskesmas Kedungbanteng	32.345.590,40	37.956.011,60
15	Puskesmas Kesambi	6.938.488,00	100.931.860,00
16	Puskesmas Kesamiran	26.421.400,00	122.633.997,00
17	Puskesmas Kramat	18.162.656,60	27.205.680,60
18	Puskesmas Kupu	8.424.249,00	17.598.828,00
19	Puskesmas Lebaksiu	179.016.812,00	756.909.121,00
20	Puskesmas Margasari	64.166.835,00	46.507.548,00
21	Puskesmas Pagerbarang	112.996.003,00	161.324.270,00
22	Puskesmas Pagiyanten	59.885.553,00	3.462.183,00
23	Puskesmas Pangkah	51.820.355,40	49.041.568,40
24	Puskesmas Penusupan	43.161.099,80	17.753.305,80
25	Puskesmas Slawi	4.667.696,00	29.417.737,00
26	Puskesmas Suradadi	63.414.282,00	50.306.276,00
27	Puskesmas Talang	22.580.794,00	17.426.213,00
28	Puskesmas Tarub	6.313.165,00	67.240.070,00
29	Puskesmas Warureja	294.988.433,00	228.119.130,00
	Jumlah Total Kas di BLUD	146.587.554.125,02	67.841.620.782,02



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rincian Posisi Kas BLUD RSUD dr Soeselo disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.74. Rincian Posisi Kas BLUD RSUD dr. Soeselo

No	Uraian	Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
1	Giro Bank Jateng	1-035-00150-8	72.081.284.472,00
	Rekening Mandiri	1390000607089	4.137,00
2	Deposito Bank Jateng	A249677	5.000.000.000,00
	Deposito Bank Jateng	A250239	10.000.000.000,00
	Deposito Bank Jateng	A306963	5.000.000.000,00
	Deposito Bank Jateng	A306964	10.000.000.000,00
	Deposito Bank Jateng	A307284	10.000.000.000,00
	Deposito Bank Jateng	A307285	10.000.000.000,00
Jumlah Total Kas di BLUD RSUD dr Soeselo			122.081.288.609,00

Saldo Rekening Kas BLUD RSUD Suradadi per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.111.895.879,42 merupakan rekening giro di Bank Jateng dengan nomor rekening 1-035-00724-1 dengan saldo sebesar Rp20.941.673.969,00, rekening giro di Bank Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1928057-1 dengan saldo sebesar Rp1.139.055.428,42 dan Kas Bendahara Penerimaan BLUD Rp31.166.482,00.

Untuk rincian nomor rekening kas BLUD Puskesmas dapat dilihat pada lampiran 5.2

e. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan saldo kas yang berasal dari Dana BOS yang ditransfer dari pemerintah Pusat saldo per 31 desember 2021 adalah Rp200.413.452,00 sedangkan saldo per 31 desember 2020 adalah Rp1.205.864.232,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.75. Kas di Bendahara BOS

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas Bendahara BOS SD Negeri	140.860.960,00	332.503.456,00
2	Kas Bendahara BOS SMP Negeri	15.111.047,00	852.078.001,00
3	Kas Lainnya BOS SD Negeri	35.690.600,00	19.466.800,00
4	Kas Lainnya BOS SMP Negeri	8.750.845,00	1.815.975,00
Jumlah		200.413.452,00	1.205.864.232,00

Kas lainnya merupakan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2021 untuk BOS SD Negeri sebesar Rp35.690.600,00 terdiri dari PPN sebesar Rp15.456.890,00, PPh pasal 21 sebesar Rp4.450.230,00, PPh pasal 23 sebesar Rp6.234.320,00 dan Pajak daerah sebesar Rp9.549.160,00 serta untuk BOS SMP negeri sebesar Rp8.750.845,00 terdiri dari PPN sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp1.772.957,00, PPh pasal 21 sebesar Rp591.900, PPh pasal 23 sebesar Rp1.885.660,00 dan pajak daerah sebesar Rp4.500.328,00.

f. Kas Lainnya

Saldo Kas lainnya merupakan sisa belanja dan bunga jasa giro pada rekening sumbangan uang untuk penanganan COVID 19 pada TA 2021 sebesar Rp123.038,00 dan pada TA 2020 sebesar Rp222.833,00 nomor rekening 3-035-40870-2 an satuan Tugas Covid 19 Kab Tegal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

g. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2021 dan sisa piutang tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp70.781.177.655,00 dan saldo per 31 Desember 2020 Rp64.732.868.752,00 belum diterima Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.76. Rincian Piutang Pajak

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Pajak Hiburan	608.675,00	608.675,00
2	Piutang Pajak Reklame	128.788.356,00	24.767.850,00
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	41.367.690,00	56.660.210,00
4	Piutang Penerangan Jalan	4.568.012.301,00	3.906.050.823,00
5	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	21.924.000,00	21.924.000,00
6	Piutang PBB	66.020.476.633,00	60.722.857.194,00
Jumlah		70.781.177.655,00	64.732.868.752,00

Rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang dapat dilihat dalam lampiran 5.3. Rincian piutang pajak berdasarkan umur piutang

h. Piutang Retribusi Daerah

Akun ini merupakan piutang pada Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Piutang pada Sekretariat Daerah merupakan piutang Ijin Usaha Konstruksi pada Bagian Ekbang Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)nya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Piutang pada Dinas Perhubungan terdiri dari piutang retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang telah ditetapkan SKRDnya namun belum dilunasi oleh Wajib Retribusi, piutang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan piutang Ijin IMB, Izin Gangguan dan pelayanan kesehatan, sedangkan piutang pada Badan Pengelola



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Keuangan dan Aset Daerah merupakan Sewa Kantin dan Sewa Bangunan milik Pemda. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.091.617.618,00 dan Rp1.105.952.143,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.77. Rincian Piutang Retribusi

No.	Uraian	OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	DPMPSTSP	1.500.000,00	2.150.000,00
2	Piutang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB	478.425.000,00	478.425.000,00
3	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	DISHUB	4.800.000,00	13.400.000,00
4	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	DINAS KOMINFO	238.037.674,00	238.037.674,00
5	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		291.314.194,00	270.265.919,00
6	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	DISHUB	4.000.000,00	16.700.000,00
7	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPSTSP	67.780.200,00	80.965.000,00
8	Piutang Retribusi Izin Trayek	DPMPSTSP	125.000,00	373.000,00
9	Piutang Retribusi Izin Gangguan	DPMPSTSP	4.735.550,00	4.735.550,00
10	Piutang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Sekretariat Daerah	900.000,00	900.000,00
Jumlah			1.091.617.618,00	1.105.952.143,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp291.314.194,00 merupakan Piutang Penyewaan Tanah dan Bangunan yang terdapat pada:

- Dinas Perhubungan sebesar Rp245.294.194,00
- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp7.560.000,00
- Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp9.100.000,00
- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp29.360.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

i. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Akun ini merupakan piutang atas deviden penyertaan modal Pemerintah Daerah atas investasi Permanen Penyertaan Modal. Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp14.067.590.752,00 yang terdiri dari:

- Deviden atas penyertaan modal Pada Bank Jateng sebesar Rp9.475.580.450,00
- Deviden atas penyertaan modal Pada BPR Bank TGR sebesar Rp887.801.506,00
- Deviden atas Penyertaan modal BPR BKK Kabupaten Tegal sebesar Rp698.056.834,00
- Deviden atas Penyertaan Modal Pada PDAM sebesar Rp3.006.151.962,00

j. Piutang Lain-lain PAD yang sah

Akun ini merupakan piutang pada BLUD RSUD dr. Soeselo, RSUD Suradadi, Dinas Pehubungan dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Piutang pada Dinas Perdagangan merupakan Piutang Sewa Shelter TRASA, sedangkan pada Dinas Perhubungan berupa piutang denda retribusi parkir tepi jalan umum Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp48.285.474.259,00 dan Rp59.015.657.661,93 Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.78. Rincian Piutang lain – lain Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Denda Reklame	BAPPENDA	4.193.964,00	1.515.957,00
2	Piutang Denda Pajak Air Tanah	BAPPENDA	9.316.656,00	-
3	Piutang Denda PBB	BAPPENDA	25.482.575.966,00	24.038.598.963,00
4	Piutang Denda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB	1.179.506,00	1.179.506,00
5	Piutang BLUD RSUD dr. Soeselo	RSUD dr Soeselo	20.168.087.467,00	27.852.822.597,00
6	Piutang BLUD RSUD Suradadi	RSUD SURADADI	2.620.120.700,00	7.051.297.607,00
7	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Sewa Shelter TRASA)	DINAS DAKOP, UKM		18.300.000,00
8	Piutang Pengembalian kekurangan Volume	DPU		51.943.031,93
	Jumlah		48.285.474.259,00	59.015.657.661,93



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rincian piutang BLUD RSUD dr Soeselo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.79 Rincian piutang BLUD RSUD dr Soeselo

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang BPJS Perawatan	8.418.948.800,00	15.032.759.700,00
2	Piutang Ambulan BPJS		14.855.310,00
3	Piutang Alat Kesehatan RTJL		1.485.600,00
4	Piutang Obat Kronis BPJS		494.908.573,00
5	piutang KEMENKES COVID	11.500.913.200,00	12.286.157.100,00
6	Piutang RS ADELLA		11.286.751,00
7	Piutang PERHUTANI KPH Pekalongan		850.600,00
8	Piutang Dinkes Kab Brebes	248.225.467,00	10.518.963,00
		20.168.087.467,00	27.852.822.597,00

Piutang BPJS perawatan sebesar Rp8.418.948.800,00 terdiri dari rawat jalan sebesar Rp2.297.776.100,00 dan Rawat inap sebesar Rp6.121.172.700,00, Piutang Kemenkes Covid 19 merupakan klaim Covid 19 yang belum disalurkan sebesar Rp11.500.913.200,00 yang terdiri Rawat Jalan sebesar Rp14.904.200,00 dan rawat jalan sebesar Rp11.486.009.000,00 dan Piutang Dinkes Brebes sebesar Rp248.225.467,00 merupakan piutang Dinkes Brebes terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Jaminan Kesehatan Daerah untuk warga Brebes yang dirawat pada RSUD dr soeselo sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dengan RSUD dr Soeselo Slawi Nomor : 440/00023/1/2019, Nomor :445/27/013/1/2019 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Brebes Tahun 2019.

Rincian piutang BLUD RSUD Suradadi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.80. Rincian piutang BLUD RSUD Suradadi

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang BPJS Perawatan	1.563.174.700,00	1.743.344.717,00
2	Piutang Obat Kronis BPJS		92.827.890,00
3	Piutang klaim COVID	1.056.946.000,00	5.215.125.000,00
	Jumlah	2.620.120.700,00	7.051.297.607,00

k. Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Akun ini merupakan piutang transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan saldo piutang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.700.147.212,00 berdasarkan PMK 25/PMK.07/2021 tentang penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar dan Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 yang terdiri dari :

LK Pemkab Tegal



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- kurang Bayar DBH PBB TA 2020 sebesar Rp309.230.839,00,
- Alokasi sementara Kurang Bayar DBH pasal 21 dan pasal 25/29 TA 2021 sebesar Rp3.260.379.400,00,
- Alokasi sementara Kurang Bayar DBH PBB TA 2021 sebesar Rp1.079.079.200,00
- Alokasi sementara Kurang Bayar DBH CHT TA 2021 sebesar Rp580.932.373,00,00
- Alokasi sementara Kurang Bayar DBH SDA minyak bumi dan Gas Bumi TA 2021 sebesar Rp1.667.400,00
- Alokasi sementara Kurang Bayar DBH SDA Mineral dan Batu Bara TA 2021 sebesar Rp45.925,00
- Alokasi sementara Kurang Bayar DBH SDA Panas BumiTA 2021 sebesar Rp5.542.650,00
- Alokasi sementara Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2021 sebesar Rp146.388.425,00
- Alokasi sementara Kurang Bayar DBH SDA Perikanan TA 2021 sebesar Rp316.881.000,00

l. Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah

Akun ini merupakan piutang transfer antar daerah yang berasal dari pemerintah provinsi berupa bagi hasil pajak provinsi saldo piutang per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp2.061.747.513,00 berdasarkan Surat Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 971.1/04.197 tentang Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se Jateng TA 2021 Unaudited dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.537.774.722,00. Rincian saldo piutang sebesar Rp Rp2.061.747.513,00 sebagai berikut:

- Kurang salur bagi hasil pajak PKB sebesar Rp1.144.621.233,00
- Kurang salur bagi hasil pajak BBNKB sebesar Rp905.820.813,00
- Kurang salur bagi hasil pajak PBBKB sebesar Rp420.477,00
- Kurang salur bagi hasil pajak PAP sebesar Rp10.884.990,00

m. Piutang Lainnya

Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah selain dari pajak dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, yang berasal dari pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman diberikan kepada petani, koperasi maupun pengrajin yang disalurkan melalui empat Dinas, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan. Penerima dana pinjaman harus mengembalikan pokok pinjaman ke kas daerah dan jasa pinjaman. Jumlah Piutang Lainnya pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.474.721.633,00. dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.009.566.313,00 yang terdiri dari Piutang yang berasal dari dana bergulir dijelaskan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.81. Rincian Piutang lainnya

No	Uraian	2021(Rp)	2020(Rp)
1. Piutang Dari Pemberian Pinjaman			
A	Pokok Angsuran Pinjaman	7.438.543.254,00	7.470.855.252,00
1)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	517.303.860,00	522.918.405,00
2)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.315.887.962,00	1.317.651.142,00
3)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.390.315.291,00	3.392.315.291,00
4)	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	2.215.036.141,00	2.237.970.414,00
B	Jasa Angsuran Pinjaman	2.536.178.379,00	2.538.711.061,00
1)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	77.914.236,00	79.122.418,00
2)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	880.172.349,00	880.172.349,00
3)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.394.051.286,00	1.394.211.286,00
4)	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	184.040.508,00	185.205.008,00
Jumlah Piutang dari Pemberian Pinjaman (A+B)		9.974.721.633,00	10.009.566.313,00
2	Piutang Pinjaman lainnya	2.500.000.000,00	0,00
Jumlah Piutang Lainnya (1+2)		12.474.721.633,00	10.009.566.313,00

1) Piutang dari Pemberian Pinjaman

Akun ini merupakan piutang yang berasal dari Pemberian Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Pinjaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada Petani Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.82. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Uraian	2021
1	Pinjaman Koperasi Tani Th 2000-2004	109.085.264,00
2	Pinjaman Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	95.113.799,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003,2004	100.778.664,00
4	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2003	34.206.352,00
5	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2004	23.676.434,00
6	Pinjaman Petani Pingkat. Mutu Intes. Padi Th.2004	102.938.255,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	2021
7	Pinjaman Penagkar Benih Tanaman Pangan 2001	10.227.000,00
8	Pinjaman Sentra Bawang Putih Tahun 2002	3.020.000,00
9	Pinjaman Petani Sentra Kentang Th. 2003	36.620.000,00
10	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	1.638.092,00
	Jumlah	517.303.860,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Petani Kecil maupun Koperasi Petani yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh para peminjam, rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.83. Rincian Bunga Pinjaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Uraian	2021
1	Pinjaman. Koperasi Tani Th 2000-2004	12.194.037,00
2	Pinjaman Petani Alsintan Th 2001,2003,2004	41.264.777,00
3	Pinjaman P4K Tahun 2003,2004	6.008.281,00
4	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2003	6.150,00
5	Pinjaman Petani Cluster Jagung Hib. 2004	-
6	Pinjaman Petani Tingkat Mutu Intes. Padi Th.2004	12.440.991,00
7	Pinjaman. Penagkar Benih Tanaman Pangan 2001	1.200.000,00
8	Pinjaman Sentra Bawang Putih Tahun 2002	2.700.000,00
9	Pinjaman Petani Sentra Kentang Th. 2003	2.100.000,00
10	Pinjaman Petani Melati Tahun 2004	-
	Jumlah	77.914.236,00

b) Dana Pinjaman pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada Industri Kecil maupun Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh para peminjam dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.84. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Uraian	2021
1	Pembinaan dan BinteK Penguatan Modal IK/IRT 2001	60.831.196,00
2	Peningkatan Teknologi Industri Kecil Th 2001	346.796.070,00
3	Pinjaman Modal IK Emping Mlinjo & Sirup Jahe 2002	7.000.000,00
4	IK/IRT Shuttlecock dan Keset 2002	35.250.000,00
5	Pinjaman Modal Bahan Baku Logam 2003	413.332.800,00
6	Pinjaman Modal Pengrajin Daur Ulang Plastik 2003	19.470.296,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	2021
7	Pinjaman Modal Pendaftaran HAKI Kab. Tegal 2003	17.538.500,00
8	Pinjaman Modal Pendaftaran SNI PUD Kab. Tegal 2003	50.000.000,00
9	Pinjaman Modal Pendaftaran Sporting Industri 2004	150.832.000,00
10	Pinjaman Modal IK Batik ATBM 2004	51.592.600,00
11	Pinjaman Modal IK Tahu 2004	7.702.000,00
12	Pinjaman Modal Pengrajin Batik Tulis 2004	468.000,00
13	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2001	23.318.000,00
14	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2002	109.831.500,00
15	Pinjaman Modal untuk TKI TA.2004	21.925.000
	Jumlah	1.315.887.962,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada UKM, dan Pengrajin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.85. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Uraian	2021
1	Pembinaan dan BinteK Penguatan Modal IK/IRT 2001	42.750.435,00
2	Peningkatan Teknologi Industri Kecil Th 2001	281.746.850,00
3	Pinjaman Modal IK Emping Mlinjo & Sirup Jahe 2002	5.602.456,00
4	IK/IRT Shuttlecock dan Keset 2002	26.278.187,00
5	Pinjaman Modal Bahan Baku Logam 2003	293.228.551,00
6	Pinjaman Modal Pengrajin Daur Ulang Plastik 2003	20.008.772,00
7	Pinjaman Modal Pendaftaran HAKI Kab. Tegal 2003	23.990.517,00
8	Pinjaman Modal Pendaftaran SNI PUD Kab. Tegal 2003	40.017.544,00
9	Pinjaman Modal Pendaftaran Sporting Industri 2004	84.503.713,00
10	Pinjaman Modal IK Batik ATBM 2004	42.890.803,00
11	Pinjaman Modal IK Tahu 2004	6.169.371,00
12	Pinjaman Modal Pengrajin Batik Tulis 2004	-
13	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2001	2.316.400,00
14	Peningkatan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PPTKD) Kab. Tegal TA.2002	7.593.750,00
15	Pinjaman Modal untuk TKI TA.2004	3.075.000,00
	Jumlah	880.172.349,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

c) **Dana Pinjaman Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian masing-masing pinjaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.86. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

No	Uraian	2021
1	Pemberian Kredit Pengadaan Pangan bagi KUD 2001	253.046.950,00
2	Peningkatan kemampuan koperasi pasar 2001	36.589.000,00
3	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 2001	53.518.750,00
4	Peningkatan Pendapatan Pengrajin IK/IRT (krupuk 2001)	43.465.317,00
5	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2001	39.400.286,00
6	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2002	57.341.671,00
7	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2002	154.341.667,00
8	Pemberdayaan koperasi 2002	85.641.500,00
9	Pemberdayaan PKM 2002	48.212.500,00
10	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2002	146.035.567,00
11	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2002	319.120.546,00
12	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2003	90.275.000,00
13	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2003	113.491.867,00
14	Pemberdayaan koperasi 2003	133.317.570,00
15	Pemberdayaan PKM 2003	351.484.333,00
16	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2003	137.801.477,00
17	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2003	312.499.800,00
18	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2004	397.822.600,00
19	Pemberdayaan koperasi 2004	157.189.000,00
20	Pemberdayaan PKM 2004	214.503.100,00
21	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2004	245.216.790,00
	Jumlah	3.390.315.291,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada Koperasi yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.87. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

No	Uraian	2021
1	Pemberian Kredit Pengadaan Pangan bagi KUD 2001	22.702.384,00
2	Peningkatan kemampuan koperasi pasar 2001	2.851.368,00
3	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 2001	5.707.395,00
4	Peningkatan Pendapatan Pengrajin IK/IRT (krupuk 2001)	48.474.584,00
5	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2001	90.186.122,00
6	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2002	3.989.998,00
7	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2002	20.224.833,00
8	Pemberdayaan koperasi 2002	10.375.000,00
9	Pemberdayaan PKM 2002	7.587.500,00
10	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2002	170.241.300,00
11	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2002	126.168.645,00
12	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi koperasi 2003	8.200.000,00
13	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2003	15.875.000,00
14	Pemberdayaan koperasi 2003	14.850.000,00
15	Pemberdayaan PKM 2003	43.236.667,00
16	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2003	147.847.369,00
17	Pinjaman Modal Pengrajin Konveksi 2003	276.001.217,00
18	Pemberian kredit P.Pangan & didistribusi bagi PKM 2004	47.810.000,00
19	Pemberdayaan koperasi 2004	42.576.877,00
20	Pemberdayaan PKM 2004	53.875.000,00
21	Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Th. 2004	235.270.027,00
	Jumlah	1.394.051.286,00

d) Dana Pinjaman Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Merupakan sisa pokok atas pinjaman yang diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayar oleh para peminjam, rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.88. Rincian Pokok Pinjaman Dinas Kelautan, Perikanan dan peternakan

No	Uraian	2021
1	Pengembangan Ternak Sapi 2001	110.394.271,00
2	Pengembangan Ternak Sapi 2002	91.112.726,00
3	Pengembangan Ternak Sapi 2003	207.008.549,00
4	Pengembangan Ternak Sapi 2004	163.833.455,00
5	Penngemukan Ternak DEG Tahun 2001	122.745.000,00
6	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2002	97.540.000,00
7	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2003	79.173.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	2021
8	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2004	99.309.920,00
9	Pengemb. Ternak kambing Tahun 2002	94.400.000,00
10	Pengemb. Ternak kambing Tahun 2003	94.299.000,00
11	Pengemb. Ternak kambing Tahun 2004	14.430.000,00
12	Pembibitan Ternak Domba Tahun 2003	124.655.600,00
13	Pembibitan Ternak Itik Tahun 2003	38.000.000,00
14	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2003	90.630.000,00
15	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2004	5.720.000,00
16	Pemberdayaan Petani Tambak Th. 2002	105.954.720,00
17	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2002	118.161.000,00
18	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2003	249.072.000,00
19	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2004	19.318.000,00
20	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2002	29.452.000,00
21	Pemberdayaan Pengolah dan Pengepul Ikan 2003	71.023.000,00
22	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2003	8.259.000,00
23	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2004	86.936.000,00
24	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2001	290.000,00
25	Penberdayaan Pemancingan Tahun 2003	19.599.200,00
26	Penberdayaan UPR Tahun 2003	8.600.000,00
27	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2004	13.703.500,00
28	Pinj. Modal Pengusaha Backyard Tahun 2002	51.416.000,00
Jumlah		2.215.036.141,00

Sisa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada peternak, petani dan nelayan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dibayar oleh para peminjam, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.89. Rincian Bunga Pinjaman Dinas Kelautan, Perikanan dan peternakan

No	Uraian	2021
1	Pengembangan Ternak Sapi 2001	1.669.608,00
2	Pengembangan Ternak Sapi 2002	10.586.500,00
3	Pengembangan Ternak Sapi 2003	24.051.000,00
4	Pengembangan Ternak Sapi 2004	21.061.400,00
5	Penngemukan Ternak DEG Tahun 2001	1.356.000,00
6	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2002	10.850.000,00
7	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2003	15.506.700,00
8	Pengemb. Usaha DEG Tahun 2004	5.807.500,00
9	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2002	16.559.000,00
10	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2003	15.435.000,00
11	Pengmb. Ternak kambing Tahun 2004	456.000,00
12	Pembibitan Ternak Domba Tahun 2003	18.985.200,00
13	Pembibitan Ternak Itik Tahun 2003	2.535.000,00
14	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2003	11.298.000,00
15	Pengemb. Usaha Ternak Burung Puyuh Th. 2004	540.000,00
16	Pemberdayaan Petani Tambak Th. 2002	4.347.000,00
17	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2002	-
18	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2003	16.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	2021
19	Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tahun 2004	1.785.000,00
20	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2002	-
21	Pemberdayaan Pengolah dan Pengepul Ikan 2003	2.225.000,00
22	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2003	-
23	Pedagang dan Pengolah Ikan Tahun 2004	-
24	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2001	-
25	Penberdayaan Pemancingan Tahun 2003	379.000,00
26	Penberdayaan UPR Tahun 2003	1.100.000,00
27	Penberdayaan Budidaya Ikan Tawar Tahun 2004	607.600,00
28	Pinj. Modal Pengusaha Backyard Tahun 2002	-
Jumlah		184.040.508,00

Piutang lainnya tersebut di atas sudah dikoordinasikan dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) oleh OPD untuk proses penyerahannya.

2) Piutang Pinjaman Lainnya

Merupakan saldo piutang atas pemberian pinjaman daerah kepada BUMD yaitu Perseroan Daerah BPR Bank TGR Kabupaten Tegal berdasarkan Keputusan Bupati nomor 900/97 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00.

n. Penyisihan Piutang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal maka Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Saldo penyisihan piutang Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp77.807.170.006,04) dan Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp77.036.203.759,84) rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.90. Rincian Penyisihan Piutang

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(40.847.163.888,06)	(39.841.752.886,11)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.048.819.331,50)	(956.635.889,25)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(70.337.953,76)	
4	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(25.843.318.462,15)	(25.869.467.825,03)
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		(271.091.972,84)
6	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(10.308.737,57)	(87.688.873,61)



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
7	Penyisihan Piutang Lainnya	(9.987.221.633,00)	(10.009.566.313,00)
Jumlah		(77.807.170.006,04)	(77.036.203.759,84)

o. Beban dibayar Dimuka

Merupakan Beban Jasa Kantor berupa token Belanja Listrik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah TA 2020 sebesar Rp2.430.000,00.

p. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Jumlah persediaan tahun 2021 sebesar Rp50.657.703.664,19 dan tahun 2020 sebesar Rp43.963.501.389,43 rincian persediaan masing OPD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.98. Rincian Persediaan

NO	OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	349.654.725,00	352.866.823,00
2	Dinas Kesehatan	29.263.263.506,16	22.609.354.769,43
3	RSUD Dr.Soeselo	9.163.834.313,00	6.684.613.360,00
4	RSUD Suradadi	3.273.674.992,03	2.980.341.912,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	308.194.459,00	722.130.050,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	0	7.096.100,00
7	Satpol-PP	1.112.500,00	1.239.500,00
8	BPBD	1.670.399.900,00	160.272.750,00
9	Dinas Sosial	68.802.250,00	229.327.300,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	662.135.746,00	1.290.559.249,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	169.317.875,00	85.509.050,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.823.374.393,00	3.165.017.482,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	214.736.114,00	48.421.823,00
14	Dinas Perhubungan	470.072.645,00	4.387.378.845,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	OPD	2021 (Rp)	2020 (Rp)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.870.800,00	2.061.820,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.003.720,00	57.275.300,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.693.450,00	16.550.400,00
18	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	0	27.934.898,00
19	Dinas Pemuda ,Olah Raga dan Pariwisata	150.176.910,00	110.881.270,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	311.741.226,00	386.208.350,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	165.294.900,00	188.118.375,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	39.345.430,00	13.906.000,00
23	Sekretariat Daerah	200.888.160,00	216.645.405,00
24	Inspektorat	6.259.600,00	7.949.700,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	4.619.800,00	12.690.900,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	0	12.885.400,00
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	228.581.000,00	107.247.500,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.270.800,00	459.100,00
29	Sekretariat DPRD	58.737.400,00	67.838.900,00
30	Kecamatan Adiwerna	0	0,00
31	Kecamatan Balapulang	1.668.000,00	547.500,00
32	Kecamatan Bojong	845.400,00	981.000,00
33	Kecamatan Bumijawa	0	0,00
34	Kecamatan Dukuhturi	0	0,00
35	Kecamatan Dukuhwaru	155.400,00	1.427.600,00
36	Kecamatan Jatinegara	1.189.600,00	774.400,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	608.300,00	826.000,00
38	Kecamatan Kramat	252.500,00	0,00
39	Kecamatan Lebaksiu	228.500,00	298.000,00
40	Kecamatan Margasari	1.650.600,00	2.282.100,00
41	Kecamatan Pagerbarang	1.108.100,00	0,00
42	Kecamatan Pangkah	412.400,00	831.400,00
43	Kecamatan Slawi	647.950,00	733.150,00
44	Kecamatan Suradadi	7.650.000,00	0,00
45	Kecamatan Talang	0	0,00
46	Kecamatan Tarub	0	0,00
47	Kecamatan Warureja	0	239.300,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.230.300,00	1.778.608,00
Jumlah		50.657.703.664,19	43.963.501.389,43



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rincian Masing- masing akun persediaan adalah sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan

Saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp20.802.853.389,37 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.99. Persediaan Bahan

NO	Uraian	Bahan Kimia	Bahan Bakar dan Pelumas	Bahan Baku	Bahan/ Bibit Tanaman	Isi Tabung Gas	Bahan lainnya	Jumlah
1	Dinas Kesehatan						13.073.783.721,43	13.073.783.721,43
2	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soeselo Slawi					71.847.690,00	5.359.196.760,00	5.431.044.450,00
3	Rumah Sakit Umum Suradadi						1.540.069.141,94	1.540.069.141,94
4	Dinas Pekerjaan Umum			304.977.049,00				304.977.049,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB						84.104.851,00	84.104.851,00
6	Dinas Lingkungan Hidup		14.000.800,00					14.000.800,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						22.723.250,00	22.723.250,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			199.178.100,00				199.178.100,00
8	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	89.896.226,00			43.075.800,00			132.972.026,00
	Jumlah	89.896.226,00	14.000.800,00	504.155.149,00	43.075.800,00	71.847.690,00	20.079.877.724,37	20.802.853.389,37

2) Persediaan Suku Cadang

Merupakan saldo persediaan suku cadang per 31 Desember 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp101.609.125,00.

3) Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Merupakan saldo persediaan Alat/bahan untuk kegiatan kantor per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.792.502,424,00 dengan rincian disajikan dalam *Lampiran 5.4*

4) Persediaan Obat-obatan

Merupakan saldo persediaan obat-obatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.202.412.535,82 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.100. Persediaan Obat-obatan

NO	Uraian	Persediaan obat
1	Dinas Kesehatan	12.358.891.458,81
2	Puskesmas Danasari	54.907.097,44
3	Puskesmas Kesamiran	77.733.474,48
4	Puskesmas Margasari	170.294.185,92
5	Puskesmas Kesambi	99.047.841,51
6	Puskesmas Bumijawa	232.172.259,25
7	Puskesmas Bojong	203.294.659,63
8	Puskesmas Balapulang	142.974.716,27
9	Puskesmas Kalibakung	92.087.857,80
10	Puskesmas Pagerbarang	78.378.607,99
11	Puskesmas Lebaksiu	99.394.457,03
12	Puskesmas Kambangan	47.552.148,94
13	Puskesmas Jatinegara	201.887.065,44
14	Puskesmas Kedungbanteng	173.857.611,87
15	Puskesmas Pangkah	90.184.897,34
16	Puskesmas Penusupan	120.013.872,40
17	Puskesmas Slawi	119.488.044,50
18	Puskesmas Adiwerna	71.958.438,96
19	Puskesmas Pagiyanten	162.887.249,06
20	Puskesmas Talang	50.525.926,10
21	Puskesmas Kaladawa	31.034.656,29
22	Puskesmas Dukuhturi	40.336.449,26
23	Puskesmas Kupu	103.734.972,17
24	Puskesmas Dukuwaru	68.753.573,96
25	Puskesmas Tarub	186.153.902,90
26	Puskesmas Kramat	121.703.362,80
27	Puskesmas Bangungalih	104.960.781,79
28	Puskesmas Suradadi	77.928.180,17
29	Puskesmas Jatibogor	116.349.407,75



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	Uraian	Persediaan obat
30	Puskesmas Warurejo	157.413.534,90
31	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soeselo Slawi	2.793.872.620,00
32	Rumah Sakit Umum Suradadi	1.660.796.486,09
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB	11.911.680,00
34	Wisata Kesehatan Jamu Dinkes	79.931.057,00
Jumlah		20.202.412.535,82

5) Persediaan Barang Untuk diserahkan

Merupakan saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.366.162.965,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.101. Persediaan barang untuk diserahkan

NO	SKPD	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Jumlah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.616.157.500,00		1.616.157.500,00
2	Dinas Sosial	51.822.700,00		51.822.700,00
3	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	133.308.000,00		133.308.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB		564.874.765,00	564.874.765,00
Jumlah		1.801.288.200,00	564.874.765,00	2.366.162.965,00

6) Persediaan bahan makanan

Merupakan saldo persediaan bahan makanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp271.273.665,00 yang terdapat pada RSUD dr Soeselo sebesar Rp256.319.665,00 dan RSUD Suradadi sebesar Rp14.954.000,00

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Investasi Permanen dan Non Permanen untuk tahun 2021 sebesar Rp232.348.730.622,14 dan tahun 2020 sebesar Rp222.356.153.912,81 yaitu berupa Investasi Permanen dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.102 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	232.348.730.622,14	222.356.153.912,81
2)	Investasi Permanen Lainnya	0	
	Jumlah	232.348.730.622,14	222.356.153.912,81

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Akun ini menggambarkan jumlah dana milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditempatkan untuk jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kabupaten Tegal pada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD/PD), BPR/BKK dan lainnya. Saldo dinilai dengan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 20%. Jumlah saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp232.348.730.622,14 dan 2020 sebesar Rp222.356.153.912,81.

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD/PD per 31 Desember 2021 sebesar Rp232.348.730.622,14 dan Tahun 2020 sebesar Rp222.356.153.912,81 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.103. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD

NO	Uraian	2020 (Rp)	Penyertaan Modal 2021	Metode Ekuitas	2021(Rp)
(1)	Bank Jateng	54.748.000.000,00			54.748.000.000,00
(2)	PDAM	126.514.970.235,00	4.500.000.000,00	4.543.475.510,00	135.558.445.745,00
(3)	PRPP Jateng, Semarang	407.200.000,00			407.200.000,00
(4)	PD BPR BKK Kabupaten Tegal	10.683.414.222,81		432.539.521,33	11.115.953.744,14
(5)	PT BKK JATENG CABANG KAB TEGAL	12.250.000.000,00			12.250.000.000,00
(6)	Bank TGR	17.752.569.455,00		516.561.678,00	18.269.131.133,00
	Jumlah	222.356.153.912,81	4.500.000.000,00	5.492.576.709,33	232.348.730.622,14

(1)PMPD Kabupaten Tegal pada Bank Jateng merupakan penyertaan saham biasa dan dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.748.000.000,00 atau 1,33% dan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp54.748.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(2) PMPD pada PDAM Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp135.558.445.745,00 dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp126.514.970.235,00 Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal pada PDAM Kabupaten Tegal sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.942.639.127,00.

Perhitungan nilai penyertaan pada PDAM per 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.104. Investasi pada PDAM

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	PDAM	98.701.180.893,00	26.836.758.313,00	10.020.506.539,00	135.558.445.745,00	100	135.558.445.745,00
	Jumlah	98.701.180.893,00	26.836.758.313,00	10.023.108.836,69	135.558.445.745,00		135.558.445.745,00

(3) PMPD pada PRPP Jateng, Semarang merupakan penyertaan saham Kabupaten Tegal kepada PT. PRPP Jateng, dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya kurang dari 20%. Saldo per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan dari jumlah penyertaan Tahun 2020 sebesar Rp407.200.000,00

(4) PMPD pada PD BPR-BKK Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2021 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 20%. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp11.115.953.744,14 dan Rp10.683.414.222,81. Nilai Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tegal Pada PD BPR-BKK Kabupaten Tegal sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.350.000.000,00. Perhitungan nilai penyertaan pada BPR BKK Kabupaten Tegal per 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.105. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR-BKK Kabupaten Tegal

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	BPR BKK Kabupaten Tegal	15.000.000.000,00	5.208.044.612,00	2.477.575.274,00	22.685.619.886,00	49,00	11.115.953.744,14
	Jumlah	15.000.000.000,00	5.208.044.612,00	2.477.575.274,00	22.685.619.886,00		11.115.953.744,14

(5) PMPD pada Modal Pada PT BKK Jawa Tengah cabang Kabupaten Tegal merupakan penyertaan saham, yang Tahun 2021 dinilai dengan metode biaya karena kepemilikannya



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

kurang dari 20%, saldo per 31 Desember 2021 tidak mengalami perubahan dari Penyertaan Modal Tahun 2020 yaitu sebesar sebesar Rp12.250.000.000,00 atau 3,62%

- (6) Penyertaan pada Bank TGR merupakan penyertaan Pemerintah Daerah kepada Bank TGR, yang Tahun 2020 dinilai dengan metode ekuitas karena kepemilikannya 100%. Saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp18.269.131.133,00 dan Rp17.752.569.455,00. Nilai Modal disetor Pemerintah Kabupaten pada PD BPR Bank TGR adalah sebesar Rp15.000.000.000,00.

Perhitungan nilai penyertaan pada Bank TGR per 31 Desember 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.106 Investasi pada Bank TGR

No.	Investee	Modal Disetor	Cadangan	Laba (Rugi)	Jumlah	Hak Pemkab Tegal	
						%	Rp
1	Bank TGR	15.000.000.000,00	1.654.946.577,00	1.614.184.556,00	18.269.131.133,00	100	18.269.131.133,00
	Jumlah	15.000.000.000,00	1.654.946.577,00	1.614.184.556,00	18.269.131.133,00		18.269.131.133,00

5.3.1.3. Aset Tetap

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Tegal berupa aset tetap yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Penyajian Nilai Aset Tetap dalam Neraca LKPD Tahun 2021 menggunakan metode kapitalisasi atas realisasi belanja modal Tahun 2021 ditambah dengan nilai administratif Aset Tetap yang ada dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan penyusutan terhadap aset tetap dengan pengecualian tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan untuk metode penyusutan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan Per Periode} : \frac{\text{Nilai Yang Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan catatan dari Organisasi Perangkat Daerah nilai Aset Tetap untuk Tahun 2021 sebesar Rp3.025.069.828.393,46 dan Tahun 2020 sebesar Rp2.940.151.404.768,39 yang disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.107 Aset Tetap

Uraian		2021 (Rp)	2020 (Rp)
a.	Tanah	637.518.072.088,63	640.661.079.386,63
b.	Peralatan dan mesin	816.748.193.497,64	732.317.257.082,40
c.	Gedung dan Bangunan	1.433.739.754.307,50	1.316.105.857.209,50
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.192.106.994.564,87	2.151.543.280.829,87
e.	Aset Tetap Lainnya	141.767.910.119,56	140.863.864.499,56
f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.474.666.356,00	4.788.715.031,00
g.	Akumulasi Penyusutan	(2.222.285.762.540,74)	(2.046.128.649.270,57)
Jumlah Aset Tetap		3.025.069.828.393,46	2.940.151.404.768,39

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.108 Penambahan Aset Tetap

Aset Tetap	Saldo	Mutasi Tahun 2021		Saldo
	Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Desember 2021
Tanah	640.661.079.386,63	384.190.652,00	3.527.197.950,00	637.518.072.088,63
Peralatan dan Mesin	732.317.257.082,40	100.327.096.279,00	15.896.159.864,04	816.748.193.497,36
Gedung dan Bangunan	1.316.105.857.209,50	120.217.835.173,00	2.583.938.075,00	1.433.739.754.307,50
Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.151.543.280.829,87	134.231.042.451,00	93.667.328.716,00	2.192.106.994.564,87
Aset Tetap lainnya	140.863.864.499,56	904.045.620,00		141.767.910.119,56
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	4.788.715.031,00	20.815.368.325,00	129.417.000,00	25.474.666.356,00
Akumulasi Penyusutan	(2.046.128.649.270,57)	70.238.572.181,76	246.395.685.451,93	(2.222.285.762.540,74)
Jumlah	2.940.151.404.768,39	447.118.150.681,76	362.199.727.056,97	3.025.069.828.393,18

a. Tanah

Nilai Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp640.661.079.386,63 dan Rp.637.518.072.088,63. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Penambahan nilai Tanah sebesar Rp384.190.652,00 berasal dari:
Belanja Modal sebesar Rp384.190.652,00 terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(a) Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan sebesar Rp329.403.652,00;

(b) RSUD Suradadi Sebesar Rp54.787.000,00;

Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.527.197.950,00 milik Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan SK Bupati Tegal 030/1.383 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penghapusan BMD berupa Tanah SMK Negeri yang dihibahkan ke Provinsi karena kewenangan SMK sudah ke provinsi yang belum di hapus dari Neraca Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar Rp3.503.647.950,00. Berdasarkan SK Bupati Tegal Nomor 030/1.517 Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penghapusan BMD karena Hibah Tanah Pmerintah Kabupaten Tegal ke Pemerintah Desa Penusupan sebesar Rp23.550.000,00.

Sedangkan untuk rincian akun Aset Tetap Tanah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tanah Persil

Saldo Tanah Persil pada tahun 2020 sebesar Rp143.835.689.408,79. sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp140.363.278.458,79.

2. Tanah Non Persil

Saldo Tanah Non Persil pada tahun 2020 sebesar Rp8.620.357.390,00. sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp8.620.357.390,00.

3. Lapangan

Saldo Lapangan pada tahun 2020 sebesar Rp488.205.032.587,84 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp488.534.436.239,84.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tegal menghadapi sengketa tanah berupa gugatan perdata dari pihak ketiga atas kepemilikan tanah di Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan pokok gugatan berupa perbuatan melawan hukum dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tegal memasang/menempatkan berupa papan bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tegal Sertifikat No: 108/Tmblng/00 Luas: 816 M².

Sebidang tanah tersebut dibeli pada tahun 2000 yang berlokasi di Kecamatan Tembalang Kota Semarang seluas ± 816 M² yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Asrama Mahasiswa



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai No 20/Tembalang atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk selanjutnya Atas pembelian tanah tersebut kemudian dicatat dalam KIB A BPKAD.

Atas sengketa tersebut, Pengadilan Negeri Semarang kemudian mengadili gugatan perkara perdata dalam tingkat pertama dan menjatuhkan putusan sesuai Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata No. 551/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 30 Juli 2020 yang kurang lebih menyatakan:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 477 Kecamatan Tembalang Kota Semarang dengan luas $\pm 320 \text{ M}^2$ adalah sah milik penggugat dan mempunyai kekuatan hukum;
- c. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 20/Tembalang luas 816 M^2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengaku dan mengklaim tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan memasang/menempatkan papan bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tegal Sertifikat No: 108/Tmblng/00 Luas: 816 M^2 " diatas tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; dan
- e. Menghukum Tergugat/Pemerintah Kabupaten Tegal membayar biaya perkara sebesar Rp3.008.000,00.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Kabag Hukum Sekretariat Daerah telah mengajukan Memori Banding dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Agustus 2020 yang selanjutnya diserahkan ke Panitera Pengadilan Tinggi Semarang pada bulan Januari 2021 sesuai Surat Panitera Pengadilan Tinggi Semarang No. W.12.U/102/HK.02/01/2021 dengan putusan kembali mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal kembali melakukan memori banding berupa Kasasi Mahkamah Agung dengan dibantu Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan masih dalam proses tersebut.

b. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah peralatan dan mesin yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tegal untuk dimanfaatkan dalam



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp732.317.257.082,40 dan Rp816.748.193.497,64. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar Rp79.369.343.870,00;
- b. Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp15.277.466.015,00;
- c. Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp2.699.352.549,00;
- d. Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 sebesar Rp316.905.286,00;
- e. Penambahan Peralatan dan Mesin dari Hibah sebesar Rp1.397.222.500,00;
- f. Penambahan Peralatan dan Mesin dari reklas antar KIB sebesar Rp730.685.635,00
- g. Pengurangan Peralatan dan Mesin ke persediaan Rp39.365.700,00
- h. Pengurangan Peralatan dan Mesin menjadi beban ekstrakomptabel sebesar Rp1.767.454.256,00
- i. Pengurangan Peralatan dan Mesin reklas ke beban barang jasa sebesar Rp868.410.873,00
- j. Pengurangan Peralatan dan Mesin Reklas ke aset lainnya sebesar Rp36.543.400,00
- k. Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Penghapusan sebesar Rp12.648.265.211,04.

Sedangkan untuk rincian akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Alat Besar Darat

Saldo Alat Besar Darat pada tahun 2020 sebesar Rp26.938.897.093,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp26.938.897.093,00

2. Alat Besar Apung

Saldo Alat Besar Apung pada tahun 2020 Rp80.530.500,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp80.530.500,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

3. Alat Bantu

Saldo Alat Bantu pada tahun 2020 sebesar Rp8.533.030.912,92 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp9.181.290.212,92.

4. Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada tahun 2020 Rp112.643.701.685,28 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp117.298.493.947,00

5. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada tahun 2020 Rp3.035.060.538,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp3.006.675.737,50.

6. Alat Angkutan Apung Bermotor

Saldo Alat Angkutan Apung Bermotor pada tahun 2020 Rp41.999.909,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp41.999.909,00.

7. Alat Angkutan Apung Tak Bermotor

Saldo Alat Angkutan Apung Tak Bermotor pada tahun 2020 Rp67.654.881,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp93.119.881,00

8. Alat Angkutan Bermotor Udara

Saldo Alat Angkutan Bermotor Udara pada tahun 2020 Rp685.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp685.000,00

9. Alat Bengkel Bermesin

Saldo Alat Bengkel Bermesin pada tahun 2020 Rp5.262.672.621,56 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp5.314.437.139,06

10. Alat Bengkel Tak Bermesin

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada tahun 2020 Rp2.819.650.565,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp2.863.274.065,00

11. Alat Ukur

Saldo Alat Ukur pada tahun 2020 Rp3.426.011.342,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp3.881.258.818,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

12. Alat Pengolahan

Saldo Alat Pengolahan pada tahun 2020 Rp4.210.869.886,00
sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp4.234.227.996,00

13. Alat Kantor

Saldo Alat Kantor pada tahun 2020 Rp41.267.552.044,00
sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp48.567.015.922,00

14. Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga pada tahun 2020
Rp117.477.638.220,08 sedangkan pada tahun 2021 sebesar
Rp126.067.694.433,51

15. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Saldo Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat pada tahun 2019
sebesar Rp10.447.152.576,49 sedangkan pada tahun 2021
sebesar Rp10.836.284.743,49

16. Alat Studio

Saldo Alat Studio pada 2020 Rp16.255.236.237,66 sedangkan
pada tahun 2021 sebesar Rp17.182.749.873,66

17. Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi pada tahun 2020
Rp4.606.107.608,40 sedangkan pada tahun 2021 sebesar
Rp4.509.282.808,00

18. Peralatan Pemancar

Saldo Peralatan Pemancar pada tahun 2020
Rp1.069.325.636,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar
Rp1.008.316.786,00

19. Peralatan Komunikasi Navigasi

Saldo Peralatan Pemancar pada tahun 2020
Rp2.800.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar
Rp2.800.000,00

20. Alat Kedokteran

Saldo Alat Kedokteran pada tahun 2020
Rp164.379.334.371,43 sedangkan pada tahun 2021 sebesar
Rp199.962.457.419,44



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

21. Alat Kesehatan Umum

Saldo Alat Kesehatan Umum pada tahun 2020 Rp684.937.724,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp3.311.540.506,00

22. Unit Alat Laboratorium

Saldo Unit Alat Laboratorium pada tahun 2020 Rp37.623.343.363,72 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp41.272.526.487,72

23. Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Saldo Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir pada tahun 2020 sebesar Rp73.071.026,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp73.071.026,00.

24. Alat Peraga Praktek Sekolah

Saldo pada tahun 2020 sebesar Rp25.872.995.480,93 dan pada tahun 2021 sebesar Rp26.204.134.970,93

25. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

Saldo Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika pada tahun 2020 sebesar Rp81.668.525,00 pada tahun 2021 sebesar Rp97.798.525,00

26. Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan

Saldo Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan pada tahun 2020 sebesar Rp27.659.500,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp27.659.500,00

27. Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya

Saldo Radiation Aplication And Destructive Testing Laboratory Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp75.247.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp75.247.000,00

28. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Saldo Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada tahun 2020 sebesar Rp1.182.964.492,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.182.964.492,00

29. Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

Saldo Peralatan Laboratorium Hydrodinamica pada tahun 2020 Rp342.483.500,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp342.483.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

30. Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi

Saldo Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi pada tahun 2020 sebesar Rp126.945.215,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp130.045.215,00

31. Senjata Api

Saldo Senjata api pada tahun 2020 sebesar Rp19.562.960,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp19.562.960,00

32. Persenjataan Non Senjata Api

Saldo Persenjataan Non senjata api pada tahun 2020 sebesar Rp563.206.927,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp564.506.927,00

33. Alat Khusus Kepolisian

Saldo Alat Khusus Kepolisian pada tahun 2020 sebesar Rp330.676.047,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp343.994.947,00

34. Komputer Unit

Saldo Komputer Unit pada tahun 2020 Rp69.136.763.385,25 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp84.060.496.175,05

35. Peralatan Komputer

Saldo Peralatan Komputer pada tahun 2020 Rp25.364.366.890,69 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp28.149.750.181,69

36. Sumur

Saldo Sumur pada tahun 2020 Rp0,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp3.000.000,00

37. Alat Pelindung

Saldo Alat Pelindung pada tahun 2020 Rp0,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.750.000,00

38. Alat Sar

Saldo Alat Sar pada tahun 2020 Rp1.397.264.475,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.451.886.475,00

39. Alat Kerja Penerbangan

Saldo Alat Kerja Penerbangan pada tahun 2020 sebesar Rp116.641.260,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp131.891.260,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

40. Unit Peralatan Proses/Produksi

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi pada tahun 2020 sebesar Rp1.508.300,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp5.628.300,00

41. Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Saldo Rambu-rambu Lalu Lintas Darat pada tahun 2020 Rp46.324.167.857,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp47.627.969.874,00

42. Peralatan Olah Raga

Saldo Peralatan Olah Raga pada tahun 2020 Rp401.121.490,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp598.792.890,00

c. Gedung dan Bangunan

Aset tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.316.105.587.209,50 dan Rp1.433.739.754.307,50. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal sebesar Rp128.622.796.811,00;
- b. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.278.275.614,00;
- c. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hibah Pihak ketiga sebesar Rp15.655.692.550,00;
- d. Penambahan Gedung dan Bangunan dari Kosnstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp129.417.000,00
- e. Pengurangan Gedung dan Bangunan dari Penghapusan sebesar Rp1.124.875.400,00;
- f. Pengurangan Gedung dan Bangunan dari Reklas antar KIB sebesar Rp2.370.308.653,00
- g. Pengurangan Gedung dan Bangunan Reklas ke Beban barang jasa sebesar Rp60.144.203,00
- h. Pengurangan Gedung dan Bangunan Reklas ke Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp20.815.368.325,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- i. Pengurangan Gedung dan Bangunan untuk Hibah Kepada Masyarakat sebesar Rp3.681.588.296,00

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung Tempat Kerja

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada tahun 2020 Rp1.249.721.249.969,50 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.360.648.278.555,50

2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada tahun 2020 Rp27.085.130.140,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp27.695.713.299,00

3. Candi/Tugu Peringatan/Prasasti

Saldo Candi/Peringatan/Prasasti pada tahun 2020 Rp12.126.513.172,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp12.675.266.347,00

4. Tugu/Tanda Batas

Saldo Tugu/Tanda Batas pada tahun 2020 Rp27.172.963.928,00 sedangkan pada Tahun 2021 sebesar Rp29.720.496.106,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.151.543.280.829,87 dan Rp2.192.106.994.564,87. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, jembatan, irigasi dan jaringan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal sebesar Rp143.805.033.653,00;
- b. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp67.955.000;
- c. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklas antar KIB sebesar Rp1.519.004.598,00
- d. Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan reklas ke hibah kepada masyarakat sebesar Rp8.568.549.200,00
- e. Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan reklas ke beban barang jasa sebesar Rp2.592.401.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- f. Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan reklas ke aset lainnya sebesar Rp92.641.628.716,00

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jalan

Saldo Jalan pada tahun 2020 Rp1.448.379.846.300,06 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp1.500.502.157.022,06.

2. Jembatan

Saldo Jembatan pada tahun 2020 Rp185.692.215.118,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp191.386.786.293,00

3. Bangunan Air Irigasi

Saldo Bangunan Air Irigasi pada tahun 2020 Rp177.491.132.536,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp108.685.809.447,00

4. Bangunan Pengairan Pasang Surut

Saldo Bangunan Pengairan Pasang Surut pada tahun 2020 Rp18.550.947.085,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp21.925.489.857,00

5. Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder

Saldo Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder pada tahun 2020 Rp492.223.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp492.223.000,00

6. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam

Saldo Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam pada tahun 2020 Rp196.758.187.365,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp221.764.464.615,00

7. Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah

Saldo Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah pada tahun 2020 Rp4.023.010.970,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp4.023.010.970,00

8. Bangunan Air Bersih/Air Baku

Saldo Bangunan Air Bersih/Air Baku pada tahun 2020 Rp46.418.287.892,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp48.128.685.298,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

9. Bangunan Air Kotor

Saldo Bangunan Air Kotor pada tahun 2020 Rp22.279.440.809,81 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp23.752.778.829,81

10. Instalasi Air Bersih/Air Baku

Saldo Instalasi Air Bersih/Air Baku pada tahun 2020 Rp2.144.694.214,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp4.053.596.714,00

11. Instalasi Air Kotor

Saldo Instalasi Air Kotor pada tahun 2020 Rp6.764.933.575,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp8.665.185.075,00

12. Instalasi Pengolahan Sampah

Saldo Instalasi Pengolahan Sampah pada tahun 2020 Rp117.198.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp495.091.000,00

13. Instalasi Pembangkit Listrik

Saldo Instalasi Pembangkit Listrik pada tahun 2020 Rp16.359.700,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp582.564.200,00

14. Instalasi Gardu Listrik

Saldo Instalasi Gardu Listrik pada tahun 2020 Rp7.717.297.853,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp10.190.614.853,00

15. Instalasi Gas

Saldo Instalasi Gas pada tahun 2020 Rp910.614.528,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp910.614.528,00

16. Instalasi Pengaman

Saldo Instalasi Pengaman pada tahun 2020 Rp172.039.400,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp172.039.400,00

17. Instalasi Lain-lain

Saldo Instalasi Lain-lain pada tahun 2020 Rp0,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp48.565.000,00

18. Jaringan Air Minum

Saldo Jaringan Air Minum pada tahun 2020 Rp10.578.300,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp87.578.300,00



19. Jaringan Listrik

Saldo Jaringan Listrik pada tahun 2020 Rp33.187.661.488,00
sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp46.999.495.017,00.

20. Jaringan Telepon

Saldo Jaringan Telepon pada tahun 2020 Rp412.013.298,00
sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp412.013.298,00

21. Jaringan Gas

Saldo Jaringan gas pada tahun 2020 Rp4.599.398,00 sedangkan
pada tahun 2021 sebesar Rp4.599.398,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2020 dan 2021 yang masing-masing bernilai Rp140.863.864.499,56 dan Rp141.767.910.119,56. Adapun rincian penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal sebesar Rp1.417.939.200,00
- b. Reklas antar KIB Rp65.831.420,00
- c. Reklas ke barjas Rp579.725.000,00

Sedangkan untuk rincian akun aset tetap lainnya pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bahan Perpustakaan Tercetak

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada tahun 2020 Rp130.868.049.339,60 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp131.723.069.939.

2. Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro

Saldo Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro pada tahun 2020 Rp55.561.209,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp55.561.209,00

3. Kartografi, Naskah Dan Lukisan

Saldo Kartografi, Naskah dan Lukisan pada tahun 2020 Rp445.817.353,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp446.167.373,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

4. Musik

Saldo Musik pada tahun 2020 Rp53.120.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp53.120.000,00

5. Karya Grafika (Graphic Material)

Saldo karya grafika (graphic material) pada tahun 2020 sebesar Rp14.052.999,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp14.052.999,00

6. Barang Bercorak Kesenian

Saldo Barang Bercorak Kesenian pada tahun 2020 Rp7.068.150.783,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp7.116.825.783,00

7. Alat Bercorak Kebudayaan

Saldo Alat Bercorak Kebudayaan pada tahun 2020 Rp738.435.434,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp738.269.861,00

8. Tanda Penghargaan

Saldo Tanda Penghargaan pada tahun 2020 Rp8.132.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp8.132.000,00

9. Hewan Piaraan

Saldo Hewan Piaraan pada tahun 2020 sebesar Rp829.740.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp829.740.000,00. Saldo hewan piaraan berupa Rusa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebesar Rp826.200.000,00 dan berupa Hewan Kebun Binatang Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.540.000,00.

10. Ternak

Saldo Ternak pada tahun 2020 sebesar Rp215.860.000,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp215.860.000,00. Saldo Ternak berupa Ayam, Kambing, Sapi Potong dan Hewan Ternak Potong lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp460.000,00 dan Domba dan Kerbau pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp215.400.000,00

11. Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)

Saldo Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) pada tahun 2020 sebesar Rp56.434.037,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp56.434.037,00. Saldo Ikan bersirip berupa Ikan Air Payau Budidaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp103.300,00 dan Pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebesar Rp56.330.737,00

12. Tanaman

Saldo Tanaman pada tahun sebesar 2020 Rp292.397.517,96 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp293.381.717,96

Adapun rincian Tanaman adalah sebagai berikut :

Tabel 5.109 Tanaman

No.	Perangkat Daerah	Keterangan	Nominal
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanaman Keras, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan	4.297.868,00
2.	Dinas Kesehatan	Tanaman Keras dan Tanaman Hortikultura	86.221.549,96
3.	Dinas Pekerjaan Umum	Tanaman Hortikultura	19.667.750,00
4.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Tanaman Keras	28.700.000,00
5.	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Pasar	Tanaman Hortikultura	23.977.550,00
6.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Tanaman Hortikultura	130.517.000,00

13. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada tahun 2020 sebesar Rp172.091.200,00 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp217.295.200,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Adalah berupa kegiatan yang belum dapat diselesaikan pelaksanaannya. Untuk Tahun Anggaran 2020 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp4.788.715.031,00. Untuk Tahun Anggaran 2021 Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar Rp25.474.666.356,00. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2021 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.110 Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	OPD (Organisasi Perangkat Daerah)	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Dinas Kesehatan	84.100.000,00	143.700.000,00
2.	RSUD Suradadi	20.725.536.825,00	
3.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	4.515.019.531,00	4.425.188.031,00
4.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	80.940.000,00	80.940.000,00
5.	Dinas Sosial	15.700.000,00	15.700.000,00
6.	Inspektorat	47.680.000,00	47.680.000,00
7.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		69.817.000,00
8.	Kecamatan Dukuhturi	3.940.000,00	3.940.000,00
9.	Kecamatan Lebaksiu	1.750.000,00	1.750.000,00
	Jumlah	25.474.666.356,00	4.788.715.031,00

han Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2021 sebesar Rp20.474.666.356,00 dengan rincian sebagaimana berikut:

- RSUD Suradadi berupa Belanja Pengembangan Gedung ICU, PICU, NICU senilai Rp20.474.567.740,00. Adapun rincian pembayaran kontraknya adalah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran kontrak Nomor 050/11/PPK/MKGDGICU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dengan SP2D Nomor 0914/LS-BJ/2021 tanggal 14 Juli 2021 senilai Rp131.505.000,00;
 - b. Pembayaran kontrak Nomor 050/11/PPK/MKGDGICU/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dengan SP2D Nomor 3184/LS-BJ/2021 senilai Rp190.243.900,00;
 - c. Pembayaran kontrak Nomor 050/08/PPK/PG-ICU/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan pembayaran terbagi kedalam 5 SP2D diantaranya Uang Muka dengan SP2D Nomor 0984/LS-BJ/2021 tanggal 27 Juli 2021 senilai Rp4.638.163.139,00;
 - d. Pembayaran kontrak Nomor 050/08/PPK/PG-ICU/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan SP2D termin Nomor 2059/LS-BJ/2021 tanggal 19 Oktober 2021 senilai Rp3.710.530.511,00;
 - e. Pembayaran kontrak Nomor 050/08/PPK/PG-ICU/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan SP2D termin Nomor 2480/LS-BJ/2021 tanggal 22 November 2021 senilai Rp3.710.530.511,00;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- f. Pembayaran kontrak Nomor 050/08/PPK/PG-ICU/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan SP2D termin Nomor 3003/LS-BJ/2021 tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp5.565.795.768,00;
- g. Pembayaran kontrak Nomor 050/08/PPK/PG-ICU/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 dengan SP2D termin Nomor 4106/LS-BJ/2021 tanggal 31 Desember 2021 senilai 2.527.798.911,00;
- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan,
 - a. Pembayaran 100% paket pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung TIK TA. 2021 Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah dengan Nomor Kontrak 050/07/06/SP/MK.MPP/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 senilai Rp39.754.000,00. Pembayaran dilakukan dengan SP2D pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor SP2D 1968/LS.BJ/2021;
 - b. Pembayaran 100% paket pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung TIK TA. 2021 Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten/kota senilai Rp50.077.500,00 dengan Nomor Kontrak 050/07/23/SP/MK.TIK/III/2021 tanggal 25 Maret 2021. Pembayaran dilakukan dengan SP2D pada tanggal 23 September 2021 dengan Nomor SP2D 1742/LS.BJ/2021
- Penambahan KDP RSUD Suradadi dari Reklisifikasi antar KIB sebesar Rp250.969.085,00.
- Pengurangan KDP terjadi pada Dinas Kesehatan Puskesmas Bumijawa sebesar Rp59.600.000,00 karena telah menjadi aset tetap berupa gedung dan bangunan
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat belanja modal sebesar Rp10.000.000,00 untuk Penyusunan DED Bangunan Gedung Kantor.
- Dinas Sosial terdapat belanja modal sebesar Rp15.700.000,00 untuk Gambar Rencana dan RAB Bangunan Gedung Kantor.
- Inspektorat terdapat belanja modal sebesar Rp47.680.000,00 untuk DED Bangunan Gedung Kantor.
- Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdapat belanja modal sebesar Rp69.817.000,00 untuk DED Lampu Stadion di GOR Tri Sanja.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Kecamatan Dukuhturi terdapat belanja modal sebesar Rp3.940.000,00 untuk Gambar Rencana Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor : Pembuatan Gapura dan Pagar Kantor Kecamatan Dukuhturi.
- Kecamatan Lebaksiu terdapat belanja modal sebesar Rp1.750.000,00 untuk pembuatan gambar desain pembangunan Taman.

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp2.222.285.762.540,74) dan pada tahun 2020 adalah sebesar (Rp2.046.128.649.270,57). Adapaun rincian akumulasi penyusutan pada masing-masing organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut : Adapaun rincian akumulasi penyusutan pada masing-masing organisasi perangkat daerah disajikan dalam *lampiran 5.5*.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Akun ini menggambarkan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal berupa Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam klasifikasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp164.322.694.503,42 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp98.860.890.871,53 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.111 Aset Lainnya

Uraian		2021 (Rp)	2020 (Rp)
a.	Tagihan Jangka Panjang	267.446.839,00	232.155.000,00
b.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	39.135.265.506,00	39.135.265.506,00
c.	Aset Tak Berwujud	3.153.360.657,00	3.024.945.257,00
d.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.600.541.047,25)	(2.353.414.572,14)
e.	Aset Lain-lain	174.781.196.868,67	83.599.911.355,67
f.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(50.414.034.320,00)	(24.777.971.675,00)
Jumlah		164.322.694.503,42	98.860.890.871,53

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan pengakuan piutang TP/TGR atas kerugian daerah karena hilangnya aset daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp267.446.839,00 dan 2020 sebesar Rp232.155.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.112 Tagihan Jangka Panjang

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Khaerudin sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0583/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
2	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Waryono sesuai LHP Bawasda No. 356/398 tanggal 01-12-2008 dan surat Bupati No. 951/0520/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00
3	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Saefudin sesuai LHP Bawasda No. 356/303/2008 tanggal 31-10-2008 dan surat Bupati No. 951/0518/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	2.505.000,00	2.505.000,00
4	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Ali Murtado sesuai LHP Bawasda No. 356/619.c tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0519/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
5	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nursidik sesuai LHP Bawasda No. 356/619.d tanggal 31-12-2005 dan surat Bupati No. 951/0522/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.250.000,00	6.250.000,00
6	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. H. Hartanto, MM sesuai LHP Bawasda No. 356/301.a tanggal 29-10-2008 dan surat Bupati No. 951/0521/2009 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah		4.000.000,00
7	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Abdul Fatah, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/503 tanggal 6 Juli 2010 dan surat Bupati No. 951/2084/2010 tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	6.300.000,00	6.300.000,00
8	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Hariyanto, A.Md sesuai LHP Inspektorat No 356/288/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan surat Bupati No. 951/2714/2011 tanggal 10 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00
9	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Fajar Rokhwidi, SIP sesuai LHP Inspektorat No 356/040/2011 tanggal 9 Januari 2011 dan surat Bupati No. 951/2688/2011 tanggal 8 Juni 2011 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	104.000.000,00	104.000.000,00
10	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah atas nama Imam Abadi Soebedjo	8.600.000,00	8.600.000,00
11	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Ir. Astono sesuai LHP Inspektorat No 356/15/264/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan surat Bupati No. 721/2015 tanggal 3 Desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	22.291.839,00	17.100.000,00
12	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Drs. Nurholis Sail	27.900.000,00	27.900.000,00
13	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah Atas nama Nuridin sesuai LHP Inspektorat No 356/15/420/2012 tanggal 13 Februari 2015 dan surat Bupati No. 720/2015 tanggal 2 Desember 2015 Tentang Pemberitahuan Kerugian Daerah	8.200.000,00	8.200.000,00
14	Pengakuan Piutang TP/TGR atas hilangnya aset daerah an Ir Toto Subandrio sesuai Surat Keputusan Pembebanan Penggantian kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) nomor 030/1931 tahun 2020	14.500.000,00	14.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)
15	Pengakuan Piutang atas hilangnya aset daerah an Komsari, SIP sesuai Surat keputusan Pembebanana Penggantian Kerugian Daerah Sementara (SKPPKS) nomor 030/25/1112/tahun 2019	17.000.000,00	
16	Pengakuan Piutang atas hilangnya aset daerah an Taryono, SP sesuai surat Bupati tegal nomor 951/12/1099 tanggal 10 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Kerugian daerah	17.100.000,00	
Jumlah		267.446.839,00	232.155.000,00

Selain TP/TGR atas hilangnya aset daerah terdapat juga kerugian dari pihak ketiga yang sedang dalam proses sebesar Rp584.885.804,61, informasi kerugian hasil pemeriksaan BPK sebesar Rp13.709.791.543,25 dan informasi kerugian hasil pemeriksaan APIP sebesar Rp187.232.960,00.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan suatu area yang akan dimanfaatkan dan dikelola bersama selama jangka waktu tertentu. Aset kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai investasi yang disertakan Pemerintah Kabupaten Tegal di dalam perjanjian kerjasama. Saldo per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp39.135.265.506,00 dan saldo tahun Anggaran 2020 sebesar Rp39.135.265.506,00. Adapun rinciannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.113 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No.	Uraian	2021(Rp)	2020 (Rp)
1)	Pembangunan Pasar Trayeman	594.342.025,00	594.342.025,00
2)	Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi	6.295.750.000,00	6.295.750.000,00
3)	Pembangunan LIK Takaru	300.000.000,00	300.000.000,00
4)	Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap	31.945.173.481,00	31.945.173.481,00
Jumlah		39.135.265.506,00	39.135.265.506,00

Terdapat Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat aset berupa tanah dengan luas 29.890M² dan gedung bangunan dengan luas 8.024 M² yang dimanfaatkan pihak ketiga untuk obyek wisata diantaranya untuk obyek wisata pemandian air panas guci, Pantai Purwahamba Indah dan Tirta Waduk Cacaban akan tetapi pada saat itu obyek wisata masih memprihatinkan. Sehingga ada investor yang ingin mengembangkan di wilayah obyek wisata pemandian air panas guci dan pantai purwahamba indah diantaranya untuk membangun Villa, Hotel, Kolam renang dan Kafe. Investor mengembangkan obyek tersebut dengan BGS maksimal 30 tahun.



1) Pembangunan Pasar Trayeman

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 051/03819/1993 tanggal 1 Agustus 1993. Masa Perjanjian kerjasama selama 25 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 10.000m² yang berada dalam HPL Nomor 1 Desa Trayeman seluas 15.000 m² sesuai dengan Keputusan Kepala BPN Nomor 11/HPL/BPN/94 dengan nilai Rp562.500.000,00 dan Hak Pengelolaan HPL senilai Rp31.842.025,00 sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp594.342.025,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan kios Pasar Trayeman beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.811.148.364,00 dan tanah yang terletak di Desa Trayeman seluas 12.390 m² senilai Rp74.340.500,00 sehingga total penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada adalah Rp2.885.488.864,00.

Perjanjian kerjasama ini telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 511.234-170 tanggal 8 Maret 1994.

Addendum perjanjian dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0669/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1 dan Pasal 7 yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp3.103.468.864,00. Addendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Pada tanggal 19 Agustus 2009 terjadi kebakaran di los pasar Trayeman, agar pasar tersebut dapat digunakan maka dilakukan kegiatan tanggap darurat melalui Belanja Tidak Terduga TA 2009 senilai Rp702.665.000,00 kemudian dilakukan pembangunan kembali dari TA 2010 sampai dengan TA 2012 senilai Rp12.080.000.000,00.

2) Pembangunan Pusat Perdagangan dan Rekreasi Slawi

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/05296/2000,tanggal 19 Oktober 2000. Perjanjian kerjasama selama 30 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 16.618 m²yang berada dalam HPL Nomor 1/1997 sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 6/HPL/BPN/97 dengan nilai Rp6.231.750.000,00 dan nilai dari HPL sebesar Rp64.000.000,00, sehingga penyertaan Pemda sebesar Rp6.295.750.000,00. Penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan pusat perdagangan dan rekreasi beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp12.900.001.000,00. Perjanjian kerjasama



ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 09/DPRD/IX/2000.

Addendum pertama dilakukan tanggal 16 Pebruari 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/0670/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.593.551.000,00. Addendum ini telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 4 Tahun 2002.

Addendum kedua dilakukan tanggal 14 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05528/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7 addendum pertama yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp17.595.717.000,00.

3) Pembangunan LIK Takaru

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT Karsa Bayu Bangun Persada melalui Perjanjian Nomor 573/02405/2002, tanggal 6 Juni 2002. Perjanjian Kerjasama selama 30 tahun. Penyertaan Pemerintah Daerah berupa tanah seluas 2000 m² yang berada dalam HPL Nomor 2 Dampyak sesuai Keputusan Kepala BPN Nomor 10/HPL/BPN/2003 dengan luas tanah 90.600 m² dengan nilai Rp300.000.000,00, sementara penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada sebesar biaya pembangunan LIK Takaru beserta fasilitas pendukungnya senilai Rp2.101.847.500,00. Perjanjian kerjasama telah mendapat persetujuan DPRD dengan Keputusan Nomor 12 Tahun 2002.

Addendum dilakukan tanggal 4 Oktober 2002 dengan Perjanjian Nomor 573/05531/2002. Perubahan dilakukan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengubah nilai penyertaan PT Karsa Bayu Bangun Persada menjadi Rp2.134.847.500,00.

Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga terdapat pemanfaatan pada tanah LIK yang belum dicatat sebagai berikut:

1. Kronologis Kios PT. KBBP

Setelah terbangun gedung produksi IKM di dalam LIK Takaru, kemudian dibutuhkan sarana sebagai pusat pemasaran produk unggulan, sebagaimana tertuang dalam dasar (3) perjanjian kerjasama antara Pemda Kab. Tegal dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa No. 573/02405/2002, dimana Pemda Kab. Tegal menyertakan modal berupa tanah seluas 2.000 m² dengan penyertaan sebesar Rp. 300.000.000,- sebagaimana tertuang dalam perjanjian dimaksud pasal (6).



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

2. Kronologis Bangunan Blok A01 dan A02

Setelah PT. Dwitunggal selesai membangun 20 gedung produksi tipe C, kemudian PT. Matahari SS mengajukan permohonan untuk dapat bergabung kedalam LIK Takaru. Atas kebutuhan gedung Matahari SS tersebut, maka dibangunlah 2 gedung tipe A01 dan A02 dengan luas tanah 1.800 m².

3. Kronologis Bangunan Blok B03 dan A03

Seiring perkembangan waktu PT. Matahari SS kembali mengajukan permohonan ijin pembangunan gedung produksi yang pada akhirnya sekita tahun 1997 dibangunlah gedung produksi pada blok A03 dan B03 dengan luas tanah 1.500 m².

4. 40 bangunan tipe C yaitu C01 dan C40 sampai sekarang belum ditemukan dokumen pendukung atas kepemilikan bangunan yang dimaksud.

5. Bangunan B01 dan B02 dibangun sekitar akhir tahun 1987 (tanpa dokumen).

6. Bangunan pada blok A06, B06, C41 sampai dengan blok C48 merupakan bangunan yang dibangun diatas tahun 2000.

4) Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap

Saldo aset tetap pemerintah kabupaten Tegal yang dimanfaatkan oleh pihak lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.945.173.481,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.114 Kerjasama Pemanfaatan Aset Tetap

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Saldo	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang dimanfaatkan
		2021	
1	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat	92.534.000,00	92.534.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.063.332,00	11.063.332,00
3	Sekretariat Daerah	2.000.862.625,00	2.000.862.625,00
4	Kecamatan Kramat	828.358.500,00	
5	Kecamatan Slawi	26.431.825.000,00	
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	2.580.530.024,00	737.294.286,00
Jumlah		31.945.173.481,00	2.841.754.243,00

Adapun rincian Aset dalam kerjasama pemanfaatan pada perangkat daerah adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.115 Rincian Kerjasama Pemanfaatan

No.	Perangkat Daerah	Rincian Aset	Nominal
1.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat (pinjam pakai oleh KODIM)	Portable Generating Set	5.432.000,00
		Sepeda Motor	46.125.000,00
		Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	100.000,00
		P.C Unit	18.928.000,00
		Lap Top	17.021.000,00
		Audio Amplifier	4.928.000,00
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Global Positioning System	11.063.332,00
3.	Sekretariat Daerah	Sedan	222.101.400,00
		Station Wagon	1.693.761.225,00
		Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya	85.000.000,00
4.	Kecamatan Kramat	Tanah	828.358.500,00
5.	Kecamatan Slawi	Tanah	26.431.825.000,00
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Station Wagon	2.250.878.024,00
		Sepeda Motor	329.652.000,00
Jumlah			31.945.173.481,00

c. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud pada pemerintah Kabupaten Tegal adalah berupa software dengan masa manfaat terbatas sehingga dilakukan amortisasi. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan Metode Garis



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Lurus. Untuk Software yang mengalami pengembangan aplikasi dan telah memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud, maka pengeluarannya akan dicatat sebagai kapitalisasi. Aset Tak berwujud pada tahun 2021 sebesar Rp3.153.360.657,00 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp3.024.945.257,00 terjadi penambahan aset tak berwujud sebesar Rp128.415.400,00. Penambahan Aset Tak berwujud tersebut ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp34.837.000,00 dari belanja barang dan jasa dan Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp93.578.400,00. Rincian aset tidak berwujud dapat dilihat lampiran 5.6

Adapun rincian Aset Tak Berwujud yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.116 Aset Tak Berwujud

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO	
		31-Des-21	31-Des-20
1.	Dinas Kesehatan	54.967.000,00	54.967.000,00
2.	RSUD Dr.Soeselo	1.804.364.978,00	1.804.364.978,00
3.	RSUD Suradadi	184.622.000,00	184.622.000,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	3.399.000,00	3.399.000,00
5.	Dinas Perhubungan	84.201.435,00	84.201.435,00
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.485.000,00	1.485.000,00
7.	Dinas Perinaker	40.700.000,00	40.700.000,00
8..	Inspektorat	106.667.550,00	106.667.550,00
9.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	384.523.112,00	384.523.112,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.686.000,00	35.849.000,00
11.	Dinas Komunikasi dan Informasi	407.203.400,00	313.625.000,00
12.	Kecamatan Dukuhwaru	10.541.182,00	10.541.182,00
Jumlah		3.153.360.657,00	3.024.945.257,00

d. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.073.679.947,28 dan saldo tahun 2021 adalah sebesar Rp2.600.541.047,25. Adapun rincian Akumulasi Amortisasi aset Tak Berwujud dapat dilihat dalam lampiran 5.6

e. Aset lain-lain

Saldo aset lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp174.781.196.868,67 berupa saldo Aset lain-lain berupa Aset rusak berat atau akan dihibahkan sebesar Rp174.772.980.268,67 dan saldo aset lain-lain



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

lainnya atas tuntutan bendahara kecamatan Kramat atas piutang PFK belanja TA 2021 yang belum dipenuhi karena bendahara sudah pensiun tetapi belum ada SKTJM sebesar Rp8.216.600,00.

Aset lain-lain berupa Aset rusak berat atau akan dihibahkan dikarenakan karena adanya reklasifikasi dari aset tetap karena aset tetap tersebut dalam kondisi rusak berat atau akan dihibahkan sehingga akan diusulkan penghapusan. Saldo Aset lain-lain pada tahun 2021 adalah sebesar Rp174.772.980.268,67 dan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp83.599.911.355,67 terjadi pengurangan aset lainnya sebesar Rp2.494.259.803,00 karena ada Penghapusan Aset Rusak Berat dan terjadi penambahan aset yang akan dihibahkan tetapi belum dilakukan penghapusan sebesar Rp93.667.328.716,00. Adapun rincian aset lain-lain dapat dilihat dalam lampiran 5.7

f. Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain pada Tahun 2020 sebesar Rp24.777.971.675,00 terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat sebesar Rp21.936.217.432,00 dan Akumulasi penyusutan aset pemanfaatan sebesar Rp2.841.754.243,00. Sedangkan saldo akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2021 sebesar Rp50.414.034.320,00 terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat sebesar Rp47.572.280.077,00 dan Akumulasi penyusutan aset pemanfaatan sebesar Rp2.841.754.243,00. Rincian Akumulasi Penyusutan aset Rusak Berat disajikan dalam lampiran 5.8

5.3.2. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp42.853.499.527,00 dan 2020 sebesar Rp37.522.234.509,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.117 Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	2021 (Rp.)	2020(Rp.)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	52.658.045,00	44.716.275,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	4.416.832.407,00	5.368.667.691,00
3	Utang Beban	38.384.009.075,00	31.333.819.105,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	00	775.031.438,00
	Jumlah	42.853.499.527,00	37.522.234.509,00

1. Utang PFK

Merupakan saldo utang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2021 sebesar sebesar Rp52.658.045,00 berupa utang pajak



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

yang belum disetor atas belanja ganti uang pada kecamatan kramat Tahun Anggaran 2019 Rp8.216.600,00 dan Utang Pajak yang belum disetor atas realisasi belanja Bantuan Operasional sekolah sebesar Rp44.441.445,00. Saldo 31 Desember 2020 sebesar Rp44.716.275,00 berupa Utang Pajak yang belum disetor atas realisasi belanja Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp21.282.775,00, Utang Pajak yang belum disetor atas Belanja Ganti Uang pada kecamatan Kramat sebesar Rp23.433.500,00.

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima dimuka merupakan Saldo pendapatan Diterima Dimuka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga yang pada 31 Desember 2021 belum digunakan pemanfaatannya sebesar Rp4.416.832.407,00, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.118 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Pajak Reklame	833.520.752,00	952.496.535,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.049.978.322,00	2.475.306.156,00
3	Lain-lain PAD	1.533.333.333,00	1.940.865.000,00
	Jumlah	4.416.832.407,00	5.368.667.691,00

a. Pajak Reklame

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 yang berasal dari Pajak Reklame sebesar Rp833.520.752,00 dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp952.496.535,00 yang berada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp2.049.978.322,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.475.306.156,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.119 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Dinas Perhubungan	60.000.000,00	120.000.000,00
2	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	29.360.000,00	14.224.000,00
3	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.725.458.367,00	2.219.846.156,00
4	Kecamatan Slawi	95.858.400,00	96.486.000,00
5	Kecamatan Kramat	22.650.469,00	22.500.000,00
6	BPKAD		2.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	16.650.000,00	
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.094.340,00	
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90.906.746,00	
	Jumlah	2.049.978.322,00	2.475.306.156,00

c. Lain-lain PAD

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 yang berasal dari Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp1.533.333.333,00 merupakan pendapatan sewa hasil pemanfaatan kekayaan daerah sewa pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.940.865.000,00 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka hasil Pemanfaatan kekayaan daerah sewa sebesar Rp1.900.000.000,00 pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM pasar banjaran dan Pendapatan diterima dimuka Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp3.300.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan sebesar Rp37.565.000,00 pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM .

3. Utang Beban

Utang Beban merupakan Saldo Belanja per 31 Desember 2021 yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp38.384.009.075,00 dan saldo per 31 Desember 2020 Rp31.333.819,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.120 Utang Beban

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
a.	Utang Belanja tambahan penghasilan	7.284.015.940,00	7.164.950.638,00
b.	Utang Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	989.655.407,00	379.930.000,00
c.	Utang Beban Listrik	3.595.547.947,00	3.546.040.226,00
d.	Utang Beban Telepon	92.282.341,00	83.568.741,00
e.	Utang Beban Air	204.798.950,00	69.592.910,00
f.	Utang Beban Internet	98.325.396,00	83.527.541,00
g.	Utang Beban BPJS Kesehatan	876.858,00	112.631.238,00
h.	Utang Beban BLUD	26.117.942.236,00	19.893.340.811,00
i.	Utang Beban Paket	354.000,00	27.000,00
j.	Utang Beban Koran	210.000,00	210.000,00
	Jumlah	38.384.009.075,00	31.333.819.105,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

a. Utang Belanja Tambahan Penghasilan

Merupakan saldo utang belanja Tambahan Penghasilan (TPP) bulan Desember yang dibayarkan pada tahun berikutnya. Saldo utang belanja tambahan Penghasilan TA 2021 sebesar Rp7.284.015.940,00 dan TA 2020 sebesar Rp7.164.950.638,00.

tahun anggaran 2021 sebesar Rp8.271.171.097,00 yaitu Beban tambahan penghasilan PNS dan Gaji PTT yang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.284.015.940,00 dan Insentif Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp987.155.157,00 dan tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.544.880.638,00.

b. Utang Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Saldo Utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya TA 2021 sebesar Rp989.665.407,00 berupa utang belanja insentif pajak pada Badan pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp867.987.997,00, Pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp119.167.160,00 dan Pada Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan sebesar Rp2.500.250,00 dan Saldo TA 2020 sebesar Rp379.930.000,00 merupakan utang belanja insentif pajak daerah.

c. Utang Beban Listrik

Merupakan Saldo utang beban listrik per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.595.547.947,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.546.040.226,00 . Rincian lengkap utang beban listrik per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.9*

d. Utang Beban Telepon

Merupakan Saldo utang beban telepon per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.282.341,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.568.741,00. Rincian lengkap utang beban telepon per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.10*.

e. Utang Beban Air

Merupakan saldo utang beban Air per 31 Desember 2021 sebesar Rp204.798.950,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp69.592.910,00. Rincian lengkap utang beban air per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.11*.

f. Utang Beban Internet

Merupakan Saldo utang beban Internet per 31 Desember 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

yang belum dibayar sebesar Rp98.325.396,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.527.541,00. Rincian lengkap utang beban internet per OPD dapat dilihat *pada lampiran 5.12*.

g. Utang Beban BPJS Kesehatan

Merupakan saldo utang beban BPJS Kesehatan per 31 Desember 2021 yang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan pembayaran BPJS Kesehatan PTT dan THL sebesar Rp876.858,00 dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp112.631.238,00

h. Utang Beban BLUD

Merupakan saldo utang beban Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2021 yang berada pada BLUD RSUD dr Soeselo dan RSUD Suradadi sebesar Rp26.117.942.236,00 dan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.893.340.811,00 dengan rincian sebagai disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.121 Utang Beban BLUD

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	RSUD dr Soeselo	14.903.301.043,00	16.856.577.281,00
2	RSUD Suradadi	11.214.641.193,00	3.036.763.530,00
	Jumlah	26.117.942.236,00	19.893.340.811,00

Utang beban BLUD RSUD dr Soeselo per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.122. Utang Beban BLUD RSUD dr Soeselo

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Obat	0,00	66.985.600,00
2	Bahan Alat Kesehatan dan habis pakai	77.357.418,00	319.521.895,00
3	Bank Darah	137.350.000,00	210.195.000,00
4	Laboratorium	0,00	0,00
5	Hemodialisa	0,00	89.760.000,00
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	0,00	0,00
7	Barang Cetak Rekam Medis	0,00	0,00
8	Listrik,Air,Telepon	,00	234.674.426,00
9	Jasa Pelayanan Medis	14.671.779.960,00	15.880.586.380,00
10	Perlengkapan Pendaftaran	0,00	0,00
11	Pengelolaan Sampah Medis	16.813.665,00	38.853.980,00
12	Penyediaan Pemulasaran Jenazah	0,00	16.000.000,00
	Jumlah	14.903.301.043,00	16.856.577.281,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Utang beban BLUD RSUD Suradadi per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel. 5.123 Utang Beban BLUD RSUD Suradadi

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Obat	747.167.634,00	2.626.614.532,00
2	Bahan Cetakan	0,00	115.951.000,00
3	Bahan/ Alat Pembersih Sanitasi	0,00	177.216.588,00
4	Laboratorium	0,00	46.955.250,00
5	Makan dan Minum pasien	21.875.000,00	55.161.160,00
6	Bank Darah	0,00	14.865.000,00
7	Jasa Pelayanan Medis	10.399.814.359,00	0,00
8	Listrik, Telepon		0,00
9	Pengolahan Sampah	45.784.200,00	0,00
Jumlah		11.214.641.193,00	3.036.763.530,00

i. Utang Beban Paket

Merupakan Saldo utang beban paket per 31 Desember 2021 yang berada pada Inspektorat sebesar Rp354.000,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp27.000,00.

j. Utang Beban Koran

Merupakan Saldo utang beban koran per 31 Desember 2021 yang belum dibayar yang berada pada Kec. Dukuhwaru sebesar Rp210.000,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp210.000,00.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp775.031.438,00,00 yang merupakan Lebih Bayar DBH Pemerintah Pusat sesuai PMK 25/PMK.07/2021 yaitu

- Lebih Bayar DBH pph psl 21 dan pasal 25/29 2018 sebesar Rp672.679.038,00
- DBH PBB 2019 sebesar Rp7.300.300,00
- DBH SDA Migas 2019 sebesar Rp95.052.100,00

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.473.401.800,00 yang terdiri dari Lebih salur dana BOS yang belum disetor sebesar Rp22.720.000,00 dan dari RSUD Suradadi yang merupakan utang dari pihak ketiga (Bank mandiri) sebesar Rp1.473.401.800,00.



Kewajiban Jangka Panjang

Akun ini menggambarkan jumlah Utang Jangka Panjang-Pemerintah Pusat yang jatuh tempo sampai dengan Tahun 2021

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.797.570.564.576,19 meningkat sebesar Rp230.551.841.017,92 (6,46%) jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.567.018.723.558,27.

5.4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2021. Laporan Operasional (LO) tahun 2021 disajikan dengan perbandingan Laporan Operasional tahun 2020.

5.4.1. KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1.1. Pendapatan –LO

Pendapatan-LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.527.901.797.297,40 dan pada tahun 2020 sebesar Rp2.322.758.929.181,75 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.124 Pandapatan – LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	605.510.435.635,40	438.669.422.816,65
2	Pendapatan Transfer– LO	1.737.519.950.810,00	1.701.219.102.083,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	184.871.410.852,00	182.870.404.282,10
Jumlah		2.527.901.797.297,40	2.322.758.929.181,75

1. Pendapatan Asli Daerah- LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp605.510.435.635,40 dan Tahun 2020 sebesar Rp438.669.422.816,65 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.125 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	151.736.521.160,00	129.907.890.094,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	21.345.065.647,00	19.841.774.700,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	34.977.190.860,33	19.015.530.424,72
4	Lain – lain PAD Yang Sah - LO	397.451.657.968,07	269.904.227.597,93
Jumlah		605.510.435.635,40	438.669.422.816,65

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp151.736.521.160,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp129.907.890.094,00 dengan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.126 Pendapatan Pajak Daerah – LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Pajak Hotel	541.374.947,00	422.893.771,00
2	Pajak Restoran	6.405.637.928,00	4.665.435.647,00
3	Pajak Hiburan	167.703.008,00	200.361.654,00
4	Pajak Reklame	2.769.965.660,00	2.358.513.526,00
5	Pajak Penerangan Jalan	51.856.035.086,00	48.507.504.120,00
6	Pajak Parkir	236.367.650,00	134.945.940,00
7	Pajak Air Tanah	488.120.194,00	444.392.200,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.100.000,00	3.100.000,00
9	Pajak Minerba	1.556.573.470,00	407.706.014,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	51.879.430.523,00	46.877.435.576,00
11	Pajak BPHTB	35.832.212.694,00	25.885.601.646,00
Jumlah		151.736.521.160,00	129.907.890.094,00

Pendapatan Pajak Daerah –LO 2020 sebesar Rp151.736.521.160,00 yaitu terdiri dari

- Pendapatan Pajak Daerah LRA 2020 sebesar Rp143.617.868.928,00
- ditambah Piutang Pajak 2021 sebesar Rp70.781.177.655,00
- ditambah Pendapatan Diterima dimuka 2020 sebesar Rp952.496.535,00,.
- Ditambah Penghapusan pajak sebesar Rp1.951.367.546,00
- dikurangi Piutang Pajak 2020 sebesar Rp64.732.868.752,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- dikurangi Pendapatan Diterima Dimuka 2021 sebesar Rp833.520.752,00,00,.

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.345.065.647,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp19.841.774.700,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.127 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	221.997.000,00	192.729.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	3.794.854.900,00	2.866.390.250,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	579.614.000,00	509.211.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.168.575.571,00	3.304.429.699,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.076.850.000,00	1.148.570.003,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	4.761.000,00	3.837.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku - LO	450.813.500,00	460.288.500,00
8	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO	19.800.000,00	35.400.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	183.205.800,00	159.600.200,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	5.138.051.186,00	4.882.613.392,00
11	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	144.545.880,00	175.385.980,00
12	Retribusi Terminal - LO	56.862.500,00	80.478.000,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	793.388.000,00	805.956.500,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	40.237.500,00	
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	4.192.480.100,00	3.736.974.250,00
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah -LO	31.016.000,00	
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	1.436.538.710,00	1.465.307.926,00
18	Retribusi Izin Trayek - LO	10.949.000,00	14.603.000,00
	Jumlah	21.344.540.647,00	19.841.774.700,00

Pendapatan Retribusi Daerah –LO 2021 sebesar Rp21.345.065.647,00 yaitu terdiri dari

- Pendapatan Retribusi Daerah LRA 2020 sebesar Rp20.911.507.338,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- ditambah Piutang 2021 sebesar Rp1.091.617.618,00
- ditambah Pendapatan Diterima dimuka 2020 sebesar Rp2.475.306.156,00,
- ditambah koreksi piutang sebesar Rp2.120.000,00
- ditambah penyesuaian pendapatan diterima dimuka 2020 karena reklasifikasi dari akun lain-lain PAD yang sah sebesar Rp40.865.000,00
- dikurangi penyesuaian piutang 2020 yang karena reklasifikasi dari akun lain-lain PAD yang sah sebesar Rp18.300.000,00
- dikurangi Piutang 2020 sebesar Rp1.105.952.143,00 dan
- dikurangi Pendapatan Diterima Dimuka 2021 sebesar Rp2.049.978.322,00.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Daerah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.977.190.860,33 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.015.530.424,72 berupa bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD). Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp20.912.202.407,56 yaitu terdiri dari

- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LRA sebesar Rp15.417.023.399,00
- Ditambah Pendapatan dari PDAM yang dihitung menggunakan metode ekuitas sebesar Rp4.543.475.510,00
- Ditambah pendapatan dari Bank TGR yang dihitung menggunakan metode ekuitas sebesar Rp516.561.678,00
- Dikurangi pendapatan PD BPR BKK Kabupaten Tegal yang dihitung menggunakan metode ekuitas sebesar Rp432.539.521,33.
- Ditambah piutang deviden bank jateng sebesar Rp9.475.580.450,00
- Ditambah piutang deviden Bank TGR sebesar Rp887.801.506,00
- Ditambah piutang deviden PDAM sebesar Rp3.006.151.962,00
- Ditambah piutang deviden PD BPR BKK Kabupaten Tegal sebesar Rp698.056.834,00

d. Lain – lain PAD Yang Sah - LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp397.451.657.968,07 dan Tahun 2020 sebesar Rp269.904.227.597,93 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 128 Pendapatan lain-lain PAD yang Sah – LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan -LO	659.716.500,00	236.047.060,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan- LO	416.666.667,00	366.667.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	1.965.081.713,00	3.605.240.387,00
4	Pendapatan Bunga - LO	10.728.356.029,00	8.471.506.786,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	723.518.871,07	14.500.000,00
6	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain-LO	7.610.000,00	
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	530.033.888,00	89.858.155,00
8	Pendapatan Denda Pajak - LO	14.101.332,00	127.069.276,33
9	Pendapatan Denda Retribusi - LO		671.985.000,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	341.845.500,00	197.500.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian -LO	260.796.990,00	1.753.759.074,00
12	Pendapatan BLUD - LO	381.735.882.478,00	252.438.217.290,60
13	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO		1.237.258.631,00
14	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO		128.566.666,00
15	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	68.048.000,00	29.300.000,00
16	Pendapatan dari sumber mata air - LO		536.752.272,00
Jumlah		397.451.657.968,07	269.904.227.597,93

Lain-lain PAD LO sebesar Rp397.451.657.968,07 terdiri dari

- Pendapatan Lain-lain PAD LRA sebesar Rp411.057.884.648,00
- Ditambah piutang 2020 sebesar Rp48.285.474.259,00
- Ditambah Peyesuaian Piutang 2020 karena reklasifikasi akun retribusi sebesar Rp18.300.000,00
- Ditambah pendapatan diterima dimuka 2020 sebesar Rp1.900.000.000,00
- Dikurangi Penyesuaian Piutang Denda pajak sebesar Rp1.721.033.144
- Dikurangi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp760.000,00
- Dikurangi pelunasan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp4.000.000,00
- Dikurangi Piutang Tahun 2020 sebesar Rp59.015.657.661,93,00
- Dikurangi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 sebesar Rp1.533.333.333,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- Dikurangi *Reciprocal account* pendapatan BLUD pada belanja Dinkes sebesar Rp1.535.216.800,00

2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.737.519.950.810,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.701.219.102.083,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Table 5.129 Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.528.673.522.168,00	1.467.101.650.639,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	18.742.708.000,00	64.411.379.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	190.103.720.642,00	169.706.072.444,00
Jumlah		1.737.519.950.810,00	1.701.219.102.083,00

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.528.673.522.168,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp1.467.101.650.639,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.130 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-pajak -LO	35.189.553.428,00	14.807.971.240,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-SDA -LO	2.775.545.551,00	10.866.299.722,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.077.039.778.000,00	1.086.704.382.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	125.814.842.815,00	64.753.862.628,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	287.853.802.374,00	289.969.135.049,00
Jumlah		1.528.673.522.168,00	1.467.101.650.639,00

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah pendapatan Transfer Dana Penyesuaian. Pendapatan Transfer Dana Penyesuaian -LO untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.742.708.000,00 berupa Pendapatan Dana Insentif Daerah dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp64.411.379.000,00 berupa Dana Insentif Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp190.103.720.642,00 dan Tahun 2019 sebesar Rp169.706.072.444,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.131 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	171.144.434.642,00	165.142.863.444,00
2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	18.959.286.000,00	4.563.209.000,00
Jumlah		190.103.720.642,00	169.706.072.444,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya –LO 2020 sebesar Rp190.073.720.642,00 terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA sebesar Rp205.579.747.851,00
- Ditambah Piutang Transfer 2021 sebesar Rp2.061.747.513,00
- Dikurangi Piutang 2020 sebesar Rp17.537.774.722,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah –LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp184.871.410.852,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp182.870.404.282,10 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. 132 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Pendapatan Hibah - LO	36.230.452.752,00	182.870.404.282,10
2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan -LO	148.640.958.100,00	
Jumlah		184.871.410.852,00	182.870.404.282,10

a. Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah – LO Kabupaten Tegal adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp36.230.452.752,00 dan Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

sebesar Rp182.870.404.282,10 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.133 Pendapatan Hibah – LO

No.	Uraian	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	7.299.484.562,00	19.368.706.715,10
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	11.921.596.640,00	420.990.148,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	16.736.371.550,00	0,00
4	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	273.000.000,00	12.335.695.773,00
5	Pendapatan Hibah BOS		150.745.011.646,00
Jumlah		36.230.452.752,00	182.870.404.282,10

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah –LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah LO TA 2021 sebesar Rp7.299.484.562,00 adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) sebesar Rp5.539.153.846,00
- Pendapatan Hibah dari BKKBN sebesar Rp1.742.252.216,00
- Pendapatan Hibah aset dari kementerian Investasi/ Badan Koordinasi penanaman Modal sebesar Rp18.078.500,00

Pendapatan Hibah Dari pemerintah –LO TA 2020 sebesar Rp19.368.706.715,10 adalah sebagai berikut:

- pendapatan Hibah air Minum Perkotaan sebesar Rp4.500.000.000,00,
- Pendapatan Hibah Renovasi GOR Trisanja Slawi dari Kementerian Pemuda dan Olah raga sebesar Rp2.326.717.150,00,
- Hibah dari BKKBN sebesar Rp636.400.442,50,
- Hibah dari BPPT Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp9.815.962.400,00 d
- Hibah dari Kementerian Pendidikan pada Dinas Dikbud sebesar Rp2.089.626.722,60

2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapaatan Hibah dari Pemrintah Daerah Lainnya -LO TA 2021 sebesar Rp11.921.596.640,00 merupakan pendapatan hibah dari pemerintah provinsi dalamrangka penanganan Covid 19 dengan rincian sebagai berikut:

- Hibah dari Dinas Kesehatan sebesar Rp10.485.215.640,00
- Hibah dari BNPB sebesar Rp1.436.381.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO TA 2020 merupakan Hibah dari BPPT Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp420.990.148,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan – LO
Pendapatan Hibah dari kelompok Masyarakat/perorangan – LO TA 2021 sebesar Rp16.763.371.550,00 adalah sebagai berikut:

- Hibah Bangunan Gedung Produksi di UPTD LIK sebesar Rp15.505.025.000,00.
- Hibah Peralatan dan Mesin dari Komite sekolah sebesar Rp1.231.346.550,00

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan –LO TA 2020 merupakan hibah atas sumbangan dalam penanganan dan pencegahan COVID 19 sebesar Rp12.335.695.773,00 yang diterima oleh OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134 Pendapatan Hibah dari kelompok/Masyarakat/Perorangan - LO

No	OPD	Nominal (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.011.042,00
2	Dinas Kesehatan	9.237.892.117,00
3	RSUD Dr.Soeselo	898.532.122,00
4	RSUD Suradadi	127.983.556,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	12.004.852,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	6.727.722,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.191.122,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	10.904.922,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	331.434.322,00
10	Dinas Sosial	62.883.852,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	314.267.642,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.474.052,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.219.522,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.832.322,00
15	Dinas Perhubungan	66.854.652,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.702.122,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.620.934,00
18	Dinas Pemuda ,Olah Raga dan Pariwisata	24.225.734,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.835.722,00
20	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	7.017.522,00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.076.452,00
22	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	373.272.128,00
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.375.652,00
24	Sekretariat Daerah	558.501.026,00
25	Sekretariat DPRD	4.769.322,00
26	Kecamatan Adiwerna	4.860.416,00
27	Kecamatan Balapulang	4.864.016,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Nominal (Rp)
28	Kecamatan Bojong	4.864.016,00
29	Kecamatan Bumijawa	4.808.516,00
30	Kecamatan Dukuhturi	4.901.216,00
31	Kecamatan Dukuhwaru	4.919.816,00
32	Kecamatan Jatinegara	5.620.016,00
33	Kecamatan Kedungbanteng	2.348.216,00
34	Kecamatan Kramat	4.826.816,00
35	Kecamatan Lebaksiu	4.826.816,00
36	Kecamatan Margasari	4.901.216,00
37	Kecamatan Pagerbarang	4.864.016,00
38	Kecamatan Pangkah	4.835.416,00
39	Kecamatan Slawi	5.608.016,00
40	Kecamatan Suradadi	3.251.216,00
41	Kecamatan Talang	4.826.816,00
42	Kecamatan Tarub	4.938.416,00
43	Kecamatan Warureja	4.901.216,00
44	Inspektorat	6.605.722,00
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	4.918.122,00
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	4.918.122,00
47	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.989.734,00
48	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	5.687.452,00
Jumlah		12.335.695.773,00

b) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan – LO merupakan pendapatan atas Penyaluran Dana BOS TA 2021 sebesar Rp148.640.958.100,00.

5.4.1.2. Beban

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.293.955.749.279,88 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.138.537.056.470,22 dengan rincian disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.135 Beban

No.	Beban	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Beban Pegawai	1.073.336.051.397,00	1.068.215.623.306,00
2	Beban Persediaan	113.372.546.711,74	88.508.893.618,26
3	Beban Jasa	608.851.204.576,50	432.559.750.597,46
4	Beban Pemeliharaan	32.437.066.497,00	31.810.959.975,00
5	Beban Perjalanan Dinas	24.742.748.705,00	24.265.753.912,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Beban	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
6	Beban Hibah	78.604.626.216,00	79.859.636.008,00
7	Beban Bantuan Sosial	3.944.114.747,00	5.676.330.000,00
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	213.866.833.804,04	262.713.478.613,39
9	Beban Penyisihan Piutang	10.974.867.509,60	8.567.418.591,11
10	Beban Lain - Lain	1.767.454.256,00	
11	Beban Transfer	132.058.234.860,00	136.359.211.849,00
	Jumlah	2.293.955.749.279,88	2.138.537.056.470,22

1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.073.336.051.397,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.068.215.623.306,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.136 Beban Pegawai

No.	Beban Pegawai	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
a.	Beban Gaji dan Tunjangan	639.909.234.081,00	629.514.208.346,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan	89.307.607.178,00	85.805.436.207,00
c.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	232.802.001.190,00	258.740.629.873,00
d.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	31.344.365.834,00	24.919.440.204,00
e.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	267.816.249,00	147.715.308,00
f.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.043.120.000,00	1.003.120.000,00
g.	Beban Pegawai BOS	40.263.227.750,00	37.953.847.500,00
h.	Beban Pegawai BLUD	38.398.679.115,00	28.527.138.868,00
i.	Beban Uang Lembur	0,00	1.604.087.000,00
	Jumlah	1.073.336.051.397,00	1.068.215.623.306,00

a. Beban Gaji dan Tunjangan – LO

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan - LO untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp639.909.234.081,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp629.514.208.346,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.137 Beban Gaji dan Tunjangan

No.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1)	Beban Gaji Pokok ASN	475.150.970.180,00	485.047.819.475,00
2)	Beban Tunjangan Keluarga ASN	44.024.653.545,00	45.363.184.885,00
3)	Beban Tunjangan Jabatan ASN	7.113.582.900,00	7.186.277.000,00
4)	Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.061.913.000,00	33.028.442.000,00
5)	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.790.537.000,00	7.287.758.000,00
6)	Beban Tunjangan Beras ASN	25.706.197.795,00	22.174.510.893,00
7)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.732.193.626,00	2.624.679.645,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
	ASN		
8)	Beban Pembulatan Gaji ASN	6.398.204,00	6.130.851,00
9)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	39.436.143.226,00	22.817.830.924,00
10)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	972.488.385,00	3.977.574.673,00
11)	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.914.156.220,00	
	Jumlah	639.909.234.081,00	629.514.208.346,00

b. Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO

Jumlah Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp89.307.607.178,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp85.805.436.207,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.138 Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO

No.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1)	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	89.106.207.178,00	85.601.636.207,00
2)	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	170.500.000,00	
3)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	30.900.000,00	
4)	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya -LO		203.800.000,00
	Jumlah	89.307.607.178,00	85.805.436.207,00

c. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Jumlah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp232.802.001.190,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp258.740.629.873,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.139 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya LO

No.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.785.180.000,00	4.209.787.000,00
2)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	678.874.086,00	570.341.741,00
3)	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	215.987.051.520,00	197.106.059.000,00
4)	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.326.474.000,00	
5)	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	905.500.000,00	510.000.000,00
6)	Beban Honorarium	6.903.981.584,00	56.344.442.132,00
7)	Beban Jasa Pengelolaan BMD	1.214.940.000,00	
	Jumlah	232.802.001.190,00	258.740.629.873,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan DPRD untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp31.344.365.834,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.919.440.204,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.140 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

No.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1)	Beban Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	955.080.000,00
2)	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	114.714.600,00	96.175.800,00
3)	Beban Tunjangan Beras DPRD	133.397.640,00	130.790.520,00
4)	Beban Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.508.000,00
5)	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.384.866.000,00
6)	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	147.621.600,00	14.433.300,00
7)	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00
8)	Beban Tunjangan Reses DPRD	2.175.600.000,00	1.455.300.000,00
9)	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	550.442,00	495.396,00
10)	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.193.822.272,00	6.446.791.188,00
11)	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	7.933.214.280,00	5.520.000.000,00
Jumlah		31.344.365.834,00	24.919.440.204,00

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKD untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp267.816.249,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp147.715.308,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5.141 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1)	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	46.800.000,00
2)	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.704.000,00	4.032.000,00
3)	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	84.240.000,00
4)	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	6.083.280,00
5)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.374.752,00	761.068,00
6)	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	120,00	560,00
7)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.402.880,00	5.349.120,00
8)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	449.280,00
9)	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	
10)	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	95.908.057,00	
Jumlah		267.816.249,00	147.715.308,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO

Jumlah Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.043.120.000,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.003.120.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.142 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH –LO

No.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1)	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00
2)	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	650.000.000,00	610.000.000,00
Jumlah		1.043.120.000,00	1.003.120.000,00

g. Beban Pegawai BOS

Jumlah Beban Pegawai BOS- LO untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp40.263.227.750,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp37.953.847.500,00.

h. Beban Pegawai BLUD

Jumlah Beban Pegawai BLUD- LO untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.398.679.115,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp28.527.138.868,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.143 Beban Pegawai BLUD – LO

No.	Beban Pegawai BLUD - LO	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1)	Puskesmas Danasari	305.500.173,00	310.045.324,00
2)	Puskesmas Kesamiran	240.901.780,00	235.221.827,00
3)	Puskesmas Margasari	533.659.550,00	594.513.551,00
4)	Puskesmas Kesambi	435.679.179,00	335.891.059,00
5)	Puskesmas Bumijawa	731.437.290,00	728.766.139,00
6)	Puskesmas Bojong	534.807.616,00	495.792.043,00
7)	Puskesmas Balapulang	1.230.496.868,00	1.097.770.732,00
8)	Puskesmas Kalibakung	253.796.823,00	314.834.369,00
9)	Puskesmas Pagerbarang	268.108.907,00	252.775.000,00
10)	Puskesmas Lebaksiu	546.611.782,00	499.232.680,00
11)	Puskesmas Kambangan	256.716.127,00	304.348.500,00
12)	Puskesmas Jatinegara	508.058.560,00	472.417.040,00
13)	Puskesmas Kedungbanteng	411.371.102,00	442.746.826,00
14)	Puskesmas Pangkah	381.145.978,00	426.749.640,00
15)	Puskesmas Penusupan	333.752.374,00	377.511.000,00
16)	Puskesmas Slawi	309.591.293,00	340.542.960,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Beban Pegawai BLUD - LO	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
17)	Puskesmas Adiwerna	313.869.985,00	324.572.520,00
18)	Puskesmas Pagiyanten	250.504.123,00	283.055.848,00
19)	Puskesmas Talang	334.685.273,00	376.868.944,00
20)	Puskesmas Kaladawa	386.339.678,00	325.271.578,00
21)	Puskesmas Dukuhturi	404.490.000,00	432.155.500,00
22)	Puskesmas Kupu	206.019.265,00	216.150.448,00
23)	Puskesmas Dukuhwaru	348.285.254,00	327.046.964,00
24)	Puskesmas Tarub	696.613.752,00	712.933.570,00
25)	Puskesmas Kramat	333.006.008,00	359.678.172,00
26)	Puskesmas Bangungalih	400.592.650,00	198.961.640,00
27)	Puskesmas Suradadi	378.677.933,00	274.401.006,00
28)	Puskesmas Jatibogor	458.406.640,00	413.019.340,00
29)	Puskesmas Warurejo	586.893.065,00	627.356.000,00
30)	RSUD dr Soeselo Slawi	21.075.600.087,00	11.039.706.180,00
31)	RSUD Suradadi	4.943.060.000,00	5.386.802.468,00
Jumlah		38.398.679.115,00	28.527.138.868,00

i. Beban Uang Lembur – LO

Jumlah Beban Uang Lembur - LO untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.604.087.000,00 berupa beban uang lembur PNS sebesar Rp1.214.184.500,00 dan beban uang lembur non PNS sebesar Rp389.902.500,00.

2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp113.372.546.711,74 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp88.508.893.618,26 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.13

3. Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp608.851.204.576,50 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp432.559.750.597,46 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.144 Beban Jasa

No.	Beban Jasa	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
a.	Beban Jasa Kantor	207.494.189.365,00	144.335.903.837,00
b.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	38.823.356.816,00	1.442.553.341,00
c.	Beban Sewa Tanah	2.000.000,00	-
d.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.747.001.280,00	1.851.367.000,00
e.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.102.089.250,00	384.042.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Beban Jasa	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
f.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	23.674.000,00	-
g.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	6.571.893.500,00	-
h.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.726.796.360,00	-
i.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	56.941.000,00	-
j.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.848.845.620,00	3.205.573.869,00
k.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.399.016.700,00	1.630.600.000,00
l.	Beban Barang BOS	93.194.396.465,00	90.575.556.631,00
m.	Beban Barang BLUD	237.861.004.220,50	182.965.364.529,46
n.	Beban Barang Ekstrakomptabel		75.767.080,00
m.	Beban Jasa Konsultasi		6.093.022.310,00
	Jumlah	608.851.204.576,50	432.559.750.597,46

a. Beban Jasa Kantor

Jumlah Beban Jasa Kantor untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp207.494.189.365,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp144.335.903.837,00 dengan rincian disajikan dalam lampiran 5.14

b. Beban Premi Asuransi

Jumlah Beban Premi Asuransi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.823.356.816,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.442.553.341,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.145 Beban Premi Asuransi

No.	Beban Premi Asuransi	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1)	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.226.119.088,00	
2)	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	34.248.599.188,00	
3)	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.130.996.298,00	
4)	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	175.220.240,00	
5)	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	42.422.002,00	
6)	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan		1.209.440.175,00
7)	Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan		233.113.166,00
	Jumlah	38.823.356.816,00	1.442.553.341,00

c. Beban Sewa Tanah

Jumlah Beban Sewa Tanah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.000.000,00 berupa beban sewa lapangan lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

d. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Jumlah Beban Sewa Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.747.001.280,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.851.367.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.146 Beban Sewa Peralatan Mesin

No.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1)	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	49.250.000,00	68.898.000,00
2)	Beban Sewa Electric Generating Set	3.500.000,00	1.000.000,00
3)	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	1.000.000,00	
4)	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	505.271.723,00	292.149.000,00
5)	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.200.000,00	
6)	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kerja	5.580.000,00	
7)	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.797.357,00	
8)	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	868.550.000,00	1.169.820.000,00
9)	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	124.800.000,00	254.870.000,00
10)	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	31.140.000,00	
11)	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	832.000,00	64.630.000,00
12)	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	1.120.000,00	
13)	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	482.318.950,00	
14)	Beban Sewa System/Power Supply	2.500.000,00	
15)	Beban Sewa Peralatan Umum	3.184.000,00	
16)	Beban Sewa Komputer Jaringan	408.000.000,00	
17)	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	49.591.250,00	
18)	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	189.816.000,00	
19)	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan	11.550.000,00	
Jumlah		2.747.001.280,00	1.851.367.000,00

e. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Jumlah Beban Sewa Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.102.089.250,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp384.042.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.147 Beban Sewa Gedung dan Bangunan

No.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1)	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	880.764.000,00	273.452.000,00
2)	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	221.325.250,00	110.590.000,00
Jumlah		1.102.089.250,00	384.042.000,00

f. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Jumlah Beban Sewa Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp23.674.000,00 berupa sewa alat peraga kesenian.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

g. Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

Jumlah Beban Jasa Konsultansi Konstruksi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp6.571.893.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.148 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi

No.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Saldo 2021 (Rp)
1)	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	288.140.000,00
2)	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	433.700.000,00
3)	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	5.533.796.500,00
4)	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	25.000.000,00
5)	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	95.187.000,00
6)	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	16.880.000,00
7)	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	179.190.000,00
Jumlah		6.571.893.500,00

h. Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi

Jumlah Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.726.796.360,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.149 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Saldo 2021 (Rp)
1)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	74.855.000,00
2)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.022.182.560,00
3)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	79.975.000,00
4)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	375.363.000,00
5)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	19.298.400,00
6)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	29.700.000,00
7)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	355.000.000,00
8)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	770.422.400,00
Jumlah		2.726.796.360,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

i. Beban Jasa Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment)

Jumlah Beban Jasa Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment) untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp56.941.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.150 Beban Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment)

No.	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment)	Saldo 2021 (Rp)
1)	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment) Infrastruktur Air Minum	786.000,00
2)	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (AVaibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	56.155.000,00
Jumlah		56.941.000,00

j. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp13.848.845.620,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.205.573.869,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.151 Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1)	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	5.192.772.795,00	2.687.673.869,00
2)	Beban Sosialisasi	7.136.667.700,00	-
3)	Beban Bimbingan Teknis	1.519.405.125,00	512.500.000,00
4)	Beban Ujian		5.400.000,00
Jumlah		13.848.845.620,00	3.205.573.869,00

k. Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Jumlah Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.399.016.700,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.630.600.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.152 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

No.	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1)	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	4.399.016.700,00	5.550.000,00
2)	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat		1.625.050.000,00
Jumlah		4.399.016.700,00	1.630.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

l. Beban Barang Bos

Jumlah Beban Barang Jasa BOS untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp93.194.396.465,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp90.575.556.631,00

m. Beban Barang BLUD

Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp237.861.004.220,50 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp182.965.364.529,46 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.153 Beban Barang dan Jasa BLUD

No.	Beban Barang dan Jasa BLUD	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1)	Puskesmas Danasari	982.916.906,29	848.069.431,07
2)	Puskesmas Kesamiran	1.193.467.072,04	1.160.166.882,15
3)	Puskesmas Margasari	2.853.030.663,62	2.927.770.825,46
4)	Puskesmas Kesambi	1.512.920.053,05	1.441.257.046,68
5)	Puskesmas Bumijawa	4.463.895.029,18	4.082.582.841,35
6)	Puskesmas Bojong	2.092.651.440,94	2.269.084.908,61
7)	Puskesmas Balapulang	2.464.928.134,24	2.841.805.289,95
8)	Puskesmas Kalibakung	2.000.945.831,35	1.796.185.660,32
9)	Puskesmas Pagerbarang	2.103.395.559,77	2.009.066.200,79
10)	Puskesmas Lebaksiu	2.525.813.353,91	1.522.577.385,50
11)	Puskesmas Kambangan	1.934.567.680,79	1.285.684.184,55
12)	Puskesmas Jatinegara	2.979.244.521,74	3.397.053.764,62
13)	Puskesmas Kedungbanteng	2.074.699.638,49	2.010.198.316,54
14)	Puskesmas Pangkah	2.420.968.581,62	2.271.428.932,59
15)	Puskesmas Penusupan	1.492.941.350,74	1.656.279.333,39
16)	Puskesmas Slawi	1.768.088.552,33	2.159.819.114,96
17)	Puskesmas Adiwerna	2.287.400.664,43	2.397.433.674,37
18)	Puskesmas Pagiyanten	1.706.091.065,36	1.934.206.388,47
19)	Puskesmas Talang	1.490.880.500,22	1.506.436.162,78
20)	Puskesmas Kaladawa	1.479.156.347,34	1.317.987.665,67
21)	Puskesmas Dukuhturi	1.930.182.893,64	1.789.973.857,60
22)	Puskesmas Kupu	1.031.704.475,77	941.375.328,76
23)	Puskesmas Dukuhtarwu	2.528.448.193,55	2.615.721.206,96
24)	Puskesmas Tarub	2.024.031.038,08	2.572.841.040,22
25)	Puskesmas Kramat	1.502.316.469,57	1.294.402.331,80
26)	Puskesmas Bangungalih	1.365.897.054,96	1.054.302.418,24
27)	Puskesmas Suradadi	1.688.820.441,03	1.659.385.210,55



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Beban Barang dan Jasa BLUD	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
28)	Puskesmas Jatibogor	1.694.103.582,36	1.741.550.806,62
29)	Puskesmas Wanurejo	2.848.761.216,02	2.842.796.917,18
30)	RSUD dr Soeselo Slawi	132.302.318.893,00	108.445.191.532
31)	RSUD Suradadi	47.116.417.015,07	17.172.729.869,71
Jumlah		237.861.004.220,50	182.965.364.529,46

n. Beban Barang Ekstrakomptabel

Jumlah Beban Barang Ekstrakomptabel untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp75.767.080,00.

o. Beban Jasa Konsultansi

Jumlah Beban Jasa konsultansi untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp6.093.022.310,00:

Tabel 5.154 Beban Jasa Konsultansi

No.	Beban Jasa Konsultansi	Saldo 2020 (Rp)
1)	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	120.436.000,00
2)	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	4.884.726.660,00
3)	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	181.854.100,00
4)	Beban Jasa Konsultansi Lainnya	906.005.550,00
Jumlah		6.093.022.310,00

4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp32.437.066.497,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp31.810.959.975,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.155 Beban Pemeliharaan

No.	Beban Pemeliharaan	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
a.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	-	7.467.459.705,00
b.	Beban Pemeliharaan	32.437.066.497,00	24.343.500.270,00
Jumlah		32.437.066.497,00	31.810.959.975,00

a. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Jumlah Beban Perawatan Kendaraan Bermotor untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.467.459.705,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.156 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

No.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	Saldo 2020 (Rp)
1)	Beban Jasa Service	1.660.159.017,00
2)	Beban Penggantian Suku Cadang	1.792.305.788,00
3)	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.578.797.480,00
4)	Beban Jasa KIR	6.435.000,00
5)	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	206.755.700,00
6)	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	223.006.720,00
Jumlah		7.467.459.705,00

b. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp32.437.066.497,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.343.500.270,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.157 Beban Pemeliharaan

No.	Beban Pemeliharaan	Saldo 2020 (Rp)	Saldo 2019 (Rp)
1)	Beban Pemeliharaan Tanah	34.945.516,00	
2)	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.734.042.582,00	2.751.042.737,00
3)	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.394.471.498,00	5.167.707.330,00
4)	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19.254.481.901,00	16.315.225.930,00
5)	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	19.125.000,00	109.524.273,00
Jumlah		32.437.066.497,00	24.343.500.270,00

5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.742.748.705,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.265.753.912,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.158 Beban Perjalanan Dinas

No.	Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.742.748.705,00	6.310.036.970,00
2)	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah		17.955.716.942,00
Jumlah		24.742.748.705,00	24.265.753.912,00

6. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp78.604.626.216,00 sedangkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp79.859.636.008,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.159 Beban Hibah

No.	Beban Hibah	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1)	beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	17.708.729.200,00	614.850.000,00
2)	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.692.747.496,00	376.153.300,00
3)	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.203.149.520,00	0,00
4)	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		41.629.456.008,00
Jumlah		78.604.626.216,00	79.859.636.008,00

7. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.944.114.747,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.676.330.000,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 160 Beban Bantuan Sosial

No.	Beban Bantuan sosial	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1)	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.658.500.000,00	
2)	Bantuan Sosial kepada Masyarakat	2.285.614.747,00	5.581.950.000,00
3)	Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan		94.380.000,00
Jumlah		3.944.114.747,00	5.676.330.000,00

8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp213.866.833.804,04 dan Tahun anggaran 2020 Rp262.713.478.613,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 161 Beban penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
1)	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	77.529.873.572,18	73.391.952.927,04
2)	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.528.890.410,75	24.280.390.206,00
3)	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.525.690.221,00	164.694.449.115,49
4)	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	3.206.740,00
5)	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	282.379.600,11	343.479.624,86
JUMLAH		213.866.833.804,04	262.713.478.613,39



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

9. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2021 sebesar Rp10.974.867.509,60 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.567.418.591,11 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 162 Beban Penyisihan Piutang

No.	Beban Penyisihan Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	3.067.145.402,05	160.537.495,78
2)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	80.787.872,50	135.406.750,25
3)	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.337.953,76	
4)	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	7.733.787.543,72	7.912.693.498,63
5)	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		271.091.972,84
6)	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	10.308.737,57	87.688.873,61
7)	Beban Penyisihan Piutang Lainnya - LO	12.500.000,00	
	Jumlah	10.974.867.509,60	8.567.418.591,11

10. Beban Lain-lain

Jumlah beban lain-lain untuk tahun 2021 sebesar Rp1.767.454.256,00 merupakan beban ekstrakomptabel aset yang tidak memenuhi batas kapitalisasi minimal.

11. Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk tahun 2021 sebesar Rp132.058.234.860,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp136.359.211.849,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 163 Beban Transfer

No	Beban Transfer	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)
a.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.826.401.862,00	8.606.399.629,00
b.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		1.545.162.700,00
c.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	113.076.832.998,00	125.000.000.000,00
d.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.155.000.000,00	1.207.649.520,00
	JUMLAH	132.058.234.860,00	136.359.211.849,00

5.4.2. KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.2.1. Defisit Non Operasional

Jumlah Defisit Non Operasional ini merupakan defisit atas penghapusan aset yaitu sebesar nilai buku aset saat dihapuskan, untuk tahun 2021 sebesar Rp4.469.581.120,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp3.639.221.939,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.4.3. POS LUAR BIASA

5.4.2.1. Beban Luar Biasa

Pos beban Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah. Beban luar biasa Tahun 2020 sebesar Rp16.270.219.783,00 dan tahun 2021 sebesar Rp5.438.998.750,00 merupakan beban yang berasal dari belanja tidak terduga, Rincian Beban Luar Biasa sebesar Rp5.438.998.750,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 164 Beban Luar Biasa

NO	OPD	Uraian	Belanja BTT	Reklas Beban Operasi	Reklas Aset Tetap	Baban Luar Biasa
1	Dinas Sosial	Pembayaran BTT Kegiatan Jaring Pengaman Sosial bagi Warga Terdampak Penerapan PPKM Darurat Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	628.583.000,00	628.583.000,00		-
		Pembayaran BTT Kegiatan Biaya Perawatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah KabTegal Tahun2021	27.031.747,00	27.031.747,00		-
2	Dinas Perhubungan	Pembayaran BTT Kegiatan Pengamanan dan Pembatasan Mobilitas selama Penerapan PPKM Darurat Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	254.920.000,00	254.920.000,00		-
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembayaran BTT Kegiatan Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	454.322.476,00	272.846.220,00	181.476.256,00	-
		Pembayaran BTT Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Covid 19 untuk Operasional Vaksinasi (Serbuan vaksin)	776.029.200,00		7.198.400,00	768.830.800,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Dermasuci Kec. Pangkah	202.859.950,00			202.859.950,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Sokatengah Kec. Bumijawa	393.137.450,00			393.137.450,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Wotgalih Kec. Jatinegara	652.983.350,00			652.983.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	OPD	Uraian	Belanja BTT	Reklas Beban Operasi	Reklas Aset Tetap	Baban Luar Biasa
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Batuangung Kec. Balapulang	650.755.450,00			650.755.450,00
		Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Kalibakung Kec. Balapulang	2.682.051.500,00			2.682.051.500,00
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pembayaran BTT Kegiatan Pasar Sehat dengan Protokol Kesehatan Kab. Tegal untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Tahun 2021	239.530.500,00	239.530.500,00		-
5	Dinas Kesehatan	Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Covid 19 untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	1.741.102.300,00	1.741.102.300,00		-
		Pembayaran BTT Kegiatan Kesehatan Lingkungan untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	81.836.860,00	81.836.860,00		-
		Pembayaran BTT Kegiatan Pengadaan APD untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	826.408.500,00	826.408.500,00		-
		Pembayaran BTT Kegiatan Pemasangan Daya Listrik Rumkit DKT IV Pagongan untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Kab. Tegal Tahun 2021	54.091.900,00	54.091.900,00		-
		Pembayaran BTT Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat di Kab. Tegal untuk Percepatan Penanganan Covid 19 Tahun 2021	640.478.942,00	512.248.312,00	128.230.630,00	-
6	Dinas Perkimtaru	Pembayaran BTT Kegiatan Penanganan Bencana Tanah Longsor Dk Bulakwaru Desa Bumijawa Kec. Bumijawa	88.380.250,00			88.380.250,00
7	BAPPENDA	Pembayaran Biaya Pengembalian Pembayaran Pajak BPHTB yang telah disetor ke Kas Umum Daerah Kab. Tegal	9.830.400,00	9.830.400,00		-
JUMLAH			10.404.333.775,00	4.648.429.739,00	316.905.286,00	5.438.998.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan kas dan pengeluaran kas selama Tahun 2021 dan 2020, meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Saldo akhir kas TA 2021 sebesar Rp297.069.947.496,02 dan TA 2020 sebesar Rp218.140.814.081,02 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.165 Laporan Arus Kas

Arus Kas dari :	2021 Realisasi (Rp)	2020 Realisasi (Rp)
1. Aktivitas Operasi	454.113.069.156,00	393.583.537.759,08
2. Aktivitas Investasi	(372.683.660.911,00)	(264.480.929.035,00)
3. Aktivitas Pendanaan	(2.500.000.000,00)	(1.389.900.476,00)
4. Aktivitas Transitoris	(408.740.760,00)	95.650.284,98
Kenaikan /Penurunan Kas	78.520.667.485,00	127.808.358.533,06
Saldo Awal Kas	218.069.021.315,02	90.260.439.948,96
Saldo Akhir Kas	296.589.688.800,02	218.069.021.315,02
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	23.433.500,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	480.258.696,00	48.359.266,00
Saldo Akhir Kas	297.069.947.496,02	218.140.814.081,02

5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2021 surplus sebesar Rp454.113.168.951,00 dan tahun 2020 surplus sebesar Rp393.583.537.759,08 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.861.899.649.552,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.650.145.668.328,60 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 166 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Arus Masuk Kas		2021 (Rp)	2020 (Rp)
	Pendapatan Pajak Daerah	143.617.868.928,00	125.236.006.697,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	20.911.507.338,00	19.290.694.924,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.417.023.399,00	14.185.195.523,00
	Lain-lain PAD yang Sah	410.398.168.148,00	279.593.722.494,60
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.533.598.637.942,00	1.477.714.812.445,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	378.196.584.000,00	64.411.379.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	205.579.747.851,00	155.749.360.494,00
	Pendapatan Hibah	5.539.153.846,00	155.652.543.751,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	148.640.958.100,00	358.311.953.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.861.899.649.552,00	2.650.145.668.328,60

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.407.786.580.396,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.256.562.130.569,52 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.167 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Pegawai	1.072.594.469.688,00	1.068.550.795.583,00
Belanja Barang	763.648.877.353,00	571.116.366.806,52
Bunga	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00
Hibah	66.338.288.720,00	38.230.180.000,00
Bantuan Sosial	3.288.500.000,00	5.676.330.000,00
Belanja Tak Terduga	10.404.333.775,00	78.317.293.331,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11.826.401.862,00	10.151.562.329,00
Transfer Bantuan keuangan	479.685.708.998,00	484.519.602.520,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	2.407.786.580.396,00	2.256.562.130.569,52

5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2021 defisit sebesar Rp372.683.660.911,00 dan tahun 2020 defisit sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Rp264.480.929.035,00 mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus kas bersih aktivitas investasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri dari :

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp693.801.180,00 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp345.889.815,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini ;

Tabel 5.168 Arus Masuk Kas Dari Investasi

Arus Masuk Kas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Pendapatan Penjualan atas Tanah	36.510.000,00	
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	323.160.000,00	18.040.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	146.682.060,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.304.000,00	
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	263.742.500,00	57.505.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	34.084.680,00	13.820.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non permanen	36.510.000,00	109.842.755,00
Jumlah Arus Masuk Kas	693.801.180,00	345.889.815,00

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp373.377.462.091,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp264.826.818.850,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.169 Arus Keluar Kas Dari Investasi

Arus Keluar Kas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan		
Belanja Tanah	384.882.542,00	255.437.200,00
Belanja Peralatan dan Mesin	94.646.809.885,00	66.491.340.472,00
Belanja Gedung dan Bangunan	128.622.796.811,00	68.664.014.835,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	143.805.033.653,00	100.236.614.296,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.417.939.200,00	13.330.412.047,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00	15.849.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		
Jumlah Arus Keluar Kas	373.377.462.091,00	264.826.818.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2021 defisit sebesar Rp2.500.000.000,00 dan tahun 2020 defisit sebesar Rp1.389.900.476,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas pembiayaan, yaitu:

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.500.000.000,00 berupa pemnerian pinjaman daerah dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.389.900.476,00 berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Realisasi aktivitas transitoris TA 2021 sebesar (Rp453.182.205,00) dan TA 2020 sebesar Rp95.650.284,98 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp166.525.276.870,00 dan Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp136.087.677.120,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.170 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
~ luran wajib Pegawai	82.461.355.688,00	44.311.392.144,00
~ Tabungan Uang Muka Perumahan		629.143.000,00
~ Subsidi Askes		24.211.281.626,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	37.807.727.173,00	33.874.469.270,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.563.526.181,00	1.326.161.596,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	314.486.948,00	238.723.223,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25		0
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	5.175.673.877,00	3.143.411.936,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26		0
~ Pajak PPN	35.163.844.095,00	24.197.623.365,00
~ BPJS Ketenagakerjaan	3.896.262.642,00	3.987.192.712,00
~ Lainnya	94.041.000,00	
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		100.899.992,00
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	48.359.266,00	67.378.256,00
Penerimaan Koreksi	44.441.445,00	
Jumlah Arus Masuk Kas	166.569.718.315,00	136.087.677.120,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp166.978.459.075,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp135.992.026.835,02 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.171 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas.	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		
~ luran wajib Pegawai	82.461.355.688,00	44.311.392.144,00
~ Tabungan Uang Muka Perumahan		629.143.000,00
~ Subsidi Askes		24.211.281.626,00
~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan	37.807.727.173,00	33.853.186.495,00
~ Pajak Penghasilan pasal 22	1.563.526.181,00	1.326.161.596,00
~ Pajak Penghasilan pasal 23	314.486.948,00	238.723.223,00
~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00
~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	5.175.673.877,00	3.143.411.936,00
~ Pajak Penghasilan pasal 26		0
~ Pajak PPN	35.163.844.095,00	24.197.623.365,00
~ BPJS Ketenagakerjaan	3.896.262.642,00	3.987.192.712,00
~ Lainnya	94.041.000,00	
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		23.433.500,00
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan	480.258.696,00	48.359.266,00
Pengeluaran Koreksi	21.282.775,00	22.117.972,02
Jumlah Arus Keluar Kas	166.978.459.075,00	135.992.026.835,02

Posisi Kas akhir TA 2021 sebesar Rp297.069.947.496,02 dan TA 2020 sebesar Rp218.140.814.081,02 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.172. Saldo Akhir Kas

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kenaikan /Penurunan Kas	78.520.667.485,00	127.808.358.533,06
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & BOS	218.069.021.315,02	90.260.439.948,96
Saldo Awal Kas BUD	149.021.313.468,00	51.565.336.774,00
Saldo Awal Kas di BLUD	67.841.620.782,02	34.146.113.382,96
Saldo Awal Kas BOS	1.205.864.232,00	4.548.989.792,00
Saldo Awal Kas lainnya	222.833,00	
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & BOS	296.589.688.800,02	218.069.021.315,02
Saldo Akhir Kas BUD (Kas Daerah)	149.801.598.185,00	149.021.313.468,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	146.587.554.125,02	67.841.620.782,02
Saldo Akhir Kas BOS	200.413.452,00	1.184.581.457,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Saldo Akhir Kas lainnya	123.038,00	222.833,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		23.433.500,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	480.258.696,00	48.359.266,00
Saldo Akhir Kas	297.069.947.496,02	218.140.814.081,02

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Tahun 2020 sebesar Rp3.567.018.723.558,27

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit-LO merupakan saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp20

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulasi Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar merupakan koreksi ekuitas lainnya yaitu sebesar Rp6.514.372.870,40 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 173 Koreksi Ekuitas

No	Uraian	tambah	kurang	saldo akhir
1	Koreksi amortisasi aset tak berwujud	47.043.750,00	11.790.625,00	35.253.125,00
2	Koreksi penyisihan piutang	10.208.719.443,40	4.818.180,00	10.203.901.263,40
3	Koreksi piutang	1.721.033.144,00	1.951.367.546,00	(230.334.402,00)
4	Koreksi akumulasi penyusutan	40.564.389,00	3.574.303.344,00	(3.533.738.955,00)
5	Koreksi pengakuan TGR	39.291.839,00		39.291.839,00
	jumlah	12.056.652.565,40	5.542.279.695,00	6.514.372.870,40

1. Koreksi Amortisasi Aset Tak berwujud

- Koreksi tambah atas amortisasi aset tak berwujud pada Dinas Kominfo sebesar Rp47.043.750,00
- Koreksi kurang atas akumulasi amortisasi aset tak berwujud pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp11.790.625,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

2. Koreksi Penyisihan Piutang

- Koreksi tambah atas penyisihan piutang BLUD pada RSUD dr Soeselo Slawi sebesar Rp5.854.631.599,00
- Koreksi tambah atas penyisihan piutang BLUD pada RSUD Suradadi sebesar Rp1.037.788.391,08
- Koreksi tambah atas penyisihan piutang DPU sebesar Rp129.366,93
- Koreksi tambah atas penyisihan piutang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp130.348,73
- Koreksi tambah atas penyisihan piutang Dinas PMPTSP sebesar Rp114.860,25
- Koreksi tambah atas penyisihan piutang Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp4.879.500,00
- Koreksi tambah atas penyisihan piutang pemakaian kekayaan daerah pada BPKAD sebesar Rp3.153.500,00
- Koreksi tambah atas penyisihan piutang transfer DBH pemerintah Pusat sebesar Rp271.091.972,84
- Koreksi tambah atas penyisihan piutang transfer pemerintah provinsi sebesar Rp87.688.873,61
- Koreksi tambah atas penyisihan piutang pajak BAPENDA sebesar Rp2.914.266.350,96
- koreksi tambah atas penyisihan piutang dana bergulir sebesar Rp34.844.680,00
- Koreksi kurang atas penyisihan Piutang pada Dinas Perhubungan sebesar Rp4.818.180,00

3. Koreksi Piutang

- koreksi tambah atas piutang denda pajak pada BAPENDA sebesar Rp1.721.033.144,00
- Koreksi kurang atas penghapusan piutang pajak PBB sebesar Rp1.951.367.546,00

4. Koreksi Akumulasi Penyusutan

- Koreksi tambah atas penambahan masa manfaat akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp40.564.389,00
- Koreksi kurang atas kapitalisasi reklas ke aset lainnya sebesar Rp28.131.956,00
- Koreksi kurang atas kapitaliasasi aset tetap sebesar Rp3.546.171.3888,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

5. Koreksi pengakuan Tuntutan Ganti Rugi

- Koreksi tambah atas pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp39.291.839,00

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp3.797.570.564.576,19 merupakan jumlah Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit – LO ditambah dengan koreksi-koreksi.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI DAU 8% DAN REALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19

Tahun 2021 adalah Tahapan Kedua bagi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2019 – 2024 dimana Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2021 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dimana Temanya “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas” Namun dengan munculnya pandemi Covid-19 dan upaya penanggulangannya, maka terjadi perubahan Tema RKP Tahun 2021 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang adaptif dan responsif sebagai upaya pemulihan pembangunan nasional pasca pandemi Covid-19

Dampak Covid-19 tahun 2021 masih teras begitu kuat di Kabupaten Tegal. Munculnya varian mutasi Covid-19 baru berpotensi memperlama pandemik berlangsung. Berbagai kebijakan penanganan dan pemulihan covid-19 perlu menjadi warna kebijakan perubahan APBD Tahun anggaran 2021. Mendasari Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dan kondisi isu dan permasalahan actual yang dihadapi pada tahun 2021 maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 diarahkan untuk “Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Infrastruktur Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Dengan Memperhatikan Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial”. Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan kebijakan keuangan daerah untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) meliputi :

6.1. Kebijakan Penganggaran

Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah meliputi perubahan alokasi anggaran pada kelompok, jenis, obyek dan/atau rincian obyek. Selama kurun waktu 2021, pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian APBD yang diselaraskan dengan kebijakan dan ketentuan Pemerintah Pusat. Penyesuaian APBD ditunjukkan pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6.1. Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Dasar Hukum
1.	Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021
2	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021
3	Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021	Surat Kementerian Keuangan Nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan dari sisa dana BOK Tambahan di Kas daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/870/Keuda tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemanfaatan sisa dana BOK Tambahan Tahun Anggaran 2020 untuk Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan.
4	Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021	
5	Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021	
6	Peraturan Bupati Tegal Nomor 40 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021	Surat Keputusan Bupati Tegal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Operasi Yustisi Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
7	Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021	Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

8	Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021	Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali dalam rangka memenuhi anggaran penanggulangan Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19.
9	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

6.2. Peruntukan DAU 8% dan Realokasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Tegal merealokasikan APBD dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 yang bersumber dari APBD melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Lainnya yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2021. APBD yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19, khususnya untuk penanganan bidang kesehatan, meliputi dukungan vaksinasi, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemic COVID-19, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemic COVID-19; penanganan dampak/dukungan ekonomi; bantuan social safety net/jaring pengaman social.

Tabel 6.2. APBD yang dialokasikan untuk Penanganan COVID-19

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasional (DAU 8%)		
1. Bidang Kesehatan	91.332.000.000,00	78.488.955.213,00
2. Bidang Sosial	40.077.280.000,00	39.717.450.000,00
3. Bidang Ekonomi	29.690.431.825,00	26.064.857.067,00
Total Belanja Operasional	161.099.711.825,00	144.271.262.280,00

6.3. Rincian Penggunaan per OPD

Rincian realisasi Belanja Operasional/DAU 8% khusus covid-19 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan dalam table berikut ini :



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 6.3. Rincian Realisasi Belanja DAU 8 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
I. Bidang Kesehatan			
A. Penanganan COVID-19			
1	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	7.147.000.000,00	4.296.951.707,00
2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	355.400.000,00	354.750.000,00
3	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.485.967.000,00	6.116.869.781,00
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.060.503.000,00	2.946.416.505,00
5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	218.090.000,00	3.397.000,00
6	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.089.060.000,00	4.790.913.300,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	474.505.000,00	396.954.870,00
8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.550.000,00	124.123.000,00
9	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	482.268.800,00	212.901.200,00
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	49.970.000,00
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	446.438.600,00	440.728.000,00
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.553.000,00	172.783.720,00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.360.000,00	1.160.000,00
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.575.542.000,00	1.534.983.500,00
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	888.240.000,00	832.552.000,00
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	0,00
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	681.500.000,00	672.300.000,00
18	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.858.520.000,00	1.413.879.150,00
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.600.000,00	21.600.000,00
	Subtotal	29.214.097.400,00	24.383.233.733,00
B. Dukungan Vaksinasi			
1	Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	5.261.188.000,00	3.263.143.168,00
2	Pemantauan dan Penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	355.160.000,00	174.745.140,00
3	Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	736.000.000,00	128.180.000,00
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi	5.000.000.000,00	4.631.400.000,00
	Subtotal	11.352.348.000,00	8.197.468.308,00
C. Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19			
1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.000.000,00	240.395.300,00
	Subtotal	300.000.000,00	240.395.300,00
D. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19			
1	Dokter Spesialis	2.439.757.980,00	2.679.642.919,00
2	Dokter Umum dan Dokter Gigi	2.349.063.486,00	2.325.714.347,00
3	Bidan dan Perawat	22.753.835.045,00	19.767.857.625,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
4	Tenaga Kesehatan Lainnya	22.922.898.089,00	20.894.642.981,00
	Subtotal	50.465.554.600,00	45.667.857.872,00
	Total Bidang Kesehatan	91.332.000.000,00	78.488.955.213,00
II. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi			
1	Dukungan Ekonomi		
	Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Daerah kepada UMKM (PPKD)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (TanKP 17.2)	441.046.000,00	386.570.400,00
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (TanKP 36.1)	221.870.000,00	215.095.580,00
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (TanKP 36.2)	128.634.000,00	125.205.050,00
	Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani (TanKP 36.4)	193.694.000,00	188.579.200,00
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dagkop 24.1)	3.950.915.000,00	3.921.735.200,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Perinaker 19.1)	103.656.000,00	38.991.000,00
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Perinaker-all 17)	865.096.000,00	782.950.983,00
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (DKPP 18.1)	254.150.000,00	244.714.300,00
	Sub. Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DKPP 26.3)	1.068.750.000,00	1.051.669.882,00
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (DKPP 26.5)	318.367.000,00	303.769.318,00
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (DKPP 29.1)	231.953.000,00	218.678.100,00
	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (DKPP 30.1)	190.246.00,00	166.204.790,00
	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Parpora 18.4)	2.613.376.000,00	2.588.784.884,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (PMPTSP - all 19)	366.250.000,00	330.954.551,00
	Kegiatan Pengelolan terminal tipe c (Dishub all 19)	1.679.928.825,00	1.643.072.500,00
	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota (Dishub 18.1)-DBH	14.562.500.000,00	11.357.881.329,00
	Subtotal	29.690.431.825,00	26.064.857.067,00
	Total Penanganan Dampak Ekonomi	29.690.431.825,00	26.064.857.067,00
III. Bantuan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial			
1	Perlindungan Sosial		
	Kesejahteraan Guru Swasta (Dikbud 23.2)-Guru Non PNS di sekolah negeri	20.699.280.000,00	20.428.950.000,00
	Kesejahteraan untuk Guru TPQ dan MDT Kab. Tegal (Setda 18.1)	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Bantuan Sosial untuk FKHH, FKMM, FKIR,FKPAID dan FKMT (Setda 18.1)	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00
	Sub Penyediaan Permakanan (Bansos Jadup) (Dinsos 21.1)	1.748.000.000,00	1.658.500.000,00
	Subtotal	40.077.280.000,00	39.717.450.000,00
	Total Bantuan Sosial	40.077.280.000,00	39.717.450.000,00
	Total I + II + III	161.099.711.825,00	144.271.262.280,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

6.4. Rincian penerimaan dan distribusi/penggunaan vaksin dan barang habis pakai terkait program vaksinasi Covid-19

Sehubungan dengan program vaksinasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menerima distribusi vaksin Covid-19 beserta perlengkapan pelaksanaan vaksinasi berupa Bahan Habis Pakai (BHP) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), sebagai berikut :

a. Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2020 sebanyak 0 dosis dan Tahun 2021 sebanyak 1.470.348 dosis, dengan uraian sebagai berikut:

1) Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal menerima vaksin Covid-19 dari Kemenkes sebanyak 148.100 dosis, telah digunakan sebanyak 148.100 dosis. Jadi pada posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Kemenkes.

2) Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Jateng (untuk selain Tim Provinsi Jateng)

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal menerima vaksin Covid-19 dari Pemprov Jateng sebanyak 1.470.348 dosis, telah digunakan sebanyak 1.322.181 dosis, dikembalikan sebanyak 30.820 dosis, diserahkan ke entitas lain sebanyak 0 dosis, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 809 dosis. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa vaksin Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng sebanyak 116.538 dosis.

Tabel 6.4.Rincian vaksin dari Kemenkes dan Pemprov Jateng

No	Uraian	Satuan	Tersedia untuk Digunakan			Mutasi Keluar					Saldo per
			Saldo awal	Penerimaan	Jumlah	Penggunaan	Penge mbalian	Ke Pemd a Lain	Pemusn ahan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=6-11
A Dari Kemenkes											
1	Sinovac	dosis	-	148.100	148.100	148.100	-	-	-	148.100	-
2	AstraZeneca	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Satuan	Tersedia untuk Digunakan			Mutasi Keluar					Saldo per
			Saldo awal	Penerimaan	Jumlah	Penggunaan	Pengembalian	Ke Pemda Lain	Pemusnahan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=6-11
					-		-	-	-	-	-
3	Sinopharm	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Moderna	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pfizer	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Novavax	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sputnik-V	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Janssen	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Convidencia	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Zifivax	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dst...	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah 1	dosis	-	148.100	148.100	148.100	-	-	-	148.100	-
B	Dari Pemprov Jateng										
1	Sinovac	dosis	-	820.700	820.700	774.573	500	-	63 (Rusak/Pecah)	775.136	45.564
2	AstraZeneca	dosis	-	125.590	125.590	91.102	30.320	-	480 (Karantina BPOM) 168 (Pecah)	122.070	3.520
3	Sinopharm	dosis	-	1.380	1.380	1.371	-	-	-	1.371	9
4	Moderna	dosis	-	66.892	66.892	62.054	-	-	98 (Rusak)	62.152	4.740
5	Pfizer	dosis	-	453.786	453.786	391.326	-	-	-	391.326	62.460
6	Novavax	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sputnik-V	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Janssen	dosis	-	2.000	2.000	1.755	-	-	-	1.755	245
9	Convidencia	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Zifivax	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dst...	dosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah 2	dosis	-	1.470.348	1.470.348	1.322.181	30.820	-	809	1.353.810	116.538
	Jumlah 1+2	dosis	-	1.618.448	1.618.448	1.470.281	30.820	-	809	1.501.910	116.538



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

b. Bahan Habis Pakai (BHP) dalam Rangka Kegiatan Vaksinasi Covid-19

Bahan Habis Pakai dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemprov Jateng tahun 2021 sebanyak 6 item dengan uraian sebagai berikut.

1) Bahan Habis Pakai dari Kemenkes

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan barang habis pakai dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tegal tidak menerima barang habis pakai dari Kemenkes oleh karena itu, Pada posisi per 31 Desember 2021 tidak terdapat sisa bahan habis pakai dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Kemenkes .

2) Bahan Habis Pakai dari Pemprov Jateng (untuk selain Tim Provinsi Jateng)

Pada awal Tahun 2021 tidak terdapat saldo awal persediaan bahan habis pakai dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Pemprov Jateng. Pada Tahun 2021 Kabupaten Tegal menerima bahan habis pakai dari Pemprov Jateng sebanyak 6 item, telah digunakan sebanyak 6 item, dikembalikan sebanyak 0 item, diserahkan ke entitas lain sebanyak 0 item, dan dimusnahkan (rusak dan/atau kedaluarsa) sebanyak 0 item. Pada posisi per 31 Desember 2021 terdapat sisa bahan habis pakai dalam rangka kegiatan vaksinasi Covid-19 yang berasal dari Pemprov Jateng terdiri dari 6 item.

Tabel 6.5. Rincian Bahan Habis Pakai untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes dan Pemprov Jateng

No.	Uraian	Satuan	Tersedia untuk Digunakan			Mutasi Keluar			Saldo per 31 Des 2021	
			Saldo awal	Penerimaan	Jumlah	Penggunaan	Ke Pemda Lain	Pemusnahan		Jumlah
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=6-10
A	Dari Kemenkes									
1	Alkohol Swab	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADS 5ml	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sarung Tangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Masker Medis	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dst...									



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	Jumlah 1		-	-	-	-	-	-	-	-
B	Dari Pemprov Jateng									
1	Alkohol Swab	pcs	-	1.800.819	1.800.819	1.785.819	-	-	1.785.819	15.000
2	ADS 5ml	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sarung Tangan	pcs	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Masker Medis	psc	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ADS 0,5 ml	psc	-	1.087.730	1.087.730	1.061.830	-	-	1.061.830	25.900
6	ADS 0,3 ml	psc	-	547.953	547.953	492.203	-	-	492.203	55.750
7	ADS 3 ml	psc	-	24.471	24.471	4.994	-	-	4.994	19.477
8	Safety Box	psc	-	607.624	607.624	607.287	-	-	607.287	337
9	NACL0,9% 10 ml	Ampul	-	91.995	91.995	75.609	-	-	75.609	16.386
	Jumlah 2		-	4.160.592	4.160.592	4.027.742	-	-	4.027.742	132.850
	Jumlah 1+2		-	4.160.592	4.160.592	4.027.742	-	-	4.027.742	132.850



BAB VII INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kondisi umum Kabupaten Tegal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di kota Slawi. Terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai Utara (Pantura) yang berada pada persilangan arus transportasi Semarang-Tegal-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Purwokerto. Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108°57'06" BT - 109°21'30" BT dan 6°50'41" LS - 7°15'03" LS, dengan luas wilayah daratan 87.878,56 ha atau 878,79 km² dan Lautan seluas 121,50 Km², Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 Km. Adapun batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut : batas wilayah sebelah Utara adalah Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kota Tegal serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Secara geografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) katagori daerah, yaitu :

- a. Daerah pantai, dengan kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-2⁰) seluas 24.547,52 ha meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja;
- b. Daerah dataran rendah, dengan kemiringan lahan tipe bergelombang/dataran (2-15⁰) seluas 35.847,22 ha meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhhuri, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah;
- c. Daerah dataran tinggi/pegunungan, dengan kemiringan lahan tipe curam/berbukit-bukit (15-40⁰) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>40⁰) seluas 7.099,97 ha meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulung, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Dari segi topografi, wilayah Kabupaten Tegal mempunyai kemiringan tanah yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Bila ditinjau ketinggiannya terhadap permukaan laut, secara garis besar wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran rendah, kawasan dengan ketinggian 250-500 mdpl, kawasan dengan ketinggian 500-750 mdpl, dan kawasan dengan ketinggian di atas 750 mdpl.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 114,03 mm, suhu udara rata-rata setiap tahunnya berkisar pada 26,5 - 28,8 °C, dengan kelembaban udara rata-rata 68 - 86 %, tekanan udara rata-ratanya adalah 1.009,9 mb, kecepatan angin rata-ratanya adalah 1,6 - 3 knot dan Sinar matahari rata-ratanya 41.603 joule/cm² serta penguapan rata-ratanya 150,11 mm/tahun.

Secara administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, Kabupaten Tegal terdiri dari 18 kecamatan, 281 desa, 6 kelurahan, yaitu : Kecamatan Margasari (13 desa), Kecamatan Bumijawa (18 desa), Kecamatan Bojong (17 desa), Kecamatan Balapulang (20 desa), Kecamatan Pagerbarang (13 desa), Kecamatan Lebaksiu (15 desa), Kecamatan Jatinegara (17 desa), Kecamatan Kedungbanteng (10 desa), Kecamatan Pangkah (23 desa), Kecamatan Slawi (5 desa, 5 kelurahan), Kecamatan Dukuhwaru (10 desa), Kecamatan Adiwerna (21 desa), Kecamatan Dukuhturi (18 desa), Kecamatan Talang (19 desa), Tarub (20 desa), Kecamatan Kramat (19 desa, 1 kelurahan), Kecamatan Suradadi (11 desa), dan Kecamatan Warureja (12 desa).

2. Demografis

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.596.996 jiwa, terdiri dari 809.884 jiwa penduduk laki-laki dan 787.112 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang berpenduduk paling banyak adalah Kecamatan Adiwerna yaitu 130.224 jiwa, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kedungbanteng 44.796 jiwa. *(BPS)

3. Perekonomian

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2021 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp37.335.993,58 juta, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp35.300.027,84 juta dan tahun 2019 sebesar Rp35.217.969,61 juta. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2021 mencapai Rp25.402.911,06 juta, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp24.492.665,57 juta dan tahun 2019 sebesar Rp24.861.495,83 juta. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian *(BPS)

Perekonomian Kabupaten Tegal pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 3,72%, sedangkan tahun 2020 sebesar 1,48%. Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal ditopang dari kategori ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar masih dari kategori Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dan komunikasi 6,87%, Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 6,50%, Pertambangan dan Penggalian 4,35%, Konstruksi 4,29%. Untuk kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2021 mencatat pertumbuhan yang positif.

6.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 06 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, telah ditetapkan susunan perangkat daerah yang terdiri dari:

- A. Sekretariat Daerah;
- B. Sekretariat DPRD;
- C. Inspektorat;
- D. Dinas Daerah;
- E. Badan Daerah;
- F. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Badan; dan
- G. Kecamatan

Perangkat daerah tersebut di atas dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

- A. Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ;
- B. Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal;
- C. Inspektorat Daerah Kabupaten Tegal;
- D. Dinas Daerah Kabupaten Tegal, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan
 5. Satpol PP
 6. Dinas Sosial
 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Dinas Lingkungan Hidup
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 12. Dinas Perhubungan
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 15. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 18. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
 19. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- E. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- F. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Margasari
 2. Kecamatan Bumijawa
 3. Kecamatan Bojong
 4. Kecamatan Balapulang
 5. Kecamatan Pagerbarang
 6. Kecamatan Lebaksiu.
 7. Kecamatan Jatinegara
 8. Kecamatan Kedungbanteng
 9. Kecamatan Pangkah
 10. Kecamatan Slawi
 11. Kecamatan Dukuwaru
 12. Kecamatan Adiwerna
 13. Kecamatan Dukuhturi
 14. Kecamatan Talang
 15. Kecamatan Tarub
 16. Kecamatan Kramat
 17. Kecamatan Suradadi
 18. Kecamatan Warureja

Dalam wilayah kecamatan Kramat dan Kecamatan Slawi dibentuk Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Arus Kas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.


BUPATI TEGAL,

Dra. UMI AZIZAH

LAMPIRAN

Lampiran 2.1. Anggaran Pendapatan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	PENDAPATAN	2.750.790.210.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	285.817.771.000,00
	Pendidikan	0,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00
	Kesehatan	285.372.051.000,00
	Dinas Kesehatan	285.372.051.000,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.360.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum	425.360.000,00
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.660.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	16.660.000,00
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3.700.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja	3.700.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	5.867.315.000,00
	Lingkungan Hidup	1.925.000.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup	1.925.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
	Perhubungan	2.059.828.000,00
	Dinas Perhubungan	2.059.828.000,00
	Penanaman Modal	1.882.487.000,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.882.487.000,00
3	Urusan Pilihan	15.195.538.000,00
	Kelautan dan Perikanan	199.077.000,00
	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	199.077.000,00
	Pariwisata	7.722.170.000,00
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	7.722.170.000,00
	Pertanian	5.000.000,00
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.000.000,00
	Perdagangan	6.578.140.000,00
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.578.140.000,00
	Perindustrian	691.151.000,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	691.151.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	2.443.909.586.000,00
	Keuangan	2.443.733.267.000,00
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	133.050.000.000,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.310.683.267.000,00
	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	176.319.000,00
	Kecamatan Dukuhturi	0,00
	Kecamatan Kramat	30.000.000,00
	Kecamatan Slawi	146.319.000,00

Lampiran 2.2. Anggaran Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	BELANJA	2.961.886.307.000,00
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.890.525.843.000,00
1	Pendidikan	932.747.190.000,00
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	932.747.190.000,00
2	Kesehatan	724.628.240.000,00
2.1	Dinas Kesehatan	724.628.240.000,00
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.173.510.000,00
3.1	Dinas Pekerjaan Umum	141.908.510.000,00
3.2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	15.265.000.000,00
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43.628.724.000,00
4.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	43.628.724.000,00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	23.146.535.000,00
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	15.893.155.000,00
5.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.253.380.000,00
6	Sosial	9.201.644.000,00
6.1	Dinas Sosial	9.201.644.000,00
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	122.271.911.000,00
1	Tenaga Kerja	1.046.000.000,00
1.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.046.000.000,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.409.910.300,00
2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	4.409.910.300,00
3	Pangan	333.970.000,00
3.1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	333.970.000,00
4	Pertanahan	4.865.000.000,00
4.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	4.865.000.000,00
5	Lingkungan Hidup	19.320.135.000,00
5.1	Dinas Lingkungan Hidup	19.132.370.000,00
5.2	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	187.765.000,00
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	11.906.928.000,00
6.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.906.928.000,00
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.248.108.000,00
7.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12.248.108.000,00
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.469.156.700,00
8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	8.469.156.700,00
9	Perhubungan	31.360.318.000,00
9.1	Dinas Perhubungan	31.360.318.000,00
10	Komunikasi dan Informatika	8.798.299.500,00
10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.798.299.500,00
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	893.059.000,00
11.1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	893.059.000,00
12	Penanaman Modal	5.130.204.000,00
12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.130.204.000,00
13	Kepemudaan dan Olah Raga	6.609.299.000,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
13.1	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	6.609.299.000,00
14	Statistik	251.011.500,00
14.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	251.011.500,00
15	Persandian	230.724.000,00
15.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	230.724.000,00
16	Kebudayaan	2.244.523.000,00
16.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.244.523.000,00
17	Perpustakaan	424.679.000,00
17.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	424.679.000,00
18	Kearsipan	3.730.586.000,00
18.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.730.586.000,00
C	Urusan Pilihan	68.941.723.000,00
1	Kelautan dan Perikanan	8.016.974.500,00
1.1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	8.016.974.500,00
2	Pariwisata	9.526.323.000,00
2.1	Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata	9.526.323.000,00
3	Pertanian	24.936.406.500,00
3.1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	316.097.500,00
3.2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.620.309.000,00
4	Perdagangan	15.725.851.000,00
4.1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.725.851.000,00
5	Perindustrian	10.716.168.000,00
5.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.716.168.000,00
6	Transmigrasi	20.000.000,00
6.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.000.000,00
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	880.146.830.000,00
1	Administrasi Pemerintahan	63.982.606.000,00
1.1	Sekretariat Daerah	63.982.606.000,00
2	Pengawasan	6.457.785.000,00
2.1	Inspektorat	6.457.785.000,00
3	Perencanaan	7.192.753.000,00
3.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	7.192.753.000,00
4	Keuangan	678.900.976.000,00
4.1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.786.668.000,00
4.2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	665.114.308.000,00
5	Kepegawaian	9.913.869.000,00
5.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.913.869.000,00
6	Pendidikan dan Pelatihan	2.070.395.000,00
6.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.070.395.000,00
7	Penelitian dan Pengembangan	989.854.000,00
7.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	989.854.000,00
8	Sekretariat DPRD	59.768.362.000,00
8.1	Sekretariat DPRD	59.768.362.000,00
9	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	46.429.200.000,00
9.1	Kecamatan Adiwerna	1.726.686.000,00

No	URUSAN	ANGGARAN (Rp)
9.2	Kecamatan Balapulang	2.147.361.000,00
9.3	Kecamatan Bojong	1.919.060.000,00
9.4	Kecamatan Bumijawa	1.938.369.000,00
9.5	Kecamatan Dukuhturi	1.862.340.000,00
9.6	Kecamatan Dukuhwaru	1.872.427.000,00
9.7	Kecamatan Jatinegara	1.834.058.000,00
9.8	Kecamatan Kedungbanteng	1.774.501.000,00
9.9	Kecamatan Kramat	3.917.208.000,00
9.10	Kecamatan Lebaksiu	1.938.034.000,00
9.11	Kecamatan Margasari	2.211.178.000,00
9.12	Kecamatan Pagerbarang	1.954.983.000,00
9.13	Kecamatan Pangkah	1.737.162.000,00
9.14	Kecamatan Slawi	11.654.160.000,00
9.15	Kecamatan Suradadi	1.942.829.000,00
9.16	Kecamatan Talang	2.047.240.000,00
9.17	Kecamatan Tarub	1.935.569.000,00
9.18	Kecamatan Warurejo	2.016.035.000,00
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.441.030.000,00
10.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.441.030.000,00

-12.603.815.700,00

-4.601.498.000,00

Lampiran 3.1. Realisasi Pendapatan berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021

No.	URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	
		Rp	Rp	Rp	%
Urusan Wajib Pelayanan Dasar :					
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	109.407.537,00	109.407.537,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	285.372.051.000,00	395.718.226.593,00	110.346.175.593,00	138,67
3	Dinas Pekerjaan Umum	425.360.000,00	567.854.370,00	142.494.370,00	133,50
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	16.660.000,00	58.949.180,00	42.289.180,00	353,84
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.700.000,00	67.876.500,00	64.176.500,00	1.835
	Sub Jumlah	285.817.771.000,00	396.522.314.180,00	110.704.543.180,00	138,73
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :					
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.925.000.000,00	2.716.786.500,00	791.786.500,00	141,13
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	2.059.828.000,00	1.995.902.025,00	(63.925.975,00)	96,90
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.882.487.000,00	1.474.345.510,00	(408.141.490,00)	78,32
	Sub Jumlah	5.867.315.000,00	6.192.434.035,00	325.119.035,00	105,54
Urusan Pilihan :					
10	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	199.077.000,00	232.281.142,00	33.204.142,00	116,68
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7.722.170.000,00	5.419.286.588,00	(2.302.883.412,00)	70,18
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.000.000,00	25.994.305,00	20.994.305,00	519,89
13	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar	6.578.140.000,00	6.946.131.617,00	367.991.617,00	105,59
14	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	691.151.000,00	804.774.496,00	113.623.496,00	116,44
	Sub Jumlah	15.195.538.000,00	13.428.468.148,00	(1.767.069.852,00)	88,37
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang :					
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	133.050.000.000,00	143.901.964.238,00	10.851.964.238,00	108,16
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.310.683.267.000,00	2.302.356.171.626,00	(8.327.095.374,00)	99,64
17	Kecamatan Dukuhturi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18	Kecamatan Kramat	30.000.000,00	30.200.625,00	200.625,00	100,67
19	Kecamatan Slawi	146.319.000,00	127.811.200,00	(18.507.800,00)	87,35
	Sub Jumlah	2.443.909.586.000,00	2.446.416.149.689,00	2.506.563.689,00	100,10
	Jumlah	2.750.790.210.000,00	2.862.559.366.052,00	111.769.156.052,00	104,06

Lampiran 3.2. Realisasi Belanja berdasarkan Urusan Tahun 2021

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
	BELANJA	2.961.886.307.000,00	2.776.664.042.487,00	(185.222.264.513,00)	93,75
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.890.525.843.000,00	1.762.752.228.575,00	(127.773.614.425,00)	93,24
1	Pendidikan	932.747.190.000,00	897.272.638.709,00	(35.474.551.291,00)	96,20
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	932.747.190.000,00	897.272.638.709,00	(35.474.551.291,00)	96,20
2	Kesehatan	724.628.240.000,00	648.273.338.662,00	(76.354.901.338,00)	89,46
2.1	Dinas Kesehatan	724.628.240.000,00	648.273.338.662,00	(76.354.901.338,00)	89,46
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	157.173.510.000,00	147.714.399.530,00	(9.459.110.470,00)	93,98
3.1	Dinas Pekerjaan Umum	141.908.510.000,00	135.337.920.350,00	(6.570.589.650,00)	95,37
3.2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	15.265.000.000,00	12.376.479.180,00	(2.888.520.820,00)	81,08
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43.628.724.000,00	41.736.749.001,00	(1.891.974.999,00)	95,66
4.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	43.628.724.000,00	41.736.749.001,00	(1.891.974.999,00)	95,66
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	23.146.535.000,00	19.039.948.758,00	(4.106.586.242,00)	82,26
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	15.893.155.000,00	12.719.551.808,00	(3.173.603.192,00)	80,03
5.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.253.380.000,00	6.320.396.950,00	(932.983.050,00)	87,14
6	Sosial	9.201.644.000,00	8.715.153.915,00	(486.490.085,00)	94,71
6.1	Dinas Sosial	9.201.644.000,00	8.715.153.915,00	(486.490.085,00)	94,71
B	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	122.271.911.000,00	109.483.494.447,00	(12.788.416.553,00)	89,54
1	Tenaga Kerja	1.046.000.000,00	896.579.800,00	(149.420.200,00)	85,72
1.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.046.000.000,00	896.579.800,00	(149.420.200,00)	85,72
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.409.910.300,00	4.152.111.238,00	(257.799.062,00)	94,15
2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	4.409.910.300,00	4.152.111.238,00	(257.799.062,00)	94,15
3	Pangan	333.970.000,00	311.567.217,00	(22.402.783,00)	93,29
3.1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	333.970.000,00	311.567.217,00	(22.402.783,00)	93,29
4	Pertanahan	4.865.000.000,00	3.393.373.073,00	(1.471.626.927,00)	69,75
4.1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	4.865.000.000,00	3.393.373.073,00	(1.471.626.927,00)	69,75
5	Lingkungan Hidup	19.320.135.000,00	17.504.802.734,00	(1.815.332.266,00)	90,60
5.1	Dinas Lingkungan Hidup	19.132.370.000,00	17.320.197.334,00	(1.812.172.666,00)	90,53
5.2	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	187.765.000,00	184.605.400,00	(3.159.600,00)	98,32
6	Administrasi Kependudukan dan Capil	11.906.928.000,00	11.108.514.980,00	(798.413.020,00)	93,29
6.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.906.928.000,00	11.108.514.980,00	(798.413.020,00)	93,29
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.248.108.000,00	11.637.253.831,00	(610.854.169,00)	95,01
7.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12.248.108.000,00	11.637.253.831,00	(610.854.169,00)	95,01

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.469.156.700,00	7.322.392.947,00	(1.146.763.753,00)	86,46
8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	8.469.156.700,00	7.322.392.947,00	(1.146.763.753,00)	86,46
9	Perhubungan	31.360.318.000,00	27.562.576.670,00	(3.797.741.330,00)	87,89
9.1	Dinas Perhubungan	31.360.318.000,00	27.562.576.670,00	(3.797.741.330,00)	87,89
10	Komunikasi dan Informatika	8.798.299.500,00	8.386.247.888,00	(412.051.612,00)	95,32
10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.798.299.500,00	8.386.247.888,00	(412.051.612,00)	95,32
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	893.059.000,00	854.139.406,00	(38.919.594,00)	95,64
11.1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	893.059.000,00	854.139.406,00	(38.919.594,00)	95,64
12	Penanaman Modal	5.130.204.000,00	4.541.620.681,00	(588.583.319,00)	88,53
12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.130.204.000,00	4.541.620.681,00	(588.583.319,00)	88,53
13	Kepemudaan dan Olah Raga	6.609.299.000,00	5.927.711.257,00	(681.587.743,00)	89,69
13.1	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	6.609.299.000,00	5.927.711.257,00	(681.587.743,00)	89,69
14	Statistik	251.011.500,00	241.783.030,00	(9.228.470,00)	96,32
14.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	251.011.500,00	241.783.030,00	(9.228.470,00)	96,32
15	Persandian	230.724.000,00	216.949.500,00	(13.774.500,00)	94,03
15.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	230.724.000,00	216.949.500,00	(13.774.500,00)	94,03
16	Kebudayaan	2.244.523.000,00	1.640.418.154,00	(604.104.846,00)	73,09
16.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.244.523.000,00	1.640.418.154,00	(604.104.846,00)	73,09
17	Perpustakaan	424.679.000,00	366.901.000,00	(57.778.000,00)	86,39
17.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	424.679.000,00	366.901.000,00	(57.778.000,00)	86,39
18	Kearsipan	3.730.586.000,00	3.418.551.041,00	(312.034.959,00)	91,64
18.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.730.586.000,00	3.418.551.041,00	(312.034.959,00)	91,64
C	Urusan Pilihan	68.941.723.000,00	64.315.465.209,00	(4.626.257.791,00)	93,29
1	Kelautan dan Perikanan	8.016.974.500,00	7.493.100.514,00	(523.873.986,00)	93,47
1.1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	8.016.974.500,00	7.493.100.514,00	(523.873.986,00)	93,47
2	Pariwisata	9.526.323.000,00	8.952.423.770,00	(573.899.230,00)	93,98
2.1	Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata	9.526.323.000,00	8.952.423.770,00	(573.899.230,00)	93,98
3	Pertanian	24.936.406.500,00	23.246.536.519,00	(1.689.869.981,00)	93,22
3.1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	316.097.500,00	290.019.441,00	(26.078.059,00)	91,75
3.2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	24.620.309.000,00	22.956.517.078,00	(1.663.791.922,00)	93,24
4	Perdagangan	15.725.851.000,00	15.376.858.081,00	(348.992.919,00)	97,78
4.1	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.725.851.000,00	15.376.858.081,00	(348.992.919,00)	97,78
5	Perindustrian	10.716.168.000,00	9.246.546.325,00	(1.469.621.675,00)	86,29
5.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.716.168.000,00	9.246.546.325,00	(1.469.621.675,00)	86,29
6	Transmigrasi	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-
6.1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	880.146.830.000,00	840.112.854.256,00	(40.033.975.744,00)	95,45
1	Administrasi Pemerintahan	63.982.606.000,00	59.573.379.003,00	(4.409.226.997,00)	93,11
1.1	Sekretariat Daerah	63.982.606.000,00	59.573.379.003,00	(4.409.226.997,00)	93,11

No.	URUSAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/(KURANG)	
				Rp	%
2	Pengawasan	6.457.785.000,00	5.568.627.519,00	(889.157.481,00)	86,23
2.1	Inspektorat	6.457.785.000,00	5.568.627.519,00	(889.157.481,00)	86,23
3	Perencanaan	7.192.753.000,00	6.475.847.967,00	(716.905.033,00)	90,03
3.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	7.192.753.000,00	6.475.847.967,00	(716.905.033,00)	90,03
4	Kuangan	678.900.976.000,00	657.919.116.339,00	(20.981.859.661,00)	96,91
4.1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.786.668.000,00	11.075.305.710,00	(2.711.362.290,00)	80,33
4.2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	665.114.308.000,00	646.843.810.629,00	(18.270.497.371,00)	97,25
5	Kepegawaian	9.913.869.000,00	7.939.439.720,00	(1.974.429.280,00)	80,08
5.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	9.913.869.000,00	7.939.439.720,00	(1.974.429.280,00)	80,08
6	Pendidikan dan Pelatihan	2.070.395.000,00	2.017.457.118,00	(52.937.882,00)	97,44
6.1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	2.070.395.000,00	2.017.457.118,00	(52.937.882,00)	97,44
7	Penelitian dan Pengembangan	989.854.000,00	789.865.200,00	(199.988.800,00)	79,80
7.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	989.854.000,00	789.865.200,00	(199.988.800,00)	79,80
8	Sekretariat DPRD	59.768.362.000,00	55.990.299.657,00	(3.778.062.343,00)	93,68
8.1	Sekretariat DPRD	59.768.362.000,00	55.990.299.657,00	(3.778.062.343,00)	93,68
9	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	46.429.200.000,00	39.651.880.481,00	(6.777.319.519,00)	85,40
9.1	Kecamatan Adiwerna	1.726.686.000,00	1.441.026.447,00	(285.659.553,00)	83,46
9.2	Kecamatan Balapulang	2.147.361.000,00	1.820.789.463,00	(326.571.537,00)	84,79
9.3	Kecamatan Bojong	1.919.060.000,00	1.563.595.050,00	(355.464.950,00)	81,48
9.4	Kecamatan Bumijawa	1.938.369.000,00	1.613.335.853,00	(325.033.147,00)	83,23
9.5	Kecamatan Dukuhturi	1.862.340.000,00	1.525.153.056,00	(337.186.944,00)	81,89
9.6	Kecamatan Dukuhwaru	1.872.427.000,00	1.533.917.097,00	(338.509.903,00)	81,92
9.7	Kecamatan Jatinegara	1.834.058.000,00	1.497.976.699,00	(336.081.301,00)	81,68
9.8	Kecamatan Kedungbanteng	1.774.501.000,00	1.346.873.216,00	(427.627.784,00)	75,90
9.9	Kecamatan Kramat	3.917.208.000,00	3.461.846.665,00	(455.361.335,00)	88,38
9.10	Kecamatan Lebaksiu	1.938.034.000,00	1.610.997.724,00	(327.036.276,00)	83,13
9.11	Kecamatan Margasari	2.211.178.000,00	1.952.916.184,00	(258.261.816,00)	88,32
9.12	Kecamatan Pagerbarang	1.954.983.000,00	1.483.236.621,00	(471.746.379,00)	75,87
9.13	Kecamatan Pangkah	1.737.162.000,00	1.395.252.466,00	(341.909.534,00)	80,32
9.14	Kecamatan Slawi	11.654.160.000,00	10.865.230.175,00	(788.929.825,00)	93,23
9.15	Kecamatan Suradadi	1.942.829.000,00	1.592.996.888,00	(349.832.112,00)	81,99
9.16	Kecamatan Talang	2.047.240.000,00	1.653.659.194,00	(393.580.806,00)	80,78
9.17	Kecamatan Tarub	1.935.569.000,00	1.557.877.364,00	(377.691.636,00)	80,49
9.18	Kecamatan Warurejo	2.016.035.000,00	1.735.200.319,00	(280.834.681,00)	86,07
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.441.030.000,00	4.186.941.252,00	(254.088.748,00)	94,28
10.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.441.030.000,00	4.186.941.252,00	(254.088.748,00)	94,28

Lampiran 5.1 Belanja Barang

Belanja Barang	TA 2021		TA 2020
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Realisasi Rp
1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.031.386.150,00	3.892.502.400,00	2.656.292.600,00
2 Belanja Bahan-Bahan Kimia	363.415.000,00	359.470.000,00	3.852.548.230,00
3 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.328.304.310,00	6.168.254.222,00	6.208.298.763,00
4 Belanja Bahan-Bahan Baku	223.162.000,00	205.329.950,00	
5 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	689.337.600,00	681.053.500,00	504.665.000,00
6 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	55.948.400,00	51.080.000,00	45.337.000,00
7 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	92.823.000,00	77.297.500,00	69.485.000,00
8 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	146.915.000,00	146.915.000,00	83.670.000,00
9 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.884.599.000,00	1.615.672.073,00	16.996.559.596,00
10 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	682.940.700,00	643.679.581,00	1.723.845.548,00
11 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	
12 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.134.720.195,00	3.681.112.231,00	2.830.728.147,00
13 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.676.622.441,00	7.320.397.327,00	7.100.866.856,00
14 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	294.719.800,00	238.796.000,00	172.913.700,00
15 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	1.499.990.000,00	1.048.091.010,00	9.442.200,00
16 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.864.219.825,00	3.789.351.831,00	5.036.028.313,00
17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	383.378.100,00	343.621.932,00	1.067.957.842,00
18 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	540.529.550,00	509.971.900,00	9.161.818.071,00
19 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	5.324.000,00	5.324.000,00	
20 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	690.970.750,00	642.319.800,00	
21 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.879.079.460,00	5.363.409.174,00	268.564.900,00
22 Belanja Obat-Obatan-Obat	4.454.783.430,00	4.265.808.623,00	7.399.477.933,00
23 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.321.394.545,00	10.935.129.453,00	
24 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.373.578.850,00	25.965.295.406,00	
25 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	
26 Belanja Natura dan Pakan-Pakan	23.300.000,00	13.420.000,00	359.012.100,00
27 Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	50.000.000,00	49.000.000,00	
28 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.287.151.599,00	12.848.772.370,00	11.047.528.195,00
29 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.791.714.260,00	1.616.908.850,00	671.147.050,00
30 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.833.300.700,00	2.592.892.930,00	
31 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.379.458.200,00	868.650.500,00	
32 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	59.249.000,00	56.500.000,00	
33 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.940.000,00	9.940.000,00	68.500.000,00
34 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	44.652.000,00	43.924.000,00	120.640.000,00
35 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	978.730.069,00	930.282.500,00	
36 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.024.000,00	1.980.000,00	87.500.000,00
37 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.600.000,00	21.600.000,00	8.014.400,00
38 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	28.000.000,00	28.000.000,00	1.233.200.750,00
39 Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	57.646.000,00
40 Belanja Pakaian Batik Tradisional	379.894.400,00	282.651.600,00	219.030.000,00
41 Belanja Pakaian Olahraga	349.343.000,00	306.395.050,00	440.985.400,00
42 Belanja Pakaian Paskibraka	111.515.400,00	67.083.400,00	
Jumlah	112.968.014.734,00	97.687.884.113,00	79.501.703.594,00

Tabel. 5.2. Rincian Kas BLUD Puskesmas

N0	PUSKESMAS	Nama Rekening	No Rekening	Nama Bank
1	Danasari	Kas BLUD puskesmas danasari	66101000578300	BRI KC Slawi
2	Kesamiran	Kas BLUD puskesmas kesamiran	1114001356	Bank Jateng Capem Pasar Banjaran
3	Margasari	Kas BLUD puskesmas margasari	1157000469	Bank Jateng Capem Margasari
4	Kesambi	Kas BLUD puskesmas kesambi	66101000576308	BRI KC Slawi
5	Bumijawa	Kas BLUD puskesmas bumijawa	66101000571308	BRI KC Slawi
6	Bojong	Kas BLUD puskesmas bojong	66101000585307	BRI KC Slawi
7	Balapulang	Kas BLUD puskesmas balapulang	66101000580307	BRI KC Slawi
8	Kalibakung	Kas BLUD puskesmas kalibakung	66101000581303	BRI KC Slawi
9	Pagerbarang	Kas BLUD puskesmas pagerbarang	66101000577304	BRI KC Slawi
10	Lebaksiu	Kas BLUD puskesmas lebaksiu	66101000572304	BRI KC Slawi
11	Kambangan	Kas BLUD puskesmas kambangan	66101000573300	BRI KC Slawi
12	Jatinegara	Kas BLUD puskesmas jatinegara	66101000584301	BRI KC Slawi
13	Kedungbanteng	Kas BLUD puskesmas kedungbanteng	054501000466301	BRI KCP Adiwerna
14	Pangkah	Kas BLUD puskesmas pangkah	054501000464309	BRI KCP Adiwerna
15	Penusupan	Kas BLUD puskesmas penusupan	66101000575302	BRI Kanca Slawi
16	Slawi	Kas BLUD puskesmas slawi	1035010269	Bank Jateng Cabang Slawi
17	Adiwerna	Kas BLUD puskesmas adiwerna	054501000467307	BRI KCP Adiwerna
18	Pagiyanten	Kas BLUD puskesmas pagiyanten	1114001330	Bank Jateng Capem Pasar Banjaran
19	Talang	Kas BLUD puskesmas talang	010101001221306	BRI KC Tegal
20	Kaladawa	Kas BLUD puskesmas kaladawa	010101001224304	BRI KC Tegal
21	Dukuhturi	Kas BLUD puskesmas dukuhturi	010101001220300	BRI KC Tegal
22	Kupu	Kas BLUD puskesmas kupu	010101001217307	BRI KC Tegal
23	Dukuhwaru	Kas BLUD puskesmas dukuhwaru	66101000574306	BRI KC Slawi
24	Tarub	Kas BLUD puskesmas tarub	010101001218303	BRI KC Tegal
25	Kramat	Kas BLUD puskesmas kramat	010101001219309	BRI KC Tegal
26	Bangungalih	Kas BLUD puskesmas bangungalih	66101000570302	BRI KC Slawi
27	Suradadi	Kas BLUD puskesmas suradadi	010101001222302	BRI KC Tegal
28	Jatibogor	Kas BLUD puskesmas jatibogor	010101001223308	BRI KC Tegal
29	Warureja	Kas BLUD puskesmas warureja	010101001216301	BRI KC Tegal

Lampiran 5. 3. Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang

Piutang Pajak Hiburan

Tahun	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2021 (Net Realizable Value) (Rp)
2014	608.675,00	2-5 Tahun	100,00	608.675,00	-
Jumlah	608.675,00			608.675,00	-

Piutang Pajak Reklame

Tahun	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2021 (Net Realizable Value) (Rp)
2021	123.174.606,00	>1 Tahun	0,50	615.873,03	122.558.732,97
2020	1.968.750,00	1-2 Tahun	10,00	196.875,00	1.771.875,00
2017	3.645.000,00	2-5 Tahun	50,00	1.822.500,00	1.822.500,00
Jumlah	128.788.356,00			2.635.248,03	126.153.107,97

Piutang Pajak Air Tanah

Tahun	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2021 (Net Realizable Value) (Rp)
2021	20.211.560,00	>1 Tahun	0,50	101.057,80	20.110.502,20
2020	2.818.940,00	1-2 Tahun	10,00	281.894,00	2.537.046,00
2019	265.500,00	2-5 Tahun	50,00	132.750,00	132.750,00
2018	2.552.300,00	2-5 Tahun	50,00	1.276.150,00	1.276.150,00
2017	6.959.490,00	2-5 Tahun	50,00	3.479.745,00	3.479.745,00
2016	4.126.000,00	>5 Tahun	100,00	4.126.000,00	-
2015	3.189.000,00	>5 Tahun	100,00	3.189.000,00	-
2014	1.244.900,00	>5 Tahun	100,00	1.244.900,00	-
Jumlah	41.367.690,00			13.831.496,80	27.536.193,20

Piutang Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2021 (Net Realizable Value) (Rp)
2021	4.568.012.301,00	>1 Tahun	0,50	22.840.061,51	4.545.172.239,50
Jumlah	4.568.012.301,00			22.840.061,51	4.545.172.239,50

Piutang Sarang Burung Walet

Tahun	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2021 (Net Realizable Value) (Rp)
2014	21.924.000,00	>5 Tahun	100,00	21.924.000,00	-
Jumlah	21.924.000,00			21.924.000,00	-

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Saldo Piutang 2021 (Rp)	Umur Piutang	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Saldo Piutang 2021 (Net Realizable Value) (Rp)
2021	11.553.357.105,00	>1 Tahun	0,50	57.766.785,53	11.495.590.319,48
2020	7.526.904.632,00	1-2 Tahun	10,00	752.690.463,20	6.774.214.168,80
2019	5.675.511.634,00	2-5 Tahun	50,00	2.837.755.817,00	2.837.755.817,00
2018	4.278.299.331,00	2-5 Tahun	50,00	2.139.149.665,50	2.139.149.665,50
2017	3.976.884.511,00	2-5 Tahun	50,00	1.988.442.255,50	1.988.442.255,50
2016	2.404.779.557,00	>5 Tahun	100,00	2.404.779.557,00	-
2015	2.456.032.274,00	>5 Tahun	100,00	2.456.032.274,00	-
2014	3.177.136.099,00	>5 Tahun	100,00	3.177.136.099,00	-
2013	4.188.556.623,00	>5 Tahun	100,00	4.188.556.623,00	-
2012	1.743.547.747,00	>5 Tahun	100,00	1.743.547.747,00	-
2011	1.935.351.823,00	>5 Tahun	100,00	1.935.351.823,00	-
2010	2.859.892.597,00	>5 Tahun	100,00	2.859.892.597,00	-
2009	3.185.032.279,00	>5 Tahun	100,00	3.185.032.279,00	-

2008	2.250.538.615,00	>5 Tahun	100,00	2.250.538.615,00	-
2007	2.201.634.410,00	>5 Tahun	100,00	2.201.634.410,00	-
2006	1.761.231.088,00	>5 Tahun	100,00	1.761.231.088,00	-
2005	1.435.933.622,00	>5 Tahun	100,00	1.435.933.622,00	-
2004	1.203.777.655,00	>5 Tahun	100,00	1.203.777.655,00	-
2003	1.120.258.979,00	>5 Tahun	100,00	1.120.258.979,00	-
2002	595.718.645,00	>5 Tahun	100,00	595.718.645,00	-
s/d 2001	490.097.407,00	>5 Tahun	100,00	490.097.407,00	-
Jumlah	66.020.476.633,00			40.785.324.406,73	25.235.152.226,28

NO	Uraian	ATK	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Alat Listrik	Perlengkapan Dinas	Souvenir/ cendera mata	Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Jumlah
54	Kantor Camat Jatinegara	689.600,00			500.000,00					1.189.600,00
55	Kantor Camat Kedungbanteng	162.300,00			40.000,00				406.000,00	608.300,00
56	Kantor Camat Kramat	185.500,00			67.000,00					252.500,00
57	Kantor Camat Lebaksiu	228.500,00								228.500,00
58	Kantor Camat Margasari	429.200,00			300.000,00	205.000,00			716.400,00	1.650.600,00
59	Kantor Camat Pagerbarang	623.000,00	72.600,00		300.000,00				112.500,00	1.108.100,00
60	Kantor Camat Pangkah	290.500,00	100.800,00			21.100,00				412.400,00
61	Kantor Camat Slawi	136.750,00				260.700,00			250.500,00	647.950,00
62	Kantor Camat Suradadi	125.000,00	7.525.000,00							7.650.000,00
63	Badan Kesbang Dan Linmas	2.176.400,00							1.053.900,00	3.230.300,00
Jumlah		1.086.478.479,00	1.602.575.160,00	3.698.000,00	2.989.009.974,00	252.340.700,00	11.520.000,00	25.722.500,00	821.157.611,00	6.792.502.424,00

lampiran 5.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO 2021	SALDO 2020
1	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	(411.373.896.645,25)	(381.867.268.096,00)
2	Dinas Kesehatan	(96.275.635.213,00)	(85.199.705.625,00)
3	RSUD Dr.Soeselo	(150.717.192.406,64)	(135.604.196.904,04)
4	RSUD Suradadi	(44.277.789.231,00)	(35.454.733.218,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum	(1.108.134.914.436,00)	(1.032.928.069.074,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	(81.080.123.434,49)	(69.950.702.641,49)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(7.001.257.942,00)	(6.373.367.622,00)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(7.221.066.023,33)	(7.290.755.005,00)
9	Dinas Sosial	(8.923.759.231,00)	(8.577.647.625,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	(7.943.378.296,00)	(7.482.932.826,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	(31.444.100.224,00)	(29.927.897.587,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(8.288.184.474,03)	(7.910.326.839,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(3.030.884.652,00)	(2.907.866.204,00)
14	Dinas Perhubungan	(29.852.793.204,00)	(26.314.022.770,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	(5.762.663.687,00)	(6.642.318.409,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.984.853.083,00)	(3.760.930.004,00)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(3.598.264.316,00)	(3.157.023.922,00)
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	(9.961.511.483,00)	(9.334.643.387,00)
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(31.431.822.446,00)	(29.643.797.461,00)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(14.491.656.882,00)	(14.022.173.305,00)
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(16.826.087.154,00)	(12.568.926.382,00)
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(26.819.444.417,00)	(24.066.847.328,00)
23	Sekretariat Daerah	(34.066.568.004,00)	(34.229.975.545,00)
24	Inspektorat	(2.710.370.972,00)	(2.356.848.365,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	(7.373.339.507,00)	(6.984.391.589,00)
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan PPKD	(7.806.475.717,04)	(7.324.707.061,04)
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	(5.358.208.875,96)	(4.653.982.114,00)
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	(4.548.790.011,00)	(3.900.646.074,00)
29	Sekretariat DPRD	(16.937.568.842,00)	(15.089.335.687,00)
30	Kecamatan Adiwerna	(1.125.791.909,00)	(1.020.479.894,00)
31	Kecamatan Balapulang	(1.405.568.025,00)	(1.339.736.372,00)
32	Kecamatan Bojong	(1.495.179.947,00)	(1.374.889.931,00)
33	Kecamatan Bumijawa	(1.370.921.885,00)	(1.272.622.645,00)
34	Kecamatan Dukuhturi	(1.134.308.922,00)	(1.060.783.918,00)
35	Kecamatan Dukuhwaru	(1.175.354.587,00)	(1.187.704.094,00)
36	Kecamatan Jatinegara	(1.602.095.023,00)	(1.504.152.689,00)
37	Kecamatan Kedungbanteng	(1.265.742.175,00)	(1.179.222.773,00)
38	Kecamatan Kramat	(2.971.900.643,00)	(2.437.339.545,00)
39	Kecamatan Lebaksiu	(1.295.390.512,00)	(1.214.259.860,00)
40	Kecamatan Margasari	(1.606.639.979,00)	(1.460.781.414,00)
41	Kecamatan Pagerbarang	(1.202.535.897,00)	(1.088.848.828,00)
42	Kecamatan Pangkah	(1.660.698.384,00)	(1.459.843.309,00)
43	Kecamatan Slawi	(10.303.448.958,00)	(8.079.787.461,00)
44	Kecamatan Suradadi	(1.347.355.055,00)	(1.254.779.299,00)
45	Kecamatan Talang	(1.288.771.072,00)	(1.196.136.790,00)
46	Kecamatan Tarub	(619.002.256,00)	(567.040.468,00)
47	Kecamatan Warurejo	(988.669.614,00)	(909.934.698,00)
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.183.786.888,00)	(994.266.613,00)
	Jumlah	(2.222.285.762.540,74)	(2.046.128.649.270,57)

Lampiran 5.6. Daftar Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AMORTISASI s.d 2020	AMORTISASI 2021	AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
DINAS KESEHATAN							
1	Software SIMPUS Dinkes	2000	33.000.000,00	33.000.000,00	-	33.000.000,00	-
2	Software Dinkes	2018	21.967.000,00	16.475.250,00	5.491.750,00	21.967.000,00	-
JUMLAH			54.967.000,00	49.475.250,00	5.491.750,00	54.967.000,00	-
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
3	Software Satpol	2012	3.399.000,00	3.399.000,00	-	3.399.000,00	-
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							
4	Software Pengeolah Video	2020	1.485.000,00	371.250,00	371.250,00	742.500,00	742.500,00
RSUD DR SOESELO							
5	System Informasi Manajemen RSUD dan Billing System	2003	199.080.000,00	199.080.000,00	-	199.080.000,00	-
6	Modul Aplikasi Medical Record	2004	95.750.000,00	95.750.000,00	-	95.750.000,00	-
7	Modul Aplikasi Akuntansi Keuangan RSUD	2004	95.750.000,00	95.750.000,00	-	95.750.000,00	-
8	Program Jasa Pelayanan	2010	24.135.000,00	24.135.000,00	-	24.135.000,00	-
9	Software Mesin Antrian	2014	67.792.500,00	67.792.500,00	-	67.792.500,00	-
10	Sistem Operasi Windows	2013	9.340.078,00	9.340.078,00	-	9.340.078,00	-
11	Software Aplikasi Rekam Medik Elektronik	2015	162.180.000,00	162.180.000,00	-	162.180.000,00	-
12	Software Aplikasi e-renggar	2016	195.425.000,00	195.425.000,00	-	195.425.000,00	-
13	Software Aplikasi SIM RS	2013	813.540.000,00	695.781.087,89	117.758.912,11	813.540.000,00	-
14	Kaspersky Small Office Security (Anti Virus)	2019	3.502.400,00	1.751.200,00	875.600,00	2.626.800,00	875.600,00
15	Lisensi Sistem Operasi dan Office Production	2020	137.870.000,00	13.787.000,00	13.787.000,00	27.574.000,00	110.296.000,00
JUMLAH			1.804.364.978,00	1.560.771.865,89	132.421.512,11	1.693.193.378,00	111.171.600,00
INSPEKTORAT							
16	Sistem Informasi Pengawasan	2006	33.062.550,00	33.062.550,00	-	33.062.550,00	-
17	Website Inspektorat	2015	35.330.000,00	35.330.000,00	-	35.330.000,00	-
18	Sistem Informasi Pengawasan	2015	38.275.000,00	38.275.000,00	-	38.275.000,00	-
JUMLAH			106.667.550,00	106.667.550,00	-	106.667.550,00	-

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AMORTISASI s.d 2020	AMORTISASI 2021	AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
RSUD SURADADI							-
19	Software Aplikasi SIM RS	Oct 2016	184.622.000,00	149.652.031,25	34.969.968,75	184.622.000,00	-
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH							-
20	Software Alat Presensi Pegawai	2016	47.162.500,00	47.162.500,00	-	47.162.500,00	-
21	Aplikasi Layanan Kepegawaian Terintegrasi (2)	2016	46.585.000,00	46.585.000,00	-	46.585.000,00	-
22	Aplikasi Layanan Kepegawaian Terintegrasi	2016	243.613.112,00	243.613.112,00		243.613.112,00	-
23	Aplikasi e-Cuti	2020	47.162.500,00	11.790.625,00	11.790.625,00	23.581.250,00	23.581.250,00
JUMLAH			384.523.112,00	349.151.237,00	11.790.625,00	360.941.862,00	-
DINAS PERHUBUNGAN							
24	SIM Pelayanan Angkutan	2019	10.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00
25	SIM Alat Perlengkapan Jalan	2019	47.251.435,00	23.625.717,50	11.812.858,75	35.438.576,25	11.812.858,75
26	Software SIM Parkir	2020	26.950.000,00	6.737.500,00	6.737.500,00	13.475.000,00	13.475.000,00
JUMLAH			84.201.435,00	35.363.217,50	21.050.358,75	56.413.576,25	27.787.858,75
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA							
27	Website IKM Mocibae.Com	2019	40.700.000,00	20.350.000,00	10.175.000,00	30.525.000,00	10.175.000,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							-
28	SQL SERVER & WINDOWS SERVER (Lisensi)	2020	313.625.000,00	31.362.500,00	31.362.500,00	62.725.000,00	250.900.000,00
29	Firewall (Lisensi) FortiGate-100E 1 Year Unified Threat Protection (UTP) dan Conterm Main Parts-only RMA of FG-100E	2021	57.035.000,00		5.703.500,00	5.703.500,00	51.331.500,00
30	HPE OV (lisensi) 3yr 24x7 SuppPhus 1 Svr Lic e5y34a	2021	2.663.400,00		266.340,00	266.340,00	2.397.060,00
31	Navicat Software	2021	22.440.000,00		5.610.000,00	5.610.000,00	16.830.000,00
32	Corel Draw Software	2021	11.440.000,00		2.860.000,00	2.860.000,00	8.580.000,00
JUMLAH			407.203.400,00	31.362.500,00	45.802.340,00	77.164.840,00	330.038.560,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							-
33	APLIKASI SIREP	2020	35.849.000,00	8.962.250,00	8.962.250,00	17.924.500,00	17.924.500,00
34	SISTEM INFORMASI PROFIL KEPENDUDUKAN	2021	34.837.000,00		8.709.250,00	8.709.250,00	26.127.750,00
JUMLAH			70.686.000,00	8.962.250,00	17.671.500,00	26.633.750,00	44.052.250,00
KECAMATAN DUKUHWARU							-
35	Software Website Kecamatan Dukuhwaru	2020	10.541.182,00	2.635.295,50	2.635.295,50	5.270.591,00	5.270.591,00
JUMLAH TOTAL			3.153.360.657,00	2.318.161.447,14	282.379.600,11	2.600.541.047,25	529.238.359,75

Lampiran 5.7. Aset Lainnya

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO 2021	SALDO 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.183.057.205,00	30.216.028.205,00
2	Dinas Kesehatan	6.621.724.283,00	6.639.439.433,00
3	RSUD DR.Soeselo	520.000.000,00	520.000.000,00
4	RSUD Suradadi	229.892.450,00	229.892.450,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	113.099.451.676,00	20.457.822.960,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	99.139.078,00	99.139.078,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	129.630.216,00	129.630.216,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.026.950.000,00	1.250.000,00
9	Dinas Sosial	361.970.400,00	361.970.400,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	25.525.875,00	25.525.875,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	474.035.300,00	2.014.485.300,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	234.067.400,00	745.314.400,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.625.000,00	9.625.000,00
14	Dinas Perhubungan	3.082.020.000,00	3.082.020.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika		
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37.893.900,00	37.893.900,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	141.047.350,00	141.047.350,00
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	4.384.544.295,00	4.384.544.295,00
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	238.116.575,00	238.116.575,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.805.911.411,00	1.817.389.411,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	971.821.700,00	971.821.700,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	164.614.545,00	164.614.545,00
23	Sekretariat Daerah	1.407.413.700,00	1.407.413.700,00
24	Inspektorat	65.987.000,00	65.987.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	528.223.550,00	528.223.550,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		5.770.070,00
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	872.483.788,00	872.483.788,00
29	Sekretariat DPRD	1.527.347.464,00	1.527.347.464,00
30	Kecamatan Adiwerna	466.981.595,00	466.981.595,00
31	Kecamatan Balapulang	298.486.395,00	326.667.395,00
32	Kecamatan Bojong	409.321.395,00	416.121.395,00
33	Kecamatan Bumijawa	157.632.545,00	157.632.545,00
34	Kecamatan Dukuhturi	339.966.395,00	339.966.395,00
35	Kecamatan Dukuhwaru	318.757.995,00	318.757.995,00
36	Kecamatan Jatinegara	348.694.395,00	348.694.395,00
37	Kecamatan Kedungbanteng	182.695.000,00	182.695.000,00
38	Kecamatan Kramat	970.737.395,00	970.737.395,00
39	Kecamatan Lebaksiu	355.883.295,00	355.883.295,00
40	Kecamatan Margasari	331.182.595,00	331.182.595,00
41	Kecamatan Pagerbarang	333.569.395,00	333.569.395,00
42	Kecamatan Pangkah	16.821.812,00	304.594.395,00

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO 2021	SALDO 2020
43	Kecamatan Slawi	143.988.146,00	143.988.146,00
44	Kecamatan Suradadi	403.787.395,00	403.787.395,00
45	Kecamatan Talang	357.550.403,00	357.550.403,00
46	Kecamatan Tarub	673.505.395,00	673.505.395,00
47	Kecamatan Warurejo	397.427.061,67	397.427.061,67
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.497.500,00	66.372.500,00
Jumlah		174.772.980.268,67	83.599.911.355,67

Lampiran 5.8. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rusak Berat)

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	SALDO 2021	SALDO 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(4.842.000,00)	(18.604.750,00)
2	Dinas Kesehatan	(275.188.587,00)	(292.903.737,00)
3	RSUD DR.Soeselo	(520.000.000,00)	(520.000.000,00)
4	RSUD Suradadi	(224.444.570,00)	(224.444.570,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum	(30.682.919.874,00)	(3.408.502.771,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00
7	Satpol-PP	(88.091.666,00)	(88.091.666,00)
8	BPBD	(735.380.000,00)	(1.250.000,00)
9	Dinas Sosial	(358.910.400,00)	(358.910.400,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	(25.249.156,00)	(25.249.156,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	(246.154.060,00)	(1.786.604.060,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(233.340.520,00)	(723.045.120,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(9.625.000,00)	(9.625.000,00)
14	Dinas Perhubungan	(3.082.020.000,00)	(3.082.020.000,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(35.706.700,00)	(35.706.700,00)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(135.238.350,00)	(135.238.350,00)
18	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	(771.563.145,00)	(771.563.145,00)
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata,	(204.356.428,00)	(204.356.428,00)
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(570.209.804,00)	(581.687.804,00)
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(970.625.700,00)	(970.625.700,00)
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(157.567.545,00)	(157.567.545,00)
23	Sekretariat Daerah	(366.096.994,00)	(366.096.994,00)
24	Inspektorat	(65.987.000,00)	(65.987.000,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	(270.672.270,00)	(270.672.270,00)
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	0,00	(4.642.042,00)
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	(823.884.900,00)	(823.884.900,00)
29	Sekretariat DPRD	(1.334.295.812,00)	(1.334.295.812,00)
30	Kecamatan Adiwerna	(426.155.778,00)	(426.155.778,00)
31	Kecamatan Balapulang	(274.270.467,00)	(302.451.467,00)
32	Kecamatan Bojong	(345.887.363,00)	(352.687.363,00)
33	Kecamatan Bumijawa	(154.556.020,00)	(154.556.020,00)
34	Kecamatan Dukuhturi	(332.758.639,00)	(332.758.639,00)
35	Kecamatan Dukuwaru	(311.204.627,00)	(311.204.627,00)
36	Kecamatan Jatinegara	(341.486.627,00)	(341.486.627,00)
37	Kecamatan Kedungbanteng	(182.695.000,00)	(182.695.000,00)
38	Kecamatan Kramat	(367.553.427,00)	(367.553.427,00)
39	Kecamatan Lebaksiu	(330.333.295,00)	(330.333.295,00)
40	Kecamatan Margasari	(324.489.667,00)	(324.489.667,00)
41	Kecamatan Pagerbarang	(314.578.090,00)	(314.578.090,00)
42	Kecamatan Pangkah	(10.128.884,00)	(218.504.800,00)
43	Kecamatan Slawi	(132.594.805,00)	(132.594.805,00)
44	Kecamatan Suradadi	(395.211.088,00)	(395.211.088,00)
45	Kecamatan Talang	(317.174.975,00)	(317.174.975,00)
46	Kecamatan Tarub	(467.706.488,00)	(467.706.488,00)
47	Kecamatan Warureja	(351.124.356,00)	(351.124.356,00)
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		(51.375.000,00)
	Jumlah	(47.572.280.077,00)	(21.936.217.432,00)

Lampiran 5.9. Utang Beban Listrik

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.080.257,00	21.346.367,00
2	Dinas Kesehatan	101.126.861,00	103.445.377,00
3	RSUD dr Soeselo	221.022.730,00	
4	RSUD Suradadi	84.864.524,00	58.368.618,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	11.130.133,00	10.321.340,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	7.333.918,00	5.458.012,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5.523.404,00	5.829.825,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
9	Dinas Sosial	3.514.485,00	3.266.598,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	4.187.675,00	2.975.370,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.447.279,00	6.482.716,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.769.090,00	5.659.201,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.113.684,00	3.154.550,00
14	Dinas Perhubungan	8.854.010,00	8.754.441,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.449.130,00	3.318.598,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.556.053,00	2.804.273,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.184.515,00	6.087.922,00
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	5.058.149,00	4.975.500,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.473.549,00	8.649.184,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.579.316,00	7.439.172,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.494.936,00	12.621.112,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.444.860,00	11.339.839,00
23	Sekretariat Daerah	49.931.627,00	39.658.228,00
24	Inspektorat	4.751.950,00	3.034.202,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	16.377.313,00	5.945.529,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.914.325.771,00	3.157.076.912,00
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.320.507,00	13.585.813,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	5.436.447,00	5.421.971,00
29	Sekretariat DPRD	17.972.973,00	11.641.570,00
30	Kecamatan Adiwerna	886.650,00	741.962,00
31	Kecamatan Balapulang	190.840,00	380.740,00
32	Kecamatan Bojong	671.911,00	884.658,00
33	Kecamatan Bumijawa	637.464,00	890.995,00
34	Kecamatan Dukuhturi	714.774,00	497.463,00
35	Kecamatan Dukuwaru	283.946,00	367.866,00
36	Kecamatan Jatinegara	233.428,00	387.349,00
37	Kecamatan Kedungbanteng		
38	Kecamatan Kramat	925.788,00	610.479,00
39	Kecamatan Lebaksiu	378.153,00	201.421,00
40	Kecamatan Margasari	1.361.988,00	889.624,00
41	Kecamatan Pagerbarang	1.651.706,00	1.515.890,00

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
42	Kecamatan Pangkah	1.980.982,00	1.608.829,00
43	Kecamatan Slawi	5.877.867,00	4.402.355,00
44	Kecamatan Suradadi	646.104,00	479.440,00
45	Kecamatan Talang	1.407.800,00	967.505,00
46	Kecamatan Tarub	1.097.933,00	518.486,00
47	Kecamatan Warureja	795.039,00	648.791,00
48	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.480.428,00	1.384.133,00
	Jumlah	3.595.547.947,00	3.546.040.226,00

Lampiran 5.10. Utang Beban Telepon

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.246.732,00	5.753.557,00
2	Dinas Kesehatan	28.150.755,00	7.341.951,00
3	RSUD dr Soeselo	5.957.235,00	
4	RSUD Suradadi	2.806.020,00	2.590.243,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	529.709,00	727.100,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan		4.005.520,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	560.000,00	509.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja		
9	Dinas Sosial	92.782,00	132.655,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	9.058.779,00	2.396.113,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.834.000,00	1.917.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	45.565,00	175.545,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.194.197,00	1.804.535,00
14	Dinas Perhubungan		
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	81.735,00	73.181,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	645.940,00	8.773.884,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	128.325,00	153.648,00
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	34.070,00	3.183.124,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	72.704,00	2.857.462,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.652.753,00	7.701.033,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.042.000,00	1.816.556,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.398.117,00	2.549.485,00
23	Sekretariat Daerah	14.084.190,00	13.542.987,00
24	Inspektorat	139.466,00	117.281,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	157.329,00	97.569,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	843.570,00	838.570,00
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	110.302,00	146.042,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	91.513,00	2.926.680,00
29	Sekretariat DPRD	4.466.981,00	4.331.067,00
30	Kecamatan Adiwerna		508.500,00
31	Kecamatan Balapulang	25.160,00	
32	Kecamatan Bojong		616.300,00
33	Kecamatan Bumijawa		448.000,00
34	Kecamatan Dukuhturi	34.070,00	38.124,00
35	Kecamatan Dukuhwaru	508.500,00	508.500,00
36	Kecamatan Jatinegara		
37	Kecamatan Kedungbanteng		
38	Kecamatan Kramat		
39	Kecamatan Lebaksiu	28.460,00	430.806,00
40	Kecamatan Margasari	607.500,00	605.000,00
41	Kecamatan Pagerbarang		453.500,00
42	Kecamatan Pangkah	68.500,00	68.500,00
43	Kecamatan Slawi	2.335.370,00	2.062.640,00
44	Kecamatan Suradadi		
45	Kecamatan Talang		
46	Kecamatan Tarub		455.570,00
47	Kecamatan Warureja		
48	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	250.012,00	911.513,00
	Jumlah	92.282.341,00	83.568.741,00

Lampiran 5.11. Utang Beban Air

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.642.500,00	3.164.250,00
2	Dinas Kesehatan	16.592.500,00	22.284.500,00
3	RSUD dr Soeselo	93.505.400,00	
4	RSUD Suradadi		
5	Dinas Pekerjaan Umum	605.000,00	1.152.500,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	600.000,00	140.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.144.000,00	4.152.500,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
9	Dinas Sosial	1.172.250,00	785.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	819.550,00	460.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	84.500,00	206.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.080.500,00	773.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.484.500,00	338.000,00
14	Dinas Perhubungan	458.500,00	296.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	154.000,00	77.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.676.500,00	364.000,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	383.000,00	346.500,00
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	560.000,00	579.000,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	54.088.000,00	6.412.000,00
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	636.000,00	942.500,00
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		2.523.000,00
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	920.000,00	508.000,00
23	Sekretariat Daerah	8.967.000,00	12.619.500,00
24	Inspektorat	613.500,00	69.500,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	710.500,00	403.000,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.907.500,00	1.522.000,00
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	285.500,00	73.000,00
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	3.689.000,00	1.641.500,00
29	Sekretariat DPRD	768.000,00	1.591.500,00
30	Kecamatan Adiwerna	471.000,00	1.413.500,00
31	Kecamatan Balapulang	778.000,00	763.660,00
32	Kecamatan Bojong	550.000,00	371.500,00
33	Kecamatan Bumijawa		
34	Kecamatan Dukuhturi	84.500,00	85.000,00
35	Kecamatan Dukuwaru	130.000,00	85.500,00
36	Kecamatan Jatinegara	444.500,00	360.500,00
37	Kecamatan Kedungbanteng		
38	Kecamatan Kramat		
39	Kecamatan Lebaksiu	340.500,00	115.500,00
40	Kecamatan Margasari	70.500,00	70.500,00
41	Kecamatan Pagerbarang	72.000,00	154.000,00
42	Kecamatan Pangkah		
43	Kecamatan Slawi	1.511.250,00	1.151.500,00
44	Kecamatan Suradadi		
45	Kecamatan Talang		

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
46	Kecamatan Tarub	92.500,00	228.500,00
47	Kecamatan Warureja	632.000,00	1.295.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74.500,00	74.500,00
	Jumlah	204.798.950,00	69.592.910,00

Lampiran 5.12 Utang Beban Internet

No.	Uraian	2021 (Rp.)	2020 (Rp.)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.566.470,00	6.123.700,00
2	Dinas Kesehatan		26.135.033,00
3	RSUD dr Soeselo	17.183.000,00	
4	RSUD Suradadi		1.100.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	10.372.998,00	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.162.163,00	1.181.015,00
7	Dinas Sosial	2.119.800,00	1.921.800,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	17.052.100,00	19.043.750,00
9	Dinas Perhubungan	4.056.420,00	2.022.393,00
10	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	2.070.500,00	
11	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3.043.270,00	
12	Sekretariat Daerah		
13	Inspektorat	3.141.695,00	2.251.500,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	2.975.000,00	2.975.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.010.000,00	7.010.000,00
16	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.098.000,00	10.098.000,00
17	Kecamatan Adiwerna	586.500,00	
18	Kecamatan Balapulang	624.000,00	
19	Kecamatan Bumijawa	442.500,00	
20	Kecamatan Dukuhturi	508.500,00	508.500,00
21	Kecamatan Kedungbanteng		387.750,00
22	Kecamatan Kramat	910.300,00	915.800,00
23	Kecamatan Lebaksiu	419.070,00	
24	Kecamatan Pagerbarang	453.500,00	
25	Kecamatan Pangkah	492.000,00	442.500,00
26	Kecamatan Suradadi	540.250,00	517.000,00
27	Kecamatan Talang	624.000,00	462.300,00
28	Kecamatan Tarub	522.674,00	
29	Kecamatan Warureja	698.436,00	431.500,00
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	652.250,00	
	Jumlah	98.325.396,00	83.527.541,00

Lampiran 5.13. Beban barang Pakai habis

No.	Beban Barang Pakai Habis	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.251.319.350,00	2.662.656.600,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	391.872.669,00	3.928.073.159,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.178.195.272,00	2.692.701.533,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	205.329.950,00	
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.242.819.680,00	681.640.770,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	51.080.000,00	45.337.000,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	77.297.500,00	69.485.000,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	171.215.000,00	87.170.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	13.338.881.196,57	18.127.981.683,50
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	582.627.756,00	
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.252.769.361,00	
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	89.087.680,00	
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	144.406.600,00	
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis K	3.784.795.332,00	2.603.420.666,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cet	7.622.296.867,00	8.324.139.284,25
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	237.203.000,00	172.572.700,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan	1.048.091.010,00	9.442.200,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kom	2.867.137.577,00	4.243.554.463,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Ka	279.766.382,00	
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.220.019.495,00	5.466.628.658,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkap	5.324.000,00	
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Ce	679.923.300,00	
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan	6.178.901.657,00	15.532.913.005,00
24	Beban Obat-Obatan-Obat	517.056.900,17	9.334.951.606,51
25	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	10.857.276.073,00	
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masya	25.713.629.534,00	
27	Beban Natura dan Pakan-Natura	208.290.000,00	572.783.495,00
28	Beban Natura dan Pakan-Pakan	13.420.000,00	
29	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian L	49.000.000,00	
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	12.935.794.370,00	8.415.061.095,00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.616.908.850,00	671.147.050,00
32	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.592.892.930,00	2.632.467.100,00
33	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.139.100.500,00	
34	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	56.500.000,00	
35	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.260.000,00	68.500.000,00
36	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	43.924.000,00	120.640.000,00
37	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	918.762.500,00	1.232.450.750,00
38	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.980.000,00	87.500.000,00
39	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	21.600.000,00	8.014.400,00
40	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	28.000.000,00	
41	Beban Pakaian Batik Tradisional	282.651.600,00	276.676.000,00
42	Beban Pakaian Olahraga	306.395.050,00	440.985.400,00
43	Beban Pakaian Paskibraka	67.083.400,00	
44	Beban Komponen rambu-rambu	92.660.370,00	
	Jumlah	113.372.546.711,74	88.508.893.618,26

Lampiran 5.14. Beban Jasa kantor

No.	Beban Jasa Kantor	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.925.665.650,00	
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.312.465.000,00	
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	327.000.000,00	
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	469.200.000,00	
5	Beban Honorarium Rohaniwan	5.000.000,00	
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.310.000,00	
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	19.995.000,00	
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	284.435.000,00	
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	32.556.019.600,00	
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	65.518.794.458,00	
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	3.851.793.420,00	
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.094.624.600,00	
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	190.060.000,00	
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	590.655.000,00	
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.428.905.000,00	
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	917.410.000,00	
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.785.680.000,00	
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	4.918.098.098,00	
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	73.450.000,00	
20	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	151.080.000,00	
21	Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.687.565.181,00	
22	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	221.320.000,00	
23	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.627.031.812,00	
24	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.011.080.000,00	2.187.455.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.721.774.249,00	
26	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.855.980.284,00	
27	Beban Jasa Tenaga Supir	699.075.000,00	
28	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	38.355.000,00	
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.200.000,00	
30	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	272.155.250,00	
31	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	55.742.400,00	
32	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	4.133.411,00	3.652.794,00
33	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	11.345.000,00	
34	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	136.902.900,00	
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	318.225.000,00	
36	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	20.396.720,00	
37	Beban Jasa Kalibrasi	128.385.470,00	
38	Beban Jasa Pengolahan Sampah	27.125.630,00	
39	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	313.373.500,00	
40	Beban Jasa Pengukuran Tanah	2.830.640,00	
41	Beban Jasa Jalan/Tol	5.622.000,00	
42	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.114.067.200,00	
43	Beban Tagihan Telepon	887.344.505,00	915.527.921,00
44	Beban Tagihan Air	570.647.965,00	705.752.006,00

No.	Beban Jasa Kantor	Saldo 2021(Rp)	Saldo 2020(Rp)
45	Beban Tagihan Listrik	4.408.994.658,00	42.773.912.154,00
46	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	508.134.540,00	583.780.500,00
47	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.675.313.755,00	2.314.449.168,00
48	Beban Paket/Pengiriman	7.794.100,00	3.085.800,00
49	Beban Registrasi/Keanggotaan	1.050.000,00	
50	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	311.190.047,00	530.075.880,00
51	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	36.267.963.801,00	
52	Beban Pengolahan Air Limbah	153.798.521,00	
53	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO	3.630.000,00	
54	Beban Jasa Kantor Lainnya		94.318.212.614,00
Jumlah		207.494.189.365,00	144.335.903.837,00